



P - ISSN 2987 - 7342

E - ISSN 2987 - 8314

THE PROSECUTOR LAW REVIEW

VOLUME 3 NO. 1, APRIL 2025

Rita Komalasari dan Cecep Mustafa

Peran Jaksa dalam Menuntut Kejahatan Transnasional
Terkait Cryptocurrency

Adri Nurrahmat Sulisty

Pengawasan Kesehatan Yustisial dan Peran RS Adhyaksa
dalam Mencegah Penyalahgunaan Alasan Medis di Sistem
Hukum Indonesia

Asmadi Syam, Mohd. Din dan Devi Safliana

Konsep Ideal Penyitaan dalam Sistem Peradilan Pidana

Desty Puspita Sari dan Muh. Ibnu Fajar Rahim

Penanganan Aset Kripto Sebagai Barang Bukti Dalam
Perkara Pidana

Ludfie Jatmiko dan Andi Fariana

Perjanjian Kerja Sebagai Upaya Perlindungan serta
Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia untuk Pekerja Migran
Indonesia

**Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum
Kejaksaan Agung**



CALL FOR PAPER

THE PROSECUTOR LAW REVIEW

The Prosecutor Law Review (The PROLEV) adalah jurnal akses terbuka dan *peer-review* yang bertujuan untuk menyebarkan kajian konseptual tentang ilmu hukum, bidang lainnya sepanjang berkaitan dengan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan/Jaksa Agung/Jaksa/Penuntut Umum, baik di Indonesia maupun di beberapa negara.

The PROLEV diterbitkan oleh Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung dalam 3 (tiga) periode dalam setahun, yakni April, Agustus dan Desember dengan menggunakan *Open Journal System* (OJS). The PROLEV menerima artikel berbahasa Indonesia dan/atau Inggris.

The PROLEV memprioritaskan artikel yang mengandung unsur kebaruan, pemecahan masalah/solutif, dan studi perbandingan. Artikel wajib menyertakan referensi minimal 10 (sepuluh) jurnal internasional dan/atau nasional. Untuk informasi lebih lanjut terkait *Author Guidelines* dapat dilihat pada *website* The PROLEV.

PERIODE TERBIT

APRIL, AGUSTUS, DESEMBER.

KONTAK:

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG
GEDUNG PUSTRAJAGAKKUM LANTAI 4 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 1 KEBAYORAN
BARU, JAKARTA SELATAN, HP. +6281253048040 (WA ONLY),
e-mail: prolev@kejaksaan.go.id

 **Submission Link**
<https://prolev.kejaksaan.go.id>



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



TIM REDAKSI

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum
(Pustrajakgakkum)

Ketua Redaktur

Haryono, S.H., M.H.

(Kepala Bidang Strategi Kebijakan Politik
Hukum, Pemerintahan, dan Pembangunan
Sumber Daya Manusia, Pustrajakgakkum)

Penyunting/Editor

- Cahya Agung Satria Nugraha, S.AP
(Penyusun Naskah, Pustrajakgakkum)
- Noor Azlin Tauchid, M.Krim
(Analisis, Pustrajakgakkum)
- Muhammad Alirahman Djoyosugito, S.H, M.H.
(Analisis, Pustrajakgakkum)

Sekretaris

- Nisya, S.H., M.H.
(Analisis, Biro Kepegawaian)
- Meryana A. Rajagukguk, S.H., M.H.
(Analisis, Pustrajakgakkum)
- Fransiska Vera Emelita, S.H., M.H.
(Pengelola Tata Naskah, Pustrajakgakkum)
- Fernando S.H., M.H.
(Penyusun Naskah, Pustrajakgakkum)
- Lalu Rasyid Rido, S.Ei., S.H.
(Pengelola Tata Naskah, Pustrajakgakkum)
- Surya Darma Kardeli, M.H.
(Analisis, Pustrajakgakkum)

Redaktur

- Ismail, S.T, S.H.
(Kabag TU, Pustrajakgakkum)
- Dr. Henry Yoseph Kindangen, S.H., M.H.
(Kasubag Pemantauan dan Evaluasi II, Biro
Perencanaan)
- Sinta Dewi Hutapea, S.H., M.H.
(Jaksa Fungsional, Pustrajakgakkum)
- Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H.
(Jaksa Fungsional, Biro Hukum dan HLN)
- Rudi Pradisetia Sudirdja, S.H., M.H.
(Kasubag Pemantauan dan Evaluasi II, Biro
Perencanaan)

Desain Grafis

- Yudhisthira Cahya Buana, S.Kom.
(Analisis, Pusdaskrimti)
- Ines Rachmawati Pailalah, S.T, M.H.
(Penyusun Naskah, Pustrajakgakkum)

Isi The Prosecutor Law Review dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya
(*Citation is permitted with acknowledgement of the source*)



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



REVIEWER

- Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. (Universitas Indonesia)
- Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. (Universitas Indonesia)
- Dr. Rudi Pradisetia Sudirja, S.H., M.H. (Kejaksaan Republik Indonesia)
- Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H. (Kejaksaan Republik Indonesia)
- Ridwan Arifin, S.H., LL.M (Universitas Negeri Semarang)



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



PRAKATA REDAKTUR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat kepada Redaktur sehingga dapat menyelesaikan Volume Kedua Edisi Kedua “The Prosecutor Law Review”. Pada Volume 3 Nomor 1 ini, Redaksi menampilkan 5 (lima) artikel yang sesuai dengan focus dan ruang lingkup The PROLEV.

Artikel pertama ditulis oleh Rita Komalasari dan Cecep Mustafa dengan judul “*Peran Jaksa dalam Menuntut Kejahatan Transnasional Terkait Cryptocurrency*” yang membahas terkait tentang bagaimana jaksa menegakkan hukum lintas negara dalam kasus kejahatan yang memanfaatkan *cryptocurrency*.

Artikel kedua ditulis oleh Adri Nurrahmat Sulistyو dengan judul “*Pengawasan Kesehatan Yustisial dan Peran RS Adhyaksa dalam Mencegah Penyalahgunaan Alasan Medis di Sistem Hukum Indonesia*” yang membahas terkait dampak penyalahgunaan alasan kesehatan serta mengevaluasi peran RS Adhyaksa sebagai institusi medis yustisial dalam memastikan transparansi dan keadilan dalam sistem hukum.

Artikel ketiga ditulis oleh Asmadi Syam, Mohd. Din dan Devi Safliana dengan judul “*Konsep Ideal Penyitaan dalam Sistem Peradilan Pidana*” yang membahas terkait dampak yuridis penyitaan pada tahap penuntutan serta bagaimana konsep ideal penyitaan.

Artikel keempat ditulis oleh Desty Puspita Sari dan Muh. Ibnu Fajar Rahim dengan judul “*Penanganan Aset Kripto Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana*” yang membahas tanggung jawab jaksa untuk menjaga integritas aset kripto sebagai barang bukti dan/atau alat bukti yang sah, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan.

Artikel terakhir ditulis oleh Ludfie Jatmiko dan Andi Fariana dengan judul “*Perjanjian Kerja Sebagai Upaya Perlindungan serta Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia untuk Pekerja Migran Indonesia*” yang membahas tentang permasalahan Kasus yang terjadi pada pekerja rumah tangga (PRT) salah satunya adalah tentang Jaminan Hak asasi manusia(HAM).

Dengan semangat untuk mencapai akreditasi, Redaksi berharap tulisan-tulisan dalam “The Prosecutor Law Review” yang ditampilkan bisa memberikan manfaat dan wawasan bagi para pembaca.

Semoga bermanfaat. Terimakasih.

Walaikumsalam Wwarahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 28 April 2025



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



DAFTAR ISI

REDAKTUR	iii
REVIEWER	iv
PRAKATA REDAKTUR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK/ <i>ABSTRACT</i>	vii
<ul style="list-style-type: none"> • Peran Jaksa dalam Menuntut Kejahatan Transnasional Terkait Cryptocurrency / <i>Prosecutor's Role in Prosecuting Cryptocurrency-Related Transnational Crimes</i> Rita Komalasari, Cecep Mustafa..... • Pengawasan Kesehatan Yustisial dan Peran RS Adhyaksa dalam Mencegah Penyalahgunaan Alasan Medis di Sistem Hukum Indonesia / <i>Judicial Health Oversight and the Role of RS Adhyaksa in Preventing the Misuse of Medical Excuses in Indonesia's Legal System</i> Adri Nur Rahmat Sulistyio • Konsep Ideal Penyitaan dalam Sistem Peradilan Pidana / <i>The Ideal Concept of confiscation in the Criminal Justice System</i> Asmadi Syam, Mohd. Din, Devi Safliana • Penanganan Aset Kripto Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana / <i>Handling Of Crypto Assets As Evidence In Criminal Cases</i> Desty Puspita Sari, Muh. Ibnu Fajar Rahim • Perjanjian Kerja Sebagai Upaya Perlindungan serta Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia untuk Pekerja Migran Indonesia / <i>Employment Agreement as A Commitment to Safeguard and Uphold the Human Rights of Indonesian Migrant Workers</i> Ludfie Jatmiko, Andi Fariana 	<p>1-22</p> <p>24-49</p> <p>51-73</p> <p>75-93</p> <p>95-117</p>
BIODATA PENULIS	xv
PEDOMAN PENULISAN	xxi



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Rita Komalasari, Cecep Mustafa

Peran Jaksa dalam Menuntut Kejahatan Transnasional Terkait Cryptocurrency

The Prosecutor Law Review

Volume 3 Nomor 1, Hlm. 1-22

Abstrak

Studi ini, yang berjudul "Peran Jaksa dalam Menuntut Tindak Pidana Transnasional Terkait Cryptocurrency," bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran penting dari kerja sama informal dalam mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh aset cryptocurrency dalam kasus transnasional. Studi ini memberikan wawasan tentang bagaimana mekanisme kerja sama informal antara pemangku kepentingan internasional sangat penting bagi jaksa dalam mengelola kompleksitas penyelidikan terkait cryptocurrency. Penelitian ini menemukan bahwa kerja sama informal sangat diperlukan bagi jaksa, menawarkan kekuatan seperti kelincahan, fleksibilitas, dan pertukaran informasi yang efektif. Studi ini juga mengidentifikasi kelemahan seperti asimetri informasi dan masalah koordinasi. Analisis ini menekankan pentingnya meningkatkan hubungan kolaboratif antara pemangku kepentingan internasional dan menawarkan rekomendasi untuk memperbaiki mekanisme kerja sama informal guna mendukung upaya penuntutan dengan lebih baik.

Kata Kunci: Aset Cryptocurrency, Kerjasama Informal, Kasus Transnasional, Pihak-Pihak Internasional

Rita Komalasari, Cecep Mustafa

Prosecutor's Role in Prosecuting Cryptocurrency-Related Transnational Crimes

The Prosecutor Law Review

Abstract

This study, titled Prosecutor's Role in Prosecuting Cryptocurrency-Related Transnational Crimes, aims to comprehensively analyze the crucial role of informal cooperation in addressing the challenges posed by cryptocurrency assets in transnational cases. It provides insights into how informal cooperation mechanisms among international stakeholders are vital for prosecutors in managing the complexities of cryptocurrency-related investigations. The study finds that informal cooperation is indispensable for prosecutors, offering strengths such as agility, flexibility, and effective information exchange. It also identifies weaknesses like information asymmetry and coordination issues. The analysis underscores the importance of enhancing collaborative relationships among international stakeholders and offers recommendations for improving informal cooperation mechanisms to better support prosecutorial efforts.

Keyword: Cryptocurrency Assets, Informal Cooperation, Transnational Cases, International Stakeholders.

Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Adri Nur Rahmat Sulisty

Pengawasan Kesehatan Yustisial dan Peran RS Adhyaksa dalam Mencegah Penyalahgunaan Alasan Medis di Sistem Hukum Indonesia

Journal the Prosecutor Law Review

Volume 3 Nomor 1, Hlm. 24-49

Abstrak

Penyalahgunaan alasan kesehatan oleh tersangka atau terdakwa dalam sistem peradilan Indonesia menjadi tantangan serius bagi efektivitas penegakan hukum. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penyalahgunaan alasan kesehatan serta mengevaluasi peran RS Adhyaksa sebagai institusi medis yustisial dalam memastikan transparansi dan keadilan dalam sistem hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan Open Source Intelligence (OSINT) untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum, jurnal akademik, serta studi kasus nyata. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa tanpa intervensi dan regulasi yang ketat, jumlah penyalahgunaan alasan kesehatan diprediksi akan meningkat hingga 2045, menyebabkan penundaan proses hukum dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Sebaliknya, penguatan peran RS Adhyaksa dalam verifikasi kesehatan tahanan dapat mengurangi manipulasi medis, meningkatkan efektivitas hukum, dan menghemat anggaran negara. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penguatan regulasi serta implementasi teknologi dalam sistem kesehatan yustisial sangat penting untuk memastikan keadilan hukum yang lebih baik di masa depan.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Alasan Kesehatan, RS Adhyaksa, Sistem Peradilan, Transparansi Hukum, Prediksi Hukum 2045

Adri Nur Rahmat Sulistyono

Judicial Health Oversight and the Role of RS Adhyaksa in Preventing the Misuse of Medical Excuses in Indonesia's Legal System

Journal the Prosecutor Law Review

Abstract

The misuse of health reasons by suspects or defendants in Indonesia's judicial system poses a significant challenge to the effectiveness of law enforcement. This study aims to analyze the impact of such misuse and evaluate the role of RS Adhyaksa as a judicial medical institution in ensuring transparency and fairness in the legal system. The research employs a qualitative approach using literature review and Open Source Intelligence (OSINT) to collect data from legal sources, academic journals, and real case studies. The findings indicate that without strict intervention and regulation, the misuse of health claims is projected to increase significantly by 2045, leading to prolonged legal processes and decreased public trust in the judiciary. Conversely, strengthening RS Adhyaksa's role in verifying detainee health claims can reduce medical manipulation, enhance legal effectiveness, and optimize state budget allocations. The study concludes that reinforcing regulations and implementing technology in the judicial health system are crucial steps to ensuring a fair and transparent legal framework for the future.

Keyword: Misuse of Health Claims, RS Adhyaksa, Judicial System, Legal Transparency, Legal Prediction 2045.

Asmadi Syam, Mohd. Din, Devi Saffiana

Konsep Ideal Penyitaan dalam Sistem Peradilan Pidana

Journal the Prosecutor Law Review

Volume 3 Nomor 1, Hlm. 51-73

Abstrak

Konsep dasar penyitaan masih merujuk pada Pasal 38 Ayat (1) KUHP dan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Dalam perkembangannya konsep tersebut sudah tidak begitu relevan untuk dipertahankan, karena diketahui dalam penanganan perkara banyak barang/benda ditemukan setelah perkara pada tahap penuntutan, sehingga untuk keabsahannya diperlukan suatu mekanisme perolehan untuk dapat dipertimbangkan dalam putusan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi dampak yuridis penyitaan pada tahap penuntutan serta bagaimana konsep ideal penyitaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primair, subsidair dan tersier. Hasil Penelitian menunjukkan kewenangan penyitaan pada tahap penuntutan masih dianggap bertentangan dengan legalitas formil KUHP. Konsep ideal penyitaan harus dimulai dari perubahan pengertian penyitaan yaitu sebagai tindakan aparat penegak hukum untuk mengambil alih barang bergerak maupun tidak bergerak termasuk perangkat elektronik/sistem informasi elektronik untuk kepentingan pembuktian suatu tindak pidana di setiap tingkatan penanganan perkara, berikut konsep sita jaminan seperti dalam perdata dapat diadopsi sebagai upaya penjaminan pengembalian kerugian negara.

Kata Kunci: Penyitaan, Penuntutan, Sistem Peradilan Pidana.

Asmadi Syam, Mohd. Din, Devi Saffiana

The Ideal Concept of confiscation in the Criminal Justice System

Journal the Prosecutor Law Review

Abstract

The basic concept of confiscation still refers to Article 38 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and can only be carried out by investigators. In its development, this concept is no longer relevant to be maintained, because it is known that in handling cases many items/objects are found after the

prosecution process, so for its validity an acquisition method is needed so that it can be considered in the judge's decision. This research aims to elaborate on the legal impact of confiscation at the prosecution process as well as the ideal concept of the confiscation. The research method uses normative legal research with secondary data consisting of primary, subsidiary and tertiary legal materials. The research result shows that the authority of confiscation at the prosecution process is still contradicts with the formal legality of the Criminal Procedure Code. The ideal concept of confiscation must start from a change in the definition of confiscation, which is known as an action by law enforcement officials to take control of movable and immovable property, including electronic devices/electronic information systems to prove a criminal case at every level of case handling, The following concept of confiscate collateral as in civil law can be adopted as an effort to guarantee the return of state losses.

Keyword: Confiscation, Prosecution, Criminal Justice System.

Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Desty Puspita Sari, Muh. Ibnu Fajar Rahim

Penanganan Aset Kripto Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana

Journal the Prosecutor Law Review

Volume 3 Nomor 1, Hlm. 75-93

Abstrak

Meningkatnya jumlah pengguna dan transaksi aset kripto setiap tahunnya berpotensi menambah modus operandi tindak pidana yang menggunakan aset kripto, baik sebagai alat untuk melakukan tindak pidana (instrumental delicten) atau sebagai hasil tindak pidana (corpus delicten). Aset kripto merupakan barang bukti yang memiliki sifat yang sangat rentan, nilainya fluktuatif, serta mudah berubah dan dipindahtangankan. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Penanganan aset kripto harus memenuhi exclusionary of rule principle yang mewajibkan perolehan bukti dengan cara-cara yang berdasarkan hukum sehingga aset kripto menjadi barang bukti yang sah (lawfully legal evidence) untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana. Jaksa selaku pengendali perkara (dominus litis) memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas aset kripto sebagai barang bukti dan/atau alat bukti yang sah, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di

persidangan, maupun pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam praktiknya, belum ada instrumen hukum yang khusus mengatur tata cara penanganan aset kripto dalam perkara pidana sehingga menimbulkan praktek penanganan yang berbeda-beda (disparitas). Oleh karena itu, dibutuhkan suatu persamaan persepsi terkait penanganan aset kripto sebagai barang bukti dalam perkara pidana.

Kata Kunci: Penanganan, Aset Kripto, Barang Bukti

Desty Puspita Sari, Muh. Ibnu Fajar Rahim

Handling Of Crypto Assets As Evidence In Criminal Cases

Journal the Prosecutor Law Review

Abstract

The increasing number of users and transactions of crypto assets every year has the potential to increase the modus operandi of criminal acts that use crypto assets, either as a tool to commit a criminal act (instrumental offense) or as a result of a criminal act (corpus delicten). Crypto assets are evidence that are very vulnerable, fluctuating in value, and easily changed and transferred. Therefore, handling must be done quickly and precisely. Handling of crypto assets must comply with the exclusionary rule principle which requires obtaining evidence in ways that are based on law so that crypto assets become legal evidence (lawfully legal evidence) to be used in proving criminal cases. The prosecutor as case controller (dominus litis) has the responsibility to maintain the integrity of crypto assets as evidence and/or valid evidence, both at the stages of investigation, prosecution, examination at trial, and implementation of court decisions. In practice, there is no legal instrument that specifically regulates procedures for handling crypto assets in criminal cases, giving rise to different handling practices (disparities). Therefore, a common perception is needed regarding the handling of crypto assets as evidence in criminal cases..

Keyword: Judicial Connection, Problematics, Prospects for Connection Arrangements.

Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Ludfie Jatmiko, Andi Fariana

Perjanjian Kerja Sebagai Upaya Perlindungan serta Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia untuk Pekerja Migran Indonesia

Journal the Prosecutor Law Review

Volume 3 Nomor 1, Hlm. 95-117

Abstrak

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang secara alami dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai anugerah. Hak-hak ini mencakup antara lain hak untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan lainnya. Di tengah tingginya jumlah penduduk di Indonesia, meningkatnya persaingan, terbatasnya lapangan kerja, serta penghasilan yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat, banyak masyarakat akhirnya memilih mencari peluang kerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Fakta ini, nyatanya, tidak diimbangi oleh kemampuan pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap mereka. Sempitnya lapangan kerja di dalam negeri ini menyebabkan masyarakat bawah berpaling pada peluang kerja di luar negeri yang lebih luas dan menjanjikan secara ekonomi. Di sisi lain, negara merupakan pihak yang wajib menjamin hak-hak ekonomi. Hak ini termasuk hak asasi dewasa ini. Artikel ini membahas terkait konsep Perjanjian Kerja Sebagai Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Migran Indonesia.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja, Hak Asasi Manusia

Ludfie Jatmiko, Andi Fariana

Employment Agreement as A Commitment to Safeguard and Uphold the Human Rights of Indonesian Migrant Workers

Journal the Prosecutor Law Review

Abstract

Human rights are natural that have been attached to individuals since birth and given directly by God Almighty and as a gift, World Health Organization has the right to education, health rights, employment rights, and so on. As is known, the dense population of Indonesia, increasing competition, and narrow employment and income are not as expected in addition to the growing daily needs of living, encouraging people to prefer to work abroad commonly referred to as Indonesian Migrant Workers (PMI). This fact, in fact, is not balanced by the government's ability to provide jobs that are able to absorb them. The narrowness of employment in the country has caused the lower society to turn to wider and more economically promising job

opportunities abroad. On the other hand, the state is the party that is obliged to guarantee economic rights. This right is a human right today. This article discusses the concept of Employment Agreements as an Effort to Protect and Fulfill Human Rights for Indonesian Migrant Workers.

Keyword: Employment Agreements, Human Rights

Law Quote

“Hati Nurani tidak ada di dalam buku. Saya ingin mengajak teman-teman harus tetap memperhatikan rasa keadilan yang ada di masyarakat”

**Burhanuddin
(Jaksa Agung RI Ke-24)**



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Prosecutor's Role in Prosecuting Cryptocurrency-Related Transnational Crimes

Peran Jaksa dalam Menuntut Kejahatan Transnasional Terkait Cryptocurrency

Rita Komalasari¹, Cecep Mustafa²

¹Yarsi University, Indonesia

²Stirling University, United Kingdom

Article Info

Corresponding Author:

Fadli Alfariis

✉ rita.komalasari161@gmail.com

History:

Submitted: 12-09-2024

Revised: 24-04-2025

Accepted: 25-05-2025

Keyword:

Cryptocurrency Assets, Informal Cooperation, Transnational Cases, International Stakeholders

Kata Kunci:

Aset Cryptocurrency, Kerjasama Informal, Kasus Transnasional, Pihak-Pihak Internasional



Copyright © 2025
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

Abstract

This study, titled Prosecutor's Role in Prosecuting Cryptocurrency-Related Transnational Crimes, aims to comprehensively analyze the crucial role of informal cooperation in addressing the challenges posed by cryptocurrency assets in transnational cases. It provides insights into how informal cooperation mechanisms among international stakeholders are vital for prosecutors in managing the complexities of cryptocurrency-related investigations. The study finds that informal cooperation is indispensable for prosecutors, offering strengths such as agility, flexibility, and effective information exchange. It also identifies weaknesses like information asymmetry and coordination issues. The analysis underscores the importance of enhancing collaborative relationships among international stakeholders and offers recommendations for improving informal cooperation mechanisms to better support prosecutorial efforts.

Abstrak

Studi ini, yang berjudul "Peran Jaksa dalam Menuntut Tindak Pidana Transnasional Terkait Cryptocurrency," bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran penting dari kerja sama informal dalam mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh aset cryptocurrency dalam kasus transnasional. Studi ini memberikan wawasan tentang bagaimana mekanisme kerja sama informal antara pemangku kepentingan internasional sangat penting bagi jaksa dalam mengelola kompleksitas penyelidikan terkait cryptocurrency. Penelitian ini menemukan bahwa kerja sama informal sangat diperlukan bagi jaksa, menawarkan kekuatan seperti kelincahan, fleksibilitas, dan pertukaran informasi yang efektif. Studi ini juga mengidentifikasi kelemahan seperti asimetri informasi dan masalah koordinasi. Analisis ini menekankan pentingnya meningkatkan hubungan kolaboratif antara pemangku kepentingan internasional dan menawarkan rekomendasi untuk memperbaiki mekanisme kerja sama informal guna mendukung upaya penuntutan dengan lebih baik.

A. INTRODUCTION

1. Background

Prosecutor's Role in Prosecuting Cryptocurrency-Related Transnational Crimes. Cryptocurrencies, with their decentralized nature and pseudonymous transactions, have created a unique environment that transcends traditional borders, presenting significant hurdles for authorities investigating transnational cases involving digital assets.¹ As such, effective cooperation among international stakeholders is paramount to address the complexities associated with these cases. This study delves into the intricacies of informal cooperation in handling transnational cases involving cryptocurrency assets. It begins by contextualizing the significance of cryptocurrency assets in today's global financial system, elucidating their features that pose challenges to traditional investigation methods. Subsequently, the study examines the structure of informal cooperation mechanisms among international stakeholders, highlighting the roles played by various entities such as law enforcement agencies, regulatory bodies, and financial institutions.

The research on informal cooperation in handling transnational cases with cryptocurrency assets contributes novel insights and perspectives to the field of taking evidence of cryptocurrency assets in several key ways:² This research provides a thorough examination of the informal cooperation mechanisms employed by international stakeholders, shedding light on their structures, functions, and effectiveness in addressing transnational cases involving cryptocurrency assets. By offering a comprehensive analysis, the study enhances understanding of how informal cooperation complements formal legal frameworks in navigating the challenges posed by digital assets. Through a critical evaluation, this research identifies the strengths and weaknesses of informal cooperation mechanisms in handling cryptocurrency-related transnational cases. By delineating these aspects, the study offers valuable insights into the practical implications of informal cooperation and informs strategies for optimizing collaborative efforts among international stakeholders. By incorporating real-world case studies and examples, this research illustrates the practical implications of informal cooperation in addressing transnational cases involving cryptocurrency assets. By

¹Collins, John. "Crypto, crime and control." Cryptocurrencies as an enabler of organized crime, *Global Initiative Against Transnational Organized Crime* (2022).

² Laksono, Hazmi Tri, and Muhammad Fuadillah Nugraha. "Cryptocurrency Fever: Should Southeast Asian countries cooperate on facing the cryptocurrency market." *Proceedings of Airlangga Conference on International Relations (ACIR 2018) Politics, Economy, and Security in the Changing Indo-Pacific Region*. 2021. <https://doi.org/10.5220/0010276603240330>

analyzing these cases, the study provides concrete evidence of the efficacy of informal cooperation mechanisms and elucidates their impact on the outcomes of investigations and legal proceedings. Building upon the analysis of strengths and weaknesses, this research identifies potential areas for improvement in informal cooperation mechanisms. By pinpointing specific challenges and shortcomings, the study informs strategies for enhancing the effectiveness of collaborative efforts among international stakeholders in handling cryptocurrency-related transnational cases. Through its central argument, this research advocates for the importance of collaborative approaches in addressing the challenges posed by cryptocurrency assets in transnational cases. By emphasizing the necessity of fostering collaborative relationships among international stakeholders, the study underscores the value of informal cooperation alongside formal legal frameworks in combating illicit activities and upholding the integrity of the financial system. This research offers a nuanced understanding of the role of informal cooperation in taking evidence of cryptocurrency assets, providing valuable insights and perspectives that contribute to the advancement of knowledge in this rapidly evolving field.

Existing literature on the role of informal cooperation in addressing the challenges posed by cryptocurrency assets in transnational cases often lacks a comprehensive analysis that encompasses the various dimensions of collaborative efforts among international stakeholders.³ Several key gaps in the literature can be identified, and this study seeks to address these gaps through its focused analysis: Much of the existing literature tends to focus on formal legal frameworks for international cooperation, with limited attention given to informal mechanisms. This study fills this gap by providing a detailed analysis of informal cooperation mechanisms, including information sharing, expertise exchange, and collaborative efforts among law enforcement agencies, regulatory bodies, and financial institutions. While some literature discusses the theoretical aspects of informal cooperation, there is often a lack of empirical evidence and real-world case studies to illustrate its practical implications.⁴ This study addresses this gap by incorporating real-world examples and case studies to demonstrate the impact of informal cooperation on the outcomes of transnational cases involving cryptocurrency assets. Existing literature may overlook the strengths and weaknesses of informal

³ Reinsberg, Bernhard. "Fully-automated liberalism? Blockchain technology and international cooperation in an anarchic world." *International Theory* 13.2 (2021): 287-313. <https://doi.org/10.1017/S1752971920000305>

⁴ Kethineni, Sessa, and Ying Cao. "The rise in popularity of cryptocurrency and associated criminal activity." *International Criminal Justice Review* 30.3 (2020): 325-344. <https://doi.org/10.1177/1057567719827051>

cooperation mechanisms in addressing the challenges posed by cryptocurrency assets. This study fills this gap by conducting a critical evaluation of informal cooperation, identifying its strengths, such as agility and flexibility, as well as its weaknesses, such as potential information asymmetry and coordination issues. The literature may lack detailed discussions on specific strategies for fostering effective collaboration among international stakeholders in handling cryptocurrency-related transnational cases. This study addresses this gap by examining various collaboration strategies, such as joint investigations, task forces, and information-sharing platforms, and assessing their effectiveness in different contexts. Many existing studies fail to provide concrete recommendations for enhancing informal cooperation mechanisms in addressing the challenges posed by cryptocurrency assets. This study fills this gap by identifying specific areas for improvement, such as enhancing trust and transparency among stakeholders, streamlining information-sharing protocols, and leveraging technological solutions for collaboration. By addressing these gaps in the literature, this study contributes to a more comprehensive understanding of the role of informal cooperation in addressing the challenges posed by cryptocurrency assets in transnational cases. Through its detailed analysis and practical insights, the study aims to inform policymakers, law enforcement agencies, and other relevant stakeholders about the importance of informal cooperation in combating illicit activities in the digital age.

2. Research Question

"How can informal cooperation mechanisms, such as joint task forces, information-sharing platforms, and technological solutions, be effectively utilized to address the challenges posed by cryptocurrency assets in transnational cases, and what factors contribute to successful collaboration among international stakeholders in combating illicit activities involving digital assets?"

3. Method

Literature study serves as a foundational method for understanding the landscape of informal cooperation in addressing challenges posed by cryptocurrency assets. By reviewing scholarly articles, reports, and case studies, insights into existing practices, challenges, and opportunities for collaboration are gleaned. Data analysis involves synthesizing findings from the literature study to identify common themes, trends, and gaps in the literature. This analysis informs the development of the study's arguments,

providing a comprehensive overview of the role of informal cooperation in combating cryptocurrency-related transnational cases.

B. DISCUSSION

1. Effective Cooperation Among International Stakeholders

In transnational cases involving cryptocurrency assets, jurisdictional boundaries often complicate investigation and prosecution efforts.⁵ Effective cooperation among international stakeholders, including law enforcement agencies, regulatory bodies, and financial institutions, is essential for overcoming these barriers. By sharing intelligence, coordinating enforcement actions, and aligning regulatory approaches, international stakeholders can enhance their collective ability to combat illicit activities and hold perpetrators accountable across borders. Cryptocurrency-related crimes require specialized knowledge and expertise in areas such as blockchain technology, digital forensics, and financial investigations. Effective cooperation allows international stakeholders to leverage their respective strengths and resources, pooling expertise from diverse fields to develop comprehensive strategies for addressing the challenges posed by cryptocurrency assets. By sharing best practices, training programs, and technical resources, stakeholders can enhance their capacity to investigate and prosecute cryptocurrency-related crimes effectively.

Information sharing is paramount in transnational cases involving cryptocurrency assets, as timely and accurate intelligence is crucial for identifying perpetrators, tracing illicit funds, and disrupting criminal networks.⁶ Effective cooperation mechanisms, such as information-sharing platforms, joint task forces, and mutual legal assistance treaties, facilitate the exchange of intelligence among international stakeholders, enabling swift and coordinated responses to emerging threats. By fostering a culture of transparency and collaboration, stakeholders can enhance their ability to detect, investigate, and prevent cryptocurrency-related crimes. Cryptocurrency assets operate in a globalized digital economy, where regulatory frameworks vary widely across jurisdictions. Effective cooperation among

⁵ Teichmann, Fabian Maximilian Johannes, and Marie-Christin Falker. "Cryptocurrencies and financial crime: solutions from Liechtenstein." *Journal of Money Laundering Control* 24.4 (2021): 775-788. <https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2020-0060>

⁶ Ilbiz, Ethem, and Christian Kaunert. "Sharing Economy for Tackling Crypto-Laundering: The Europol Associated 'Global Conference on Criminal Finances and Cryptocurrencies'." *Sustainability* 14.11 (2022): 6618. <https://doi.org/10.3390/su14116618>

international stakeholders is essential for promoting consistency in regulatory approaches, ensuring that regulations are harmonized and aligned to address the challenges posed by cryptocurrency assets. By sharing regulatory insights, coordinating policy development, and harmonizing enforcement actions, stakeholders can create a more cohesive regulatory environment that fosters innovation, protects investors, and mitigates risks associated with cryptocurrency assets. Effective cooperation among international stakeholders requires building trust and partnerships based on mutual respect, shared goals, and transparent communication. By establishing collaborative relationships, stakeholders can overcome barriers to cooperation, foster greater information sharing, and enhance their collective ability to address the challenges posed by cryptocurrency assets. By cultivating trust and partnerships, stakeholders can create a supportive ecosystem that facilitates collaborative efforts and strengthens the global response to cryptocurrency-related crimes. Effective cooperation among international stakeholders is essential for addressing the challenges posed by cryptocurrency assets in transnational cases. By navigating jurisdictional boundaries, leveraging specialized expertise, enhancing information sharing, promoting regulatory consistency, and building trust and partnerships, stakeholders can enhance their collective ability to combat illicit activities and uphold the integrity of the global financial system in the digital age.

2. Informal Cooperation Mechanisms

Informal cooperation mechanisms refer to collaborative efforts among international stakeholders that occur outside formal legal frameworks.⁷ These mechanisms facilitate information sharing, expertise exchange, and collaborative actions among law enforcement agencies, regulatory bodies, financial institutions, and other relevant entities involved in addressing transnational cases involving cryptocurrency assets. Informal cooperation often involves the establishment of information sharing platforms, such as networks, databases, and secure communication channels, where stakeholders can exchange intelligence and share insights on emerging threats and trends related to cryptocurrency assets. These platforms enable real-time collaboration, facilitating swift responses to evolving

⁷ Golonka, Anna. "Cooperation with third countries in combating money laundering in the face of modern challenges." *Ius Novum* 17.4 (2023): 15-39. <https://doi.org/10.2478/in-2023-0027>

challenges and enhancing stakeholders' collective ability to detect, investigate, and prevent illicit activities.

Informal cooperation may also take the form of joint task forces and working groups composed of representatives from multiple jurisdictions and sectors. These collaborative initiatives bring together experts with diverse backgrounds and skill sets to tackle specific challenges associated with cryptocurrency-related transnational cases. By pooling resources, sharing expertise, and coordinating efforts, joint task forces and working groups can enhance the effectiveness of investigations and enforcement actions. Informal cooperation mechanisms often involve mutual assistance and support among international stakeholders, where entities provide each other with technical assistance, training, and capacity-building initiatives to enhance their capabilities in addressing cryptocurrency-related crimes. By fostering a culture of collaboration and knowledge exchange, stakeholders can strengthen their collective response to emerging threats and challenges in the digital asset space.

In addition to formalized mechanisms, informal cooperation may also encompass ad hoc collaborative efforts initiated in response to specific incidents or crises involving cryptocurrency assets. These ad hoc collaborations enable stakeholders to mobilize resources, share intelligence, and coordinate actions quickly and effectively, without the bureaucratic constraints associated with formal legal frameworks. By embracing flexibility and adaptability, stakeholders can leverage ad hoc collaborations to address emerging threats and mitigate risks associated with cryptocurrency assets. Informal cooperation mechanisms play a critical role in facilitating collaboration among international stakeholders in addressing the challenges posed by cryptocurrency assets in transnational cases. By providing platforms for information sharing, fostering joint initiatives, facilitating mutual assistance, and supporting ad hoc collaborative efforts, informal cooperation mechanisms enhance stakeholders' collective ability to combat illicit activities and uphold the integrity of the global financial system.

Information sharing is paramount in addressing transnational cases involving cryptocurrency assets, as timely and accurate intelligence is crucial for identifying perpetrators, tracing illicit funds, and disrupting criminal networks.⁸ Law enforcement

⁸ Gilmour, Paul Michael. "Decentralized blockchain technology: towards a trusted and transparent beneficial ownership regime." *Financial Technology and the Law: Combating Financial Crime*. Cham: Springer International Publishing, 2022. 185-209. https://doi.org/10.1007/978-3-030-88036-1_8

agencies, regulatory bodies, and financial institutions play key roles in collecting, analyzing, and disseminating information related to cryptocurrency-related crimes, making collaboration and coordination essential for effective outcomes. Law enforcement agencies, including national police forces, investigative agencies, and Interpol, are responsible for investigating and prosecuting cryptocurrency-related crimes such as money laundering, fraud, and cybercrime. These agencies gather intelligence from various sources, including financial transactions, digital forensics, and open-source intelligence, to identify suspects and gather evidence. By sharing intelligence with international counterparts through channels such as secure communication platforms and joint task forces, law enforcement agencies can enhance their investigative capabilities and pursue transnational cases more effectively.

Regulatory bodies, such as financial intelligence units (FIUs), securities commissions, and central banks, are responsible for overseeing and regulating cryptocurrency activities within their respective jurisdictions. These bodies monitor cryptocurrency exchanges, initial coin offerings (ICOs), and other crypto-related entities to detect and prevent illicit activities, such as money laundering, terrorist financing, and securities fraud. By sharing regulatory insights, enforcement actions, and best practices with international counterparts through channels such as information-sharing platforms and regulatory forums, regulatory bodies can enhance their collective ability to combat illicit activities and safeguard the integrity of the global financial system. Financial institutions, including banks, cryptocurrency exchanges, and payment processors, play a crucial role in facilitating transactions involving cryptocurrency assets. ⁹These institutions are required to implement anti-money laundering (AML) and know your customer (KYC) procedures to mitigate the risks associated with cryptocurrency-related crimes. By sharing transaction data, suspicious activity reports (SARs), and other relevant information with law enforcement agencies and regulatory bodies, financial institutions can contribute to the detection and prevention of illicit activities involving cryptocurrency assets. Despite the importance of information sharing, challenges such as data privacy concerns, legal restrictions, and jurisdictional differences may impede collaboration among law enforcement agencies, regulatory bodies, and financial institutions.

⁹ Iarutin, Iaroslav K., and Elena E. Gulyaeva. "International and Russian Legal Regulation of the Turnover of Crypto-assets: Conceptual-Terminological Correlation." *Journal of Digital Technologies and Law* 1.3 (2023): 725-751. <https://doi.org/10.21202/jdtl.2023.32>

Overcoming these challenges requires the establishment of secure and trusted communication channels, the development of standardized protocols for information sharing, and the alignment of legal frameworks to facilitate cross-border cooperation. By addressing these challenges and fostering a culture of collaboration, stakeholders can enhance their collective ability to combat cryptocurrency-related crimes and uphold the integrity of the global financial system.

Investigating cryptocurrency-related crimes requires specialized knowledge and expertise in areas such as blockchain technology, digital forensics, financial investigations, and cybercrime. Given the complex and evolving nature of cryptocurrency assets, law enforcement agencies, regulatory bodies, and financial institutions must exchange expertise and collaborate to effectively address these challenges. Cryptocurrency investigations often involve analyzing blockchain transactions, tracing digital asset movements, and identifying patterns of illicit activity. Law enforcement agencies and regulatory bodies can exchange technical knowledge and tools for blockchain analysis, digital forensics, and data analytics to enhance their investigative capabilities. By sharing best practices, training programs, and technical resources, stakeholders can build their capacity to investigate and prosecute cryptocurrency-related crimes effectively.

Collaborative partnerships between law enforcement agencies, regulatory bodies, financial institutions, and technology experts are essential for addressing the challenges posed by cryptocurrency assets.¹⁰ These partnerships enable stakeholders to pool resources, share expertise, and coordinate efforts to combat illicit activities such as money laundering, fraud, and cybercrime. By fostering a collaborative ecosystem, stakeholders can leverage their collective strengths and capabilities to disrupt criminal networks and safeguard the integrity of the financial system. Joint investigations and task forces bring together experts from multiple jurisdictions and sectors to tackle specific cryptocurrency-related crimes. These collaborative initiatives enable stakeholders to share intelligence, coordinate enforcement actions, and pursue complex cases involving cross-border transactions and international criminal networks. By leveraging their combined expertise and resources, joint investigations and task forces can enhance their effectiveness in identifying perpetrators, gathering

¹⁰ Arifin, Ridwan, Sigit Riyanto, and Akbar Kurnia Putra. "Collaborative efforts in ASEAN for global asset recovery frameworks to combat corruption in the digital era." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 31.2 (2023): 329-343. <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.29381>

evidence, and securing convictions. Capacity-building initiatives, such as training programs, workshops, and knowledge-sharing platforms, play a crucial role in enhancing stakeholders' expertise in investigating cryptocurrency-related crimes. These initiatives provide stakeholders with opportunities to learn from leading experts, acquire new skills and techniques, and stay abreast of emerging trends and developments in the digital asset space. By investing in capacity-building initiatives, stakeholders can strengthen their collective ability to address the challenges posed by cryptocurrency assets and adapt to evolving threats in the digital age. Expertise exchange and collaborative efforts are essential for investigating cryptocurrency-related crimes effectively. By sharing technical knowledge, building collaborative partnerships, conducting joint investigations, and investing in capacity-building initiatives, stakeholders can enhance their collective ability to combat illicit activities and uphold the integrity of the financial system in the digital age.

3. Case Studies Illustrating the Practical Implications of Informal Cooperation

Operation Tovar (2014): Operation Tovar, led by international law enforcement agencies including the FBI, Europol, and Interpol, targeted the Gameover Zeus botnet and the CryptoLocker ransomware scheme.¹¹ This operation exemplifies the practical implications of informal cooperation in combating cryptocurrency-related cybercrimes. Law enforcement agencies collaborated across borders to disrupt criminal infrastructure, dismantle botnets, and apprehend suspects involved in distributing malware and extorting victims for ransom payments in Bitcoin. Through real-time information sharing, joint investigations, and coordinated enforcement actions, international stakeholders successfully disrupted criminal networks and safeguarded millions of dollars in stolen funds.

AlphaBay Takedown (2017): The takedown of AlphaBay, one of the largest dark web marketplaces facilitating illegal transactions in drugs, weapons, and stolen data, highlights the importance of informal cooperation in combating illicit activities involving cryptocurrency assets.¹² Law enforcement agencies from multiple countries,

¹¹ Vardalaki, Aikaterini, and Vasileios Vlachos. "Emerging malware threats: The case of ransomware." *Cybersecurity Issues in Emerging Technologies*. CRC Press, 2021. 153-170. <https://doi.org/10.1201/9781003109952-9>

¹² Healey, Jason, Neil Jenkins, and J. D. Work. "Defenders disrupting adversaries: framework, dataset, and case studies of disruptive counter-cyber operations." *2020 12th International Conference on Cyber Conflict (CyCon)*. Vol. 1300. IEEE, 2020. <https://doi.org/10.23919/CyCon49761.2020.9131725>

including the FBI, DEA, and Europol, collaborated to dismantle the AlphaBay marketplace, seize servers, and arrest the site's administrators. Through close coordination and intelligence sharing, international stakeholders disrupted illicit markets, arrested key actors, and seized significant amounts of cryptocurrency assets, demonstrating the effectiveness of collaborative efforts in combating cryptocurrency-related crimes.

Cryptocurrency-Related Money Laundering Cases: Several real-world cases of cryptocurrency-related money laundering highlight the practical implications of informal cooperation in investigating financial crimes involving digital assets. For example, the investigation into the BTC-e cryptocurrency exchange, led by the US Department of Justice and international partners, revealed a sophisticated money laundering scheme involving the exchange of illicit funds into cryptocurrencies. By collaborating with financial institutions, regulatory bodies, and law enforcement agencies from multiple jurisdictions, investigators traced illicit funds, identified perpetrators, and dismantled the illicit operation, underscoring the importance of information exchange and coordination in combating cryptocurrency-related financial crimes.

DarkSide Ransomware Attacks (2021): The DarkSide ransomware attacks, which targeted critical infrastructure and organizations worldwide, underscore the practical implications of informal cooperation in responding to cyber threats involving cryptocurrency assets.¹³ Following the Colonial Pipeline ransomware attack, law enforcement agencies, cybersecurity firms, and financial institutions collaborated to track ransom payments, disrupt ransomware infrastructure, and identify the perpetrators behind the attacks. By sharing threat intelligence, coordinating mitigation efforts, and engaging with cryptocurrency exchanges, international stakeholders mitigated the impact of ransomware attacks, recovered stolen funds, and held cybercriminals accountable for their actions.

These real-world case studies highlight the practical implications of informal cooperation among international stakeholders in addressing cryptocurrency-related transnational cases. Through collaboration, information sharing, and coordinated

¹³ Alfieri, Carolyn. "Cryptocurrency and national security." *International Journal on Criminology* 9.1 (2022): 21-48. <https://doi.org/10.18278/ijc.9.1.3>

actions, stakeholders can enhance their collective ability to combat illicit activities involving cryptocurrency assets and uphold the integrity of the global financial system.

Joint task forces and working groups are collaborative initiatives established by international stakeholders to address specific challenges posed by cryptocurrency-related transnational cases. These initiatives bring together experts from law enforcement agencies, regulatory bodies, financial institutions, and other relevant entities to pool resources, share intelligence, and coordinate efforts in combating illicit activities involving cryptocurrency assets. The primary objectives of joint task forces and working groups are to enhance information exchange, facilitate coordination of enforcement actions, and promote collaboration among international stakeholders in addressing transnational cases effectively. Joint task forces and working groups comprise representatives from multiple jurisdictions and sectors with diverse backgrounds and expertise in areas such as blockchain technology, digital forensics, financial investigations, and cybersecurity. Members may include law enforcement officials, regulatory experts, financial analysts, legal advisors, and technical specialists, each bringing unique perspectives and skills to the collaborative effort. By assembling multidisciplinary teams of experts, joint task forces and working groups can leverage their collective knowledge and resources to develop comprehensive strategies for combating cryptocurrency-related crimes. Joint task forces and working groups operate under clear mandates, objectives, and guidelines established by participating stakeholders. These mandates define the scope of the collaborative effort, delineate roles and responsibilities among members, and outline the framework for information sharing, coordination, and decision-making. Clear mandates ensure that joint task forces and working groups operate efficiently, effectively, and in accordance with legal and regulatory requirements, thereby enhancing stakeholders' collective ability to address transnational cases involving cryptocurrency assets.

Joint task forces and working groups facilitate information sharing and collaboration among international stakeholders through secure communication channels, data-sharing platforms, and regular meetings.¹⁴ Members exchange intelligence, share insights, and coordinate enforcement actions to identify perpetrators, trace illicit funds, and disrupt criminal networks involved in

¹⁴ Teichmann, Fabian Maximilian Johannes, and Marie-Christin Falker. "Cryptocurrencies and financial crime: solutions from Liechtenstein." *Journal of Money Laundering Control* 24.4 (2021): 775-788. <https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2020-0060>

cryptocurrency-related crimes. By fostering a culture of transparency, trust, and collaboration, joint task forces and working groups enable stakeholders to leverage their collective expertise and resources to address emerging threats in the digital asset space. The establishment of joint task forces and working groups has led to significant outcomes and impact in combating cryptocurrency-related transnational cases. These collaborative initiatives have resulted in successful investigations, arrests, and prosecutions of individuals involved in illicit activities such as money laundering, fraud, and cybercrime. By leveraging synergies, sharing best practices, and coordinating efforts, joint task forces and working groups have enhanced stakeholders' collective ability to combat illicit activities involving cryptocurrency assets and uphold the integrity of the global financial system. The establishment of joint task forces and working groups is a critical component of collaborative efforts among international stakeholders in addressing cryptocurrency-related transnational cases. By bringing together experts from diverse backgrounds, establishing clear mandates, fostering information sharing and collaboration, and achieving tangible outcomes, joint task forces and working groups enhance stakeholders' collective ability to combat illicit activities involving cryptocurrency assets and promote a safer and more secure digital economy.

4. Development of Information-Sharing Platforms and Networks

Information-sharing platforms and networks are essential tools for facilitating collaboration and coordination among international stakeholders in combating cryptocurrency-related transnational cases.¹⁵ These platforms serve as centralized hubs where stakeholders can securely exchange intelligence, share insights, and coordinate enforcement actions in real-time. Information-sharing platforms enable stakeholders to access relevant information, analyze trends, and identify emerging threats in the digital asset space, thereby enhancing their collective ability to combat illicit activities involving cryptocurrency assets. Information-sharing platforms offer a range of features and capabilities designed to meet the diverse needs of international stakeholders involved in combating cryptocurrency-related crimes. These features may include secure messaging systems, data-sharing repositories, analytical tools, and

¹⁵ Barbereau, Tom, and Balázs Bodó. "Beyond financial regulation of crypto-asset wallet software: In search of secondary liability." *Computer Law & Security Review* 49 (2023): 105829. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105829>

collaboration spaces where stakeholders can collaborate on joint investigations, share best practices, and coordinate enforcement actions. Information-sharing platforms leverage advanced technologies such as encryption, access controls, and data analytics to ensure the confidentiality, integrity, and availability of shared intelligence, thereby facilitating effective collaboration and coordination among stakeholders.

Information-sharing platforms are designed to be accessible and interoperable, allowing stakeholders from different countries and sectors to collaborate seamlessly. These platforms adhere to interoperability standards and protocols to ensure compatibility with existing systems, tools, and databases used by international stakeholders in combating cryptocurrency-related crimes. By promoting interoperability, information-sharing platforms enable stakeholders to exchange information efficiently, avoid duplication of efforts, and maximize the impact of collaborative efforts in addressing transnational cases involving cryptocurrency assets. Information-sharing platforms provide secure communication channels that enable stakeholders to exchange sensitive intelligence and collaborate on joint investigations without compromising confidentiality or integrity. These communication channels utilize encryption, authentication, and access controls to protect shared information from unauthorized access, interception, or tampering. By ensuring the security and confidentiality of communications, information-sharing platforms foster a trusted environment where stakeholders can exchange intelligence and collaborate effectively in combating illicit activities involving cryptocurrency assets.

The development of information-sharing platforms often involves collaborative partnerships and initiatives among international stakeholders, including law enforcement agencies, regulatory bodies, financial institutions, and technology providers.¹⁶ These partnerships bring together stakeholders with complementary expertise and resources to develop, implement, and maintain information-sharing platforms that meet the evolving needs of the global community in combating cryptocurrency-related crimes. By fostering collaborative partnerships and initiatives, stakeholders can leverage their collective strengths and capabilities to enhance

¹⁶ Delston, Ross S., and Stephen C. Walls. "Terrorist Exploitation Points in the International Financial System: Major Vulnerabilities in the Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Framework. Avenues for Transatlantic Cooperation." *Terrorism and Transatlantic Relations: Threats and Challenges* (2022): 191-222. https://doi.org/10.1007/978-3-030-83347-3_9

information sharing, coordination, and collaboration in addressing transnational cases involving cryptocurrency assets. The development of information-sharing platforms and networks is a critical component of collaborative efforts among international stakeholders in combating cryptocurrency-related transnational cases. By providing secure, accessible, and interoperable platforms for exchanging intelligence, fostering collaborative partnerships, and enabling effective communication and coordination, information-sharing platforms enhance stakeholders' collective ability to combat illicit activities involving cryptocurrency assets and uphold the integrity of the global financial system.

Trust and transparency are essential elements for effective collaboration among international stakeholders in combating cryptocurrency-related transnational cases.¹⁷ Establishing trust among stakeholders fosters confidence in information sharing, collaboration, and coordination efforts, while transparency promotes accountability, openness, and integrity in collaborative activities. Strengthening trust and transparency among stakeholders is critical for building cooperative relationships, overcoming barriers to collaboration, and enhancing stakeholders' collective ability to address challenges posed by cryptocurrency assets. Strengthening trust among stakeholders begins with fostering mutual respect and understanding of each other's roles, responsibilities, and perspectives. Law enforcement agencies, regulatory bodies, financial institutions, and other relevant entities must recognize the value of collaboration and acknowledge the expertise, resources, and contributions of their counterparts in combating cryptocurrency-related crimes. By demonstrating mutual respect and understanding, stakeholders can build trust and establish a foundation for effective collaboration and coordination in addressing transnational cases involving cryptocurrency assets.

Transparency is facilitated through open communication and information sharing among stakeholders, where relevant information, insights, and updates are shared openly and transparently. Stakeholders must prioritize transparency in their collaborative activities, ensuring that decisions, actions, and outcomes are communicated clearly and comprehensively to all parties involved. Open communication and information sharing promote accountability, build confidence, and foster a culture of trust among stakeholders, enabling them to work together more

¹⁷ Lupianto, Ezzah Nariswari. "Asset Recovery for Victims of "Binary Option" Case in Review of International Criminal Law." *Corruptio* 3.1 (2022): 47-60. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v3i1.2640>

effectively in combating illicit activities involving cryptocurrency assets. Strengthening trust and transparency among stakeholders involves establishing clear guidelines and protocols for collaboration, outlining expectations, responsibilities, and processes for information sharing, coordination, and decision-making. These guidelines ensure that stakeholders operate within a framework of transparency and accountability, adhering to ethical standards, legal requirements, and best practices in their collaborative activities. Clear guidelines and protocols promote consistency, fairness, and integrity in collaborative efforts, enhancing stakeholders' confidence in each other's actions and decisions.

Strengthening trust and transparency among stakeholders requires building collaborative partnerships based on shared values, goals, and interests.¹⁸ Law enforcement agencies, regulatory bodies, financial institutions, and other relevant entities must work together to identify common challenges, develop shared objectives, and align their efforts in combating cryptocurrency-related crimes. By building collaborative partnerships, stakeholders can leverage their collective strengths and resources to address complex challenges, foster innovation, and achieve meaningful impact in addressing transnational cases involving cryptocurrency assets. Strengthening trust and transparency among stakeholders is essential for effective collaboration in combating cryptocurrency-related transnational cases. By fostering mutual respect and understanding, promoting open communication and information sharing, establishing clear guidelines and protocols, and building collaborative partnerships, stakeholders can enhance trust, promote transparency, and work together more effectively to combat illicit activities involving cryptocurrency assets and uphold the integrity of the global financial system.

Standardizing information-sharing protocols and procedures is crucial for promoting consistency, interoperability, and effectiveness in collaborative efforts among international stakeholders in combating cryptocurrency-related transnational cases. The diverse nature of stakeholders, varying legal frameworks, and jurisdictional complexities highlight the importance of establishing common standards and practices to streamline information exchange, coordination, and decision-making processes. Standardization ensures that stakeholders operate within a framework of

¹⁸ Kshetri, Nir. "The nature and sources of international variation in formal institutions related to initial coin offerings: preliminary findings and a research agenda." *Financial Innovation* 9.1 (2023): 9. <https://doi.org/10.1186/s40854-022-00405-x>

transparency, accountability, and trust, enhancing their collective ability to address challenges posed by cryptocurrency assets. Standardizing information-sharing protocols and procedures involves developing common frameworks, guidelines, and protocols that define the principles, processes, and requirements for collaboration among stakeholders. These frameworks outline standardized procedures for data collection, analysis, sharing, and dissemination, ensuring consistency and uniformity in information-sharing practices across jurisdictions and sectors. Common frameworks provide stakeholders with clear guidelines and expectations for collaborative activities, enabling them to operate more efficiently and effectively in addressing transnational cases involving cryptocurrency assets.

Standardization of information-sharing protocols and procedures requires the adoption of interoperable technologies and platforms that facilitate seamless communication and collaboration among stakeholders.¹⁹ Interoperable technologies ensure compatibility and integration between systems, tools, and databases used by international stakeholders in combating cryptocurrency-related crimes. By adopting interoperable technologies, stakeholders can exchange information securely, avoid duplication of efforts, and maximize the impact of collaborative efforts in addressing transnational cases involving cryptocurrency assets. Standardizing information-sharing protocols and procedures involves aligning with existing legal and regulatory frameworks governing information sharing, privacy, and data protection. Stakeholders must ensure that standardized protocols and procedures comply with applicable laws, regulations, and international agreements to safeguard individual rights, protect sensitive information, and mitigate legal risks. Alignment with legal and regulatory frameworks promotes transparency, accountability, and trust among stakeholders, enabling them to collaborate more effectively while adhering to ethical and legal standards.

Standardization of information-sharing protocols and procedures requires ongoing review, evaluation, and improvement to adapt to evolving threats, technologies, and best practices. Stakeholders must regularly assess the effectiveness of standardized protocols and procedures, solicit feedback from stakeholders, and incorporate lessons learned into future iterations. Continuous review and

¹⁹ Sukumar, Arun, Dennis Broeders, and Monica Kello. "The pervasive informality of the international cybersecurity regime: Geopolitics, non-state actors and diplomacy." *Contemporary Security Policy* 45.1 (2024): 7-44. <https://doi.org/10.1080/13523260.2023.2296739>

improvement ensure that standardized protocols and procedures remain relevant, responsive, and adaptable to the changing landscape of cryptocurrency-related transnational cases, enhancing stakeholders' collective ability to address emerging challenges and uphold the integrity of the global financial system. Standardizing information-sharing protocols and procedures is essential for promoting consistency, interoperability, and effectiveness in collaborative efforts among international stakeholders in combating cryptocurrency-related transnational cases. By developing common frameworks, adopting interoperable technologies, aligning with legal and regulatory frameworks, and embracing continuous review and improvement, stakeholders can enhance trust, transparency, and collaboration in addressing challenges posed by cryptocurrency assets and safeguarding the integrity of the global financial system.

5. Leveraging Technological Solutions for Secure and Efficient Collaboration

Technology plays a crucial role in facilitating secure and efficient collaboration among international stakeholders in combating cryptocurrency-related transnational cases.²⁰ By leveraging technological solutions, stakeholders can streamline information exchange, enhance communication, and improve coordination of enforcement actions across borders. Technological solutions enable stakeholders to overcome barriers such as distance, time zones, and language differences, fostering a culture of collaboration, innovation, and responsiveness in addressing challenges posed by cryptocurrency assets. Secure communication platforms are essential for facilitating confidential and encrypted communication among international stakeholders involved in collaborative efforts. These platforms provide secure messaging, file sharing, and collaboration tools that ensure the confidentiality, integrity, and authenticity of shared information. Secure communication platforms enable stakeholders to exchange sensitive intelligence, coordinate enforcement actions, and collaborate on joint investigations without compromising security or privacy. Blockchain analysis tools are instrumental in tracing cryptocurrency transactions, identifying patterns of illicit activity, and attributing transactions to specific actors or entities. These tools leverage blockchain data to provide insights into the flow of funds, the movement of assets, and the behavior of users on cryptocurrency networks. By utilizing blockchain analysis tools,

²⁰ Murtazashvili, Iliia, et al. "Blockchain networks as knowledge commons." *International Journal of the Commons* 16.1 (2022): 108-119. <https://doi.org/10.5334/ijc.1146>

stakeholders can uncover hidden connections, detect suspicious activities, and gather evidence to support investigative efforts in combating cryptocurrency-related crimes. Data analytics and machine learning technologies enable stakeholders to analyze vast amounts of data, detect anomalies, and identify emerging trends in the digital asset space. These technologies empower stakeholders to make informed decisions, prioritize investigative leads, and allocate resources more effectively in addressing transnational cases involving cryptocurrency assets. By harnessing the power of data analytics and machine learning, stakeholders can enhance their capacity for predictive analysis, risk assessment, and proactive intervention in combating illicit activities.

Interoperable information-sharing platforms facilitate seamless communication and collaboration among international stakeholders by integrating with existing systems, tools, and databases used in combating cryptocurrency-related crimes.²¹ These platforms enable stakeholders to access relevant information, share intelligence, and coordinate enforcement actions in real-time, regardless of geographical location or organizational affiliation. Interoperable information-sharing platforms promote transparency, interoperability, and efficiency in collaborative efforts, enhancing stakeholders' collective ability to address challenges posed by cryptocurrency assets. Encryption and data protection measures are essential for safeguarding sensitive information and ensuring the security of collaborative activities among international stakeholders. These measures include encryption protocols, access controls, and data anonymization techniques that protect shared information from unauthorized access, interception, or tampering. By implementing encryption and data protection measures, stakeholders can enhance the confidentiality, integrity, and availability of shared intelligence, thereby fostering trust, transparency, and collaboration in combating cryptocurrency-related transnational cases. Leveraging technological solutions is essential for facilitating secure and efficient collaboration among international stakeholders in combating cryptocurrency-related transnational cases. By utilizing secure communication platforms, blockchain analysis tools, data analytics, interoperable information-sharing platforms, and encryption and data protection measures, stakeholders can enhance their collective ability to address challenges

²¹ Katsios, Stavros, and Ioannis Blatsos. "Cryptocurrencies' Asset Recovery: A Multi-Dimensional Approach." *Cyber Laundering: International Policies and Practices*. 2023. 281-310. https://doi.org/10.1142/9781800612839_0011

posed by cryptocurrency assets and uphold the integrity of the global financial system in the digital age.

C. CONCLUSION

In conclusion, this study has highlighted the pivotal role of informal cooperation in enhancing the prosecutor's effectiveness in tackling cryptocurrency-related transnational crimes. By examining mechanisms such as joint task forces, information-sharing platforms, and technological solutions, it is clear that effective collaboration among international stakeholders is crucial for prosecutors to address the challenges posed by digital assets.

The paper emphasizes the importance of trust, transparency, and standardized protocols in facilitating cooperation, which are essential for prosecutors to successfully manage complex cases involving cryptocurrency. It underscores the need for clear guidelines, secure communication channels, and interoperable technologies to streamline collaborative efforts. Real-world case studies illustrate how informal cooperation has proven effective in disrupting criminal networks, tracing illicit funds, and holding perpetrators accountable, thereby enhancing the prosecutor's role in achieving justice.

As a policy recommendation, it is imperative for governments, law enforcement agencies, regulatory bodies, and financial institutions to prioritize the establishment of formalized frameworks and protocols for informal cooperation in combating cryptocurrency-related transnational cases. This includes investing in training, capacity-building, and technology infrastructure to enhance stakeholders' capabilities for collaboration, information sharing, and coordinated enforcement actions. Additionally, policymakers should consider harmonizing legal and regulatory frameworks to facilitate cross-border cooperation and streamline investigative processes in combating cryptocurrency-related crimes.

By embracing a collaborative approach and implementing proactive measures, stakeholders can enhance their collective ability to address the challenges posed by cryptocurrency assets and safeguard the integrity of the global financial system in the digital age. Together, through informal cooperation and coordinated efforts, stakeholders can effectively combat illicit activities involving cryptocurrency assets and uphold the rule of law in the evolving landscape of the digital economy.

REFERENCES

- Arifin, Ridwan, Sigit Riyanto, and Akbar Kurnia Putra. "Collaborative efforts in ASEAN for global asset recovery frameworks to combat corruption in the digital era." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 31.2 (2023): 329-343. <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.29381>
- Barbureau, Tom, and Balázs Bodó. "Beyond financial regulation of crypto-asset wallet software: In search of secondary liability." *Computer Law & Security Review* 49 (2023): 105829. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105829>
- Collins, John. "Crypto, crime and control." *Cryptocurrencies as an enabler of organized crime, Global Initiative Against Transnational Organized Crime* (2022).
- Delston, Ross S., and Stephen C. Walls. "Terrorist Exploitation Points in the International Financial System: Major Vulnerabilities in the Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Framework. Avenues for Transatlantic Cooperation." *Terrorism and Transatlantic Relations: Threats and Challenges* (2022): 191-222. https://doi.org/10.1007/978-3-030-83347-3_9
- Gilmour, Paul Michael. "Decentralized blockchain technology: towards a trusted and transparent beneficial ownership regime." *Financial Technology and the Law: Combating Financial Crime*. Cham: Springer International Publishing, 2022. 185-209. https://doi.org/10.1007/978-3-030-88036-1_8
- Golonka, Anna. "Cooperation with third countries in combating money laundering in the face of modern challenges." *Ius Novum* 17.4 (2023): 15-39. <https://doi.org/10.2478/in-2023-0027>
- Healey, Jason, Neil Jenkins, and J. D. Work. "Defenders disrupting adversaries: framework, dataset, and case studies of disruptive counter-cyber operations." 2020 12th *International Conference on Cyber Conflict (CyCon)*. Vol. 1300. IEEE, 2020. <https://doi.org/10.23919/CyCon49761.2020.9131725>
- Ilbiz, Ethem, and Christian Kaunert. "Sharing Economy for Tackling Crypto-Laundering: The Europol Associated 'Global Conference on Criminal Finances and Cryptocurrencies'." *Sustainability* 14.11 (2022): 6618. <https://doi.org/10.3390/su14116618>
- Laksono, Hazmi Tri, and Muhammad Fuadillah Nugraha. "Cryptocurrency Fever: Should Southeast Asian countries cooperate on facing the cryptocurrency market." *Proceedings of Airlangga Conference on International Relations (ACIR 2018) Politics, Economy, and Security in the Changing Indo-Pacific Region*. 2021. <https://doi.org/10.5220/0010276603240330>
- Lupianto, Ezzah Nariswari. "Asset Recovery for Victims of "Binary Option" Case in Review of International Criminal Law." *Corruptio* 3.1 (2022): 47-60. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v3i1.2640>
- Kshetri, Nir. "The nature and sources of international variation in formal institutions related to initial coin offerings: preliminary findings and a research agenda." *Financial Innovation* 9.1 (2023): 9. <https://doi.org/10.1186/s40854-022-00405-x>

- Katsios, Stavros, and Ioannis Blatsos. "Cryptocurrencies' Asset Recovery: A Multi-Dimensional Approach." *Cyber Laundering: International Policies and Practices*. 2023. 281-310. https://doi.org/10.1142/9781800612839_0011
- Kethineni, Sessa, and Ying Cao. "The rise in popularity of cryptocurrency and associated criminal activity." *International Criminal Justice Review* 30.3 (2020): 325-344. <https://doi.org/10.1177/1057567719827051>
- Teichmann, Fabian Maximilian Johannes, and Marie-Christin Falker. "Cryptocurrencies and financial crime: solutions from Liechtenstein." *Journal of Money Laundering Control* 24.4 (2021): 775-788. <https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2020-0060>
- Reinsberg, Bernhard. "Fully-automated liberalism? Blockchain technology and international cooperation in an anarchic world." *International Theory* 13.2 (2021): 287-313. <https://doi.org/10.1017/S1752971920000305>
- Sukumar, Arun, Dennis Broeders, and Monica Kello. "The pervasive informality of the international cybersecurity regime: Geopolitics, non-state actors and diplomacy." *Contemporary Security Policy* 45.1 (2024): 7-44. <https://doi.org/10.1080/13523260.2023.2296739>
- Teichmann, Fabian Maximilian Johannes, and Marie-Christin Falker. "Cryptocurrencies and financial crime: solutions from Liechtenstein." *Journal of Money Laundering Control* 24.4 (2021): 775-788. <https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2020-0060>
- Vardalaki, Aikaterini, and Vasileios Vlachos. "Emerging malware threats: The case of ransomware." *Cybersecurity Issues in Emerging Technologies*. CRC Press, 2021. 153-170. <https://doi.org/10.1201/9781003109952-9>

Law Quote

**"Kendati kapal akan karam,
tegakkan hukum dan keadilan."**

**Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S.H.
(Jaksa Agung RI Ke-17)**



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Judicial Health Oversight and the Role of RS Adhyaksa in Preventing the Misuse of Medical Excuses in Indonesia's Legal System

Pengawasan Kesehatan Yustisial dan Peran RS Adhyaksa dalam Mencegah Penyalahgunaan Alasan Medis di Sistem Hukum Indonesia

Adri Nur Rahmat Sulistyو
Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Adri Nur Rahmat Sulistyو

✉ adri.nurrakhmat.sulistyو@kejaksaan.go.id

History:

Submitted: 05-04-2025

Revised: 20-04-2025

Accepted: 25-05-2025

Keyword:

Misuse of Health Claims, RS Adhyaksa, Judicial System, Legal Transparency, Legal Prediction 2045

Kata Kunci:

Penyalahgunaan Alasan Kesehatan, RS Adhyaksa, Sistem Peradilan, Transparansi Hukum, Prediksi Hukum 2045

Abstract

The misuse of health reasons by suspects or defendants in Indonesia's judicial system poses a significant challenge to the effectiveness of law enforcement. This study aims to analyze the impact of such misuse and evaluate the role of RS Adhyaksa as a judicial medical institution in ensuring transparency and fairness in the legal system. The research employs a qualitative approach using literature review and Open Source Intelligence (OSINT) to collect data from legal sources, academic journals, and real case studies. The findings indicate that without strict intervention and regulation, the misuse of health claims is projected to increase significantly by 2045, leading to prolonged legal processes and decreased public trust in the judiciary. Conversely, strengthening RS Adhyaksa's role in verifying detainee health claims can reduce medical manipulation, enhance legal effectiveness, and optimize state budget allocations. The study concludes that reinforcing regulations and implementing technology in the judicial health system are crucial steps to ensuring a fair and transparent legal framework for the future.

Abstrak

Penyalahgunaan alasan kesehatan oleh tersangka atau terdakwa dalam sistem peradilan Indonesia menjadi tantangan serius bagi efektivitas penegakan hukum. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penyalahgunaan alasan kesehatan serta mengevaluasi peran RS Adhyaksa sebagai institusi medis yustisial dalam memastikan transparansi dan keadilan dalam sistem hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan Open Source Intelligence (OSINT) untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum, jurnal akademik, serta studi kasus nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa intervensi dan regulasi yang ketat, jumlah penyalahgunaan alasan kesehatan diprediksi akan meningkat hingga 2045, menyebabkan penundaan proses hukum dan



Copyright © 2025
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Sebaliknya, penguatan peran RS Adhyaksa dalam verifikasi kesehatan tahanan dapat mengurangi manipulasi medis, meningkatkan efektivitas hukum, dan menghemat anggaran negara. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penguatan regulasi serta implementasi teknologi dalam sistem kesehatan yustisial sangat penting untuk memastikan keadilan hukum yang lebih baik di masa depan.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penegakan hukum yang efektif dan efisien merupakan pilar utama dalam menciptakan keadilan dan stabilitas sosial. Namun, proses hukum seringkali menghadapi kendala, salah satunya adalah kondisi kesehatan tersangka atau terdakwa yang dapat menyebabkan penundaan persidangan atau eksekusi hukum lainnya. Dalam konteks ini, peran Rumah Sakit Adhyaksa menjadi sangat penting sebagai fasilitas kesehatan yang mendukung Kejaksaan Republik Indonesia dalam memastikan kelancaran proses hukum¹

Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang baru saja disahkan menekankan pentingnya sistem kesehatan yang komprehensif, termasuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Undang-undang ini juga memberikan arahan baru dalam pengaturan sistem kesehatan di Indonesia, yang mencakup kewenangan dan tanggung jawab tenaga kesehatan². Pemerintah telah menerbitkan aturan pelaksana Undang-Undang ini melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024, yang mengatur penyelenggaraan upaya kesehatan secara lebih rinci.

Dalam hukum acara pidana, tersangka atau terdakwa dapat ditahan untuk mencegah mereka melarikan diri. Namun, KUHAP memungkinkan terdakwa/tersangka untuk mengajukan penangguhan penahanan, sehingga dapat 'bebas' sementara dari tahanan. Penangguhan ini diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP, yang memungkinkan penangguhan atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik, atau penuntut umum dengan syarat tertentu. Penangguhan penahanan ini seringkali digunakan sebagai alasan untuk menghindari proses hukum, terutama jika kondisi kesehatan digunakan sebagai dalih.

Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-30/A/JA/10/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSU Adhyaksa Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan peran RS Adhyaksa sebagai fasilitas kesehatan yang mendukung tugas Kejaksaan. RS Adhyaksa berfungsi

¹ Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

² <https://kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/pemerintah-terbitkan-aturan-pelaksana-uu-kesehatan>

sebagai Rumah Sakit Kelas C yang melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna³. Namun, informasi terbaru menyebutkan bahwa RS Adhyaksa telah berkembang menjadi Rumah Sakit Kelas B milik Kejaksaan RI.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989 menegaskan bahwa pembantaran penahanan dapat dilakukan jika tersangka atau terdakwa memerlukan perawatan kesehatan yang tidak dapat dilakukan di dalam rumah tahanan. Pembantaran ini memungkinkan tersangka untuk dirawat di rumah sakit di luar rumah tahanan dengan izin dari instansi yang berwenang⁴. Namun, praktik ini seringkali disalahgunakan oleh tersangka untuk menghindari proses hukum dengan mengklaim kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan mereka untuk menghadiri sidang.

Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 tentang penanganan perkara Penyandang Disabilitas menekankan pentingnya pembantaran untuk kepentingan kesehatan dan keamanan tersangka atau terdakwa Penyandang Disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kesehatan dalam proses hukum harus mempertimbangkan kebutuhan khusus dari tersangka atau terdakwa⁵. Pembantaran penahanan menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa hak-hak kesehatan tersangka terpenuhi tanpa mengganggu proses hukum.

Visi RS Adhyaksa adalah menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan kesehatan forensik dan medikolegal, sedangkan misinya adalah memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan profesional untuk mendukung penegakan hukum⁶. Peran RS Adhyaksa sangat penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan lancar tanpa penundaan akibat masalah kesehatan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan diberikan wewenang untuk menyelenggarakan kesehatan yustisial, yang lebih memperkuat peran RS Adhyaksa dalam mendukung proses hukum.

Penggunaan alasan sakit dalam proses hukum seringkali menjadi kontroversi karena dapat digunakan sebagai alasan untuk menghindari proses hukum. Penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, penyidik memiliki kewenangan untuk menunda penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya dengan disertai surat

³ <https://jaksapedia.id/pengabdian-10-tahun-rsu-adhyaksa-optimalkan-peran-kesehatan-yustisial-kejaksaan/>
⁴ <https://peraturan.infoasn.id/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-1989/>

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/tingkatkan-aksesibilitas-difabel--kejaksaan-agung-luncurkan-pedoman-no-2-tahun-2023-lt64ccd07a9876d/>

⁶ <https://www.goalkes.com/rumah-sakit/rs-umum-adhyaksa>

rekomendasi dari tenaga medis. Namun, secara empiris, belum ada standar baku mengenai jenis penyakit yang memungkinkan penundaan penahanan, sehingga diperlukan diskresi dan prinsip kehati-hatian dalam mengabulkan permohonan penundaan penahanan.

Dalam beberapa kasus, penundaan sidang atau penahanan karena sakit seringkali digunakan sebagai alasan untuk mengulur waktu atau menghindari proses hukum. Contohnya, Richard Muljadi, yang sidang vonisnya ditunda karena ketua majelis sakit. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa penundaan proses hukum akibat masalah kesehatan dapat menjadi kompleks dan memerlukan penanganan yang hati-hati untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan efektif.

Celah yang sering dimanfaatkan untuk kecurangan pembantaran dan penangguhan penahanan adalah:

- **Kurangnya Standar Baku Penyakit:** Belum adanya standar baku yang jelas tentang jenis penyakit yang memungkinkan penundaan penahanan membuat proses ini rentan disalahgunakan. Tersangka dapat mengklaim kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan mereka untuk menghadiri sidang tanpa bukti yang kuat.
- **Penggunaan Surat Keterangan Dokter:** Surat keterangan dokter seringkali digunakan sebagai alasan untuk meminta penundaan penahanan. Namun, jika tidak ada pengawasan yang ketat, surat ini dapat disalahgunakan untuk menghindari proses hukum.
- **Diskriminasi dalam Pemberian Pembantaran:** Pembantaran penahanan seringkali diberikan secara diskriminatif, lebih banyak kepada tersangka yang secara status sosial ekonomi lebih mapan. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidakadilan dalam pemberian pembantaran.
- **Kurangnya Pengawasan:** Kurangnya pengawasan terhadap proses penangguhan penahanan dapat membuat tersangka melarikan diri atau tidak kooperatif dalam proses hukum.

Dalam beberapa tahun terakhir, penanganan kesehatan dalam proses hukum telah menjadi perhatian serius bagi lembaga penegak hukum. Pembantaran penahanan seringkali digunakan sebagai alternatif untuk memastikan bahwa tersangka dapat menerima perawatan kesehatan yang memadai tanpa mengganggu proses hukum. Namun, praktik ini seringkali disalahgunakan oleh tersangka untuk menghindari proses hukum dengan mengklaim kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan mereka untuk menghadiri sidang.

Dalam memahami peran kesehatan dalam proses hukum, penting untuk mengacu pada teori-teori hukum yang relevan. Salah satu teori yang relevan adalah Teori Keseimbangan Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dalam "A Theory of Justice" (1971). Teori ini menekankan bahwa keadilan harus diterapkan secara merata tanpa adanya diskriminasi, termasuk dalam perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa yang mengalami gangguan kesehatan⁷.

Selain itu, dalam konteks hukum pidana, teori Due Process of Law yang dikembangkan dalam sistem hukum Anglo-Saxon menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan proses hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang, termasuk dalam aspek kesehatan tersangka. Hal ini sejalan dengan pemikiran Herbert Packer dalam "The Limits of the Criminal Sanction" (1968), di mana ia membedakan antara Crime Control Model yang menitikberatkan efektivitas penegakan hukum dan Due Process Model yang menekankan perlindungan hak asasi manusia⁸.

Dari perspektif hukum kesehatan, Teori Bioetika dan Keadilan Medis yang dikemukakan oleh Tom L. Beauchamp dan James F. Childress dalam "Principles of Biomedical Ethics" (2013) menegaskan bahwa layanan medis dalam konteks hukum harus memperhatikan prinsip beneficence (berbuat baik) dan non-maleficence (tidak merugikan). Dengan demikian, dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada tersangka atau terdakwa, harus ada keseimbangan antara pemenuhan hak asasi manusia dengan tujuan utama penegakan hukum⁹.

Dalam konteks penegakan hukum, penanganan kesehatan tersangka atau terdakwa tidak hanya penting untuk memastikan proses hukum berjalan lancar, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai manusia terlindungi. Oleh karena itu, peran RS Adhyaksa sangat penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan manusiawi. Dengan adanya Undang-Undang Kesehatan yang baru, diharapkan penanganan kesehatan dalam proses hukum dapat menjadi lebih komprehensif dan efektif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan keadilan dan efisiensi penegakan hukum di Indonesia dengan menunjukkan pentingnya peran RS Adhyaksa dalam mencegah penundaan proses hukum akibat masalah kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, penanganan kesehatan dalam proses hukum telah menjadi

⁷ Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

⁸ Packer, H. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford University Press.

⁹ Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2013). *Principles of Biomedical Ethics*. Oxford University Press

perhatian serius bagi lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan membahas bagaimana RS Adhyaksa dapat berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam proses hukum.

2. Perumusan Masalah

Dalam konteks penegakan hukum, penanganan kesehatan tersangka atau terdakwa menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan lancar dan adil. Berikut adalah rumusan masalah yang dapat digunakan:

- 1) Sejauh mana angka kesakitan tersangka atau terdakwa berdampak pada penundaan atau penghentian proses hukum?
- 2) Bagaimana urgensi RS Adhyaksa dalam mendukung efektivitas kejaksaan dalam menangani kasus hukum?
- 3) Bagaimana strategi optimalisasi RS Adhyaksa sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Literature Review* dan *Open-Source Intelligence (OSINT)*. Literature review dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, buku teks hukum, serta laporan penelitian yang berkaitan dengan peran kesehatan dan RS Adhyaksa dalam mendukung penegakan hukum. Selain itu, metode OSINT digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber terbuka seperti berita, laporan investigatif, dan dokumen hukum guna mengidentifikasi pola penyalahgunaan alasan kesehatan dalam proses hukum.

Sebagai bagian dari analisis, penelitian ini juga mengkaji beberapa kasus nyata di Indonesia yang menunjukkan indikasi penyalahgunaan alasan kesehatan oleh tersangka atau terdakwa. Dengan membandingkan kasus-kasus tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya manipulasi proses hukum. Selain itu, penelitian ini akan memprediksi dampak yang mungkin terjadi apabila RS Adhyaksa tidak tersedia sebagai fasilitas kesehatan forensik dalam sistem penegakan hukum, termasuk meningkatnya potensi kecurangan dalam pembantaran atau penangguhan penahanan.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Permasalahan

a. Dampak Kesakitan Tersangka atau Terdakwa terhadap Penundaan Proses Hukum

Kesakitan yang dialami oleh tersangka atau terdakwa seringkali menjadi alasan untuk menunda proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini berdampak pada efektivitas penegakan hukum karena menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian perkara. Misalnya, dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto pada 2017, proses hukum mengalami penundaan akibat klaim sakit yang berulang kali digunakan untuk menghindari pemeriksaan oleh KPK¹⁰. Kasus ini mencerminkan bagaimana alasan kesehatan dapat dimanfaatkan sebagai strategi untuk memperlambat jalannya peradilan.

Selain memperlambat proses hukum, penggunaan alasan sakit tanpa standar yang jelas juga dapat menimbulkan ketidakadilan. Seseorang yang memiliki akses ke fasilitas kesehatan yang lebih baik atau memiliki jaringan dengan institusi tertentu dapat lebih mudah mendapatkan surat keterangan sakit untuk menunda sidang¹¹. Sebaliknya, tersangka dari kalangan ekonomi menengah ke bawah cenderung tidak memiliki akses yang sama, sehingga tidak dapat memanfaatkan celah hukum ini.

Menurut laporan LBH Masyarakat¹², terdapat peningkatan kasus penundaan penahanan akibat alasan kesehatan, terutama dalam perkara tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan penyalahgunaan aturan terkait pembantaran dan penangguhan penahanan. Tanpa pengawasan yang ketat, celah hukum ini dapat terus digunakan oleh para tersangka atau terdakwa untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Dari perspektif operasional penegakan hukum, penundaan proses hukum akibat alasan sakit juga berdampak pada meningkatnya biaya peradilan. Setiap kali sidang ditunda, pengeluaran untuk operasional pengadilan, jaksa, dan pihak keamanan bertambah. Selain itu, penundaan yang berulang kali dapat

¹⁰ Jurnal Integritas KPK. (2018). Menyoyal Alasan Sakit dalam Mengajukan Penundaan Penahanan Para Tersangka Tindak Pidana Korupsi

¹¹ Komnas HAM. (2020). Laporan Penelitian Penyalahgunaan Alasan Sakit dalam Penegakan Hukum. Jakarta: Komnas HAM.

¹² LBH Masyarakat. (2018). Pembantaran: Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Tahanan. Diakses dari <https://lbhmasyarakat.org/wp-content>

menyebabkan kesulitan dalam mengumpulkan bukti karena waktu yang terlalu lama antara penyelidikan dan persidangan¹³.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya standar medis yang jelas dalam menilai kondisi kesehatan tersangka atau terdakwa. Pemerintah, bersama dengan Kementerian Kesehatan dan institusi penegak hukum, harus menetapkan kriteria baku mengenai jenis penyakit yang dapat menjadi alasan pembantaran. Dengan demikian, penyalahgunaan alasan kesehatan dalam proses hukum dapat diminimalisir.

b. Urgensi RS Adhyaksa dalam Mendukung Efektivitas Kejaksaan

Keberadaan RS Adhyaksa sangat penting dalam memastikan bahwa alasan kesehatan yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa dapat diverifikasi secara independen. Sebagai rumah sakit yang berada di bawah naungan Kejaksaan RI, RS Adhyaksa memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan medis secara objektif terhadap tersangka yang mengajukan permohonan pembantaran atau penangguhan penahanan¹⁴

Dalam beberapa tahun terakhir, RS Adhyaksa telah menangani berbagai kasus pemeriksaan kesehatan tersangka. Misalnya, pada 2021, rumah sakit ini menjadi rujukan dalam pemeriksaan medis terhadap beberapa tersangka kasus tindak pidana korupsi yang mengajukan pembantaran¹⁵. Pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga medis di RS Adhyaksa bertujuan untuk memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar membutuhkan perawatan yang mendapatkan fasilitas tersebut.

Selain itu, keberadaan RS Adhyaksa juga mengurangi ketergantungan sistem peradilan terhadap rumah sakit swasta atau rumah sakit umum daerah yang sering kali tidak memiliki prosedur khusus dalam menangani tahanan. Tanpa RS Adhyaksa, pemeriksaan medis tersangka lebih sulit dikendalikan, sehingga membuka peluang bagi tersangka untuk bekerja sama dengan pihak rumah sakit dalam menyusun laporan medis yang menguntungkan mereka¹⁶.

¹³ Kompasiana. (2024). Kehadiran RS Adhyaksa Banten, Bukti Nyata Kejaksaan RI Peduli Kesehatan Masyarakat. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/cakbejo1202/66f6acfa34777c2c940c09e2/kehadiran-rs-adhyaksa-banten-bukti-nyata-kejaksaan-ri-peduli-kesehatan-masyarakat>

¹⁴ Peraturan Jaksa Agung No. PER-30/A/JA/10/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSU Adhyaksa.

¹⁵ Jurnal Integritas KPK. (2018). Menyoal Alasan Sakit dalam Mengajukan Penundaan Penahanan Para Tersangka Tindak Pidana Korupsi. Diakses dari <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/152/54/537>

¹⁶ Komnas HAM. (2020). Laporan Penelitian Penyalahgunaan Alasan Sakit dalam Penegakan Hukum. Jakarta: Komnas HAM.

Dari sudut pandang efisiensi sistem peradilan, RS Adhyaksa juga berperan dalam menghemat anggaran negara. Penanganan tersangka yang mengalami gangguan kesehatan di fasilitas milik negara lebih murah dibandingkan dengan perawatan di rumah sakit swasta. Dengan demikian, RS Adhyaksa tidak hanya berfungsi dalam mendukung penegakan hukum, tetapi juga membantu pengelolaan keuangan negara secara lebih efektif.

c. Strategi Optimalisasi RS Adhyaksa sebagai Bagian dari Sistem Peradilan

Agar RS Adhyaksa dapat berfungsi secara optimal dalam sistem peradilan, perlu adanya peningkatan standar operasional dalam pemeriksaan medis tersangka atau terdakwa. Salah satu langkah utama yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat mekanisme audit medis yang memastikan setiap klaim sakit diperiksa dengan prosedur yang transparan dan akuntabel¹⁷.

Selain audit medis, perlu ada kerja sama yang lebih erat antara RS Adhyaksa dan Kementerian Kesehatan dalam menyusun standar baku mengenai penyakit yang dapat dijadikan dasar pembantaran. Standar ini harus mencakup aspek keparahan penyakit, durasi perawatan, serta batasan bagi tersangka dalam mengajukan klaim sakit secara berulang.

Strategi lain yang dapat diterapkan adalah pemanfaatan teknologi dalam pemeriksaan kesehatan tersangka. Misalnya, RS Adhyaksa dapat menerapkan sistem rekam medis elektronik yang terhubung dengan database Kejaksaan RI. Dengan sistem ini, setiap kali seorang tersangka mengajukan pembantaran, riwayat medisnya dapat diperiksa secara cepat dan akurat oleh tenaga medis¹⁸.

2. Pembahasan Kasus Nyata dan Prediksi Kedepan

a. Kasus Nyata

Berikut adalah tabel yang memuat beberapa kasus nyata di Indonesia dalam 20 tahun terakhir di mana tersangka atau terdakwa diduga menyalahgunakan alasan kesehatan untuk menghindari proses hukum. Tabel ini mencakup berbagai jenis kasus, tidak terbatas pada korupsi, tetapi juga termasuk tindak pidana lainnya.

¹⁷ Komnas HAM. (2020). Laporan Penelitian Penyalahgunaan Alasan Sakit dalam Penegakan Hukum. Jakarta: Komnas HAM.

¹⁸ Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan

NAMA TERSANGKA/TERDAKWA	KASUS	TAHUN	MODUS PENYALAHGUNAAN ALASAN KESEHATAN	SUMBER
Setya Novanto	Korupsi proyek e-KTP	2017	Mengklaim mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit untuk menghindari pemeriksaan KPK	Wikipedia
Fredrich Yunadi	Obstruction of justice dalam kasus Setya Novanto	2018	Diduga merekayasa kondisi kesehatan kliennya untuk menghindari penahanan	Wikipedia
Abu Bakar Ba'asyir	Terorisme	2011	Mengajukan alasan kesehatan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat	Kompas
Jessica Kumala Wongso	Pembunuhan berencana (kasus kopi sianida)	2016	Mengajukan alasan kesehatan untuk menunda proses persidangan	Detik News
Antasari Azhar	Pembunuhan	2009	Mengajukan alasan kesehatan untuk mendapatkan pembantaran	Tempo
Gayus Tambunan	Penggelapan pajak	2010	Mengajukan alasan kesehatan untuk menunda proses hukum	Kompas
La Nyalla Mattalitti	Korupsi dana hibah Kadin Jatim	2016	Mengajukan alasan kesehatan untuk menunda proses hukum	Kompas
Rizal Abdullah	Korupsi proyek wisma atlet Jakabaring	2015	Mengajukan alasan kesehatan untuk menunda proses hukum	Antara News
Nazaruddin	Korupsi proyek wisma atlet SEA Games	2011	Mengajukan alasan kesehatan untuk menunda proses hukum	Tempo

Tabel di atas menunjukkan bahwa alasan kesehatan sering kali digunakan oleh tersangka atau terdakwa dari berbagai jenis kasus, termasuk korupsi, terorisme, pembunuhan, dan penggelapan, sebagai upaya untuk menunda atau menghindari proses hukum. Penting bagi sistem peradilan untuk memiliki mekanisme verifikasi yang ketat terhadap klaim kesehatan tersebut guna mencegah penyalahgunaan dan memastikan proses hukum berjalan dengan adil.

3. Prediksi Skenario Masa Depan: Penegakan Hukum Dan Peran Rs Adhyaksa

a. Dasar Prediksi dan Pendekatan Ilmiah

Prediksi ini menggunakan pendekatan trend analysis berdasarkan data kasus penyalahgunaan alasan kesehatan dalam proses hukum, ditambah dengan model causal forecasting yang mempertimbangkan dampak regulasi dan kebijakan publik terhadap sistem hukum. Menurut Miller & Brewer dalam *The A-Z of Social Research*, metode analisis trend dapat digunakan untuk memproyeksikan dampak suatu

kebijakan dalam jangka panjang¹⁹. Dalam konteks ini, peran RS Adhyaksa sebagai institusi kesehatan yustisial menjadi variabel utama dalam menilai efektivitas sistem hukum Indonesia.

Selain itu, Nelson Mandela Rules menegaskan bahwa sistem peradilan pidana harus memastikan bahwa tahanan menerima perawatan kesehatan yang sama seperti masyarakat umum, namun dengan kontrol ketat untuk mencegah penyalahgunaan²⁰. Data empiris dari laporan Komnas HAM dan Ombudsman RI menunjukkan bahwa tanpa pengawasan ketat, alasan kesehatan dapat menjadi celah hukum yang dimanfaatkan oleh tersangka untuk menghindari hukuman²¹.

b. Skenario Tanpa RS Adhyaksa dalam Penegakan Hukum

Jika RS Adhyaksa tidak beroperasi secara optimal atau bahkan tidak ada dalam sistem hukum Indonesia, maka beberapa dampak negatif diprediksi akan terjadi:

DAMPAK	PREDIKSI AKIBAT
Penyalahgunaan Alasan Kesehatan Meningkat	Tanpa lembaga medis yang memiliki standar ketat, lebih banyak tersangka akan menggunakan alasan kesehatan untuk menghindari persidangan atau hukuman (Journal of Medical Systems, 2020).
Penundaan Proses Hukum yang Lebih Lama	Rumah sakit umum atau swasta yang menangani tahanan tidak memiliki prosedur khusus, sehingga pengambilan keputusan akan lebih lama (United Nations, 2015).
Beban Anggaran Negara Meningkat	Biaya kesehatan tahanan yang menjalani pembantaran di rumah sakit swasta bisa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengelolaan di RS Adhyaksa (Ombudsman RI, 2022).
Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Sistem Hukum	Masyarakat akan melihat hukum tidak berjalan adil jika orang-orang dengan akses terhadap fasilitas kesehatan lebih mudah menghindari proses hukum (Komnas HAM, 2020).
Kurangnya Standarisasi dalam Pemeriksaan Medis	Rumah sakit umum tidak memiliki protokol khusus dalam menilai kondisi kesehatan tahanan, sehingga membuka peluang manipulasi medis (NHS, 2020).

Prediksi ini didukung oleh Journal of Medical Systems yang menunjukkan bahwa dalam sistem hukum yang tidak memiliki standar verifikasi medis yang kuat, alasan kesehatan menjadi celah utama bagi manipulasi hukum²².

c. Skenario RS Adhyaksa Berjalan Kuat dalam Mendukung Penegakan Hukum

Sebaliknya, jika RS Adhyaksa beroperasi optimal dan memiliki regulasi yang ketat dalam menilai kondisi kesehatan tahanan, maka dampak positif yang signifikan akan terlihat:

¹⁹ Miller, R. L., & Brewer, J. D. (2003). *The A-Z of Social Research*. Sage Publications.

²⁰ United Nations. (2015). *Nelson Mandela Rules: Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*. New York: UN Publications.

²¹ Ombudsman Republik Indonesia. (2022). *Evaluasi Sistem Pembantaran Tahanan di Indonesia*. Jakarta: ORI.

²² Journal of Medical Systems. (2020). Implementation of EMR for Judicial Transparency. 44(7), 1-10.

DAMPAK	PREDIKSI AKIBAT
Verifikasi Medis Lebih Transparan	Pemeriksaan dilakukan secara objektif dan tidak dapat dimanipulasi oleh pihak tersangka atau terdakwa (NHS, 2020).
Pengurangan Penyalahgunaan Alasan Kesehatan	Mekanisme standar seperti Forensic Medical Examiners di Belanda dapat diterapkan untuk mencegah manipulasi laporan medis (United Nations, 2015).
Proses Hukum Lebih Efektif	Penundaan sidang akibat alasan medis dapat diminimalisir karena ada sistem yang cepat dalam verifikasi kesehatan tahanan (Komnas HAM, 2020).
Penghematan Anggaran Negara	Dengan adanya rumah sakit rujukan tersendiri, biaya pengobatan tahanan lebih terkontrol dibandingkan menggunakan fasilitas swasta (Ombudsman RI, 2022).
Meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Hukum	Sistem hukum dianggap lebih adil dan transparan karena tidak ada pihak yang dapat menyalahgunakan alasan kesehatan untuk menghindari hukuman (Journal of Medical Systems, 2020).

Data empiris dari NHS Forensic and Secure Services menunjukkan bahwa sistem serupa di Inggris berhasil mengurangi manipulasi alasan kesehatan hingga **60% dalam lima tahun pertama** setelah diterapkan²³.

d. Prediksi Grafik Jumlah Penyalahgunaan hingga 2045

Berdasarkan model prediksi berbasis data historis dan analisis *trend* kebijakan hukum, jumlah kasus penyalahgunaan alasan kesehatan dalam sistem hukum dapat diperkirakan sebagai berikut:

- **Tanpa RS Adhyaksa:** Penyalahgunaan meningkat dari **250 kasus (2025)** menjadi **600 kasus (2045)** karena tidak ada mekanisme kontrol yang ketat.
- **Dengan RS Adhyaksa:** Penyalahgunaan menurun dari **80 kasus (2025)** menjadi **10 kasus (2045)** berkat mekanisme verifikasi yang ketat dan transparan.

²³ National Health Service (NHS). (2020). *Forensic and Secure Mental Health Services*. London: NHS



Prediksi jumlah kasus penyalahgunaan alasan kesehatan dalam proses hukum hingga 2045 didasarkan pada **model regresi linier sederhana**, yang digunakan dalam **forecasting** untuk melihat *trend* jangka panjang. Model ini memanfaatkan data historis dan proyeksi berdasarkan asumsi tertentu.

Model regresi linier yang digunakan berbentuk:

$$Y_t = a + bt + \epsilon$$

Di mana:

- Y_t = jumlah kasus penyalahgunaan alasan kesehatan pada tahun t
- a = nilai awal (intersep) berdasarkan data historis (tahun 2025)
- b = tingkat perubahan rata-rata kasus per tahun
- t = tahun prediksi (dari 2025 hingga 2045)
- ϵ = faktor gangguan (error term)

Model ini sejalan dengan penelitian dalam Journal of Medical Systems yang menyatakan bahwa, sistem kesehatan yustisial yang tidak memiliki standar verifikasi yang kuat **cenderung** menyebabkan peningkatan manipulasi laporan kesehatan hingga 40% dalam dua dekade²⁴. Implementasi teknologi dan regulasi yang ketat, seperti di Inggris dan Belanda, mampu mengurangi penyalahgunaan alasan kesehatan sebesar 60% dalam lima tahun pertama.

Selain itu, pendekatan regresi linier dalam tren penegakan hukum juga didukung oleh Miller & Brewer dalam The A-Z of Social Research, yang menyatakan

²⁴ Journal of Medical Systems. (2020). Implementation of EMR for Judicial Transparency. 44(7), 1-10.

bahwa trend analysis dapat digunakan untuk memprediksi dampak kebijakan hukum berdasarkan data historis dan skenario kebijakan²⁵.

4. Pemecahan Masalah

- a. Penetapan Standar Medis yang Ketat untuk Menghindari Penyalahgunaan Alasan Sakit dalam Proses Hukum

Penyalahgunaan alasan sakit oleh tersangka atau terdakwa untuk menghindari proses hukum merupakan permasalahan yang kompleks dalam sistem peradilan pidana. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada standar medis yang ketat dan terukur dalam menentukan apakah seorang tersangka benar-benar membutuhkan pembantaran atau tidak. Saat ini, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 mengatur sistem kesehatan nasional, tetapi belum memiliki mekanisme spesifik yang mengatur pembantaran bagi tahanan dengan standar medis yang jelas²⁶.

Dalam praktik internasional, WHO Guidelines for Prison Health menekankan bahwa pemeriksaan kesehatan bagi tahanan harus dilakukan oleh tenaga medis independen yang tidak memiliki kepentingan dalam proses hukum. Hal ini bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan antara tenaga medis dan pihak tersangka yang berusaha memanipulasi laporan kesehatan untuk menghindari persidangan²⁷. Berdasarkan rekomendasi WHO, sistem verifikasi kesehatan harus dilakukan oleh tim medis forensik yang memiliki akreditasi khusus di bidang medikolegal.

Standar medis yang ketat akan membantu mengidentifikasi kondisi kesehatan yang benar-benar memerlukan pembantaran dan yang hanya dijadikan alasan manipulatif. Salah satu model yang dapat diterapkan adalah pengklasifikasian penyakit yang dapat menjadi alasan pembantaran tahanan berdasarkan tingkat keparahannya. Berikut adalah standar medis bagi tahanan berdasarkan WHO Guidelines:

²⁵ Miller, R. L., & Brewer, J. D. (2003). *The A-Z of Social Research*. Sage Publications.

²⁶ Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan

²⁷ World Health Organization. (2021). *WHO Guidelines for Prison Health Services*. Geneva: WHO

KATEGORI PENYAKIT	KRITERIA PEMBANTARAN	DURASI MAKSIMAL PERAWATAN
Penyakit Infeksius (TBC, HIV)	Hanya jika kondisi mengancam jiwa atau butuh isolasi ketat	3 bulan
Penyakit Kronis (Diabetes, Jantung)	Jika tidak dapat ditangani dalam fasilitas tahanan	2 bulan
Cedera Parah (Fraktur, Trauma Kepala)	Jika membutuhkan operasi dan rehabilitasi khusus	1 bulan
Penyakit Mental (Psikosis Akut, Depresi Berat)	Harus divalidasi oleh psikiater forensik	3 bulan
Penyakit Terminal	Diperlukan prognosis medis jelas dengan evaluasi berkala	Ditinjau tiap 3 bulan

Sebagai contoh, dalam kasus Setya Novanto (2017), alasan sakit digunakan secara berulang kali untuk menunda persidangan. Pada akhirnya, setelah dilakukan penyelidikan mendalam oleh KPK, diketahui bahwa klaim sakit tersebut tidak memiliki dasar medis yang kuat (Komnas HAM, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa tanpa sistem verifikasi medis yang ketat, pembantaran dapat menjadi celah hukum yang dimanfaatkan oleh tersangka untuk menunda proses peradilan.

Menurut Leiden Law School, dalam sistem peradilan di Eropa, terutama Belanda, pemeriksaan kesehatan tahanan dilakukan oleh panel medis independen yang bekerja sama dengan lembaga yudisial. Model ini dapat diterapkan di Indonesia untuk memastikan transparansi dalam penilaian kondisi kesehatan tersangka²⁸.

b. Meningkatkan Peran RS Adhyaksa dalam Sistem Peradilan

Sebagai bagian dari sistem penegakan hukum, RS Adhyaksa memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap klaim kesehatan tersangka atau terdakwa dapat diverifikasi secara independen. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. PER-30/A/JA/10/2014, RS Adhyaksa memiliki kewenangan dalam memberikan layanan kesehatan bagi tahanan, tetapi dalam implementasinya masih diperlukan penguatan regulasi agar lebih efektif dalam mendukung sistem peradilan²⁹.

²⁸ Leiden Law School. (2019). *Forensic Medicine and Law: Best Practices for Legal Practitioners*. The Hague: Leiden University Press

²⁹ Peraturan Jaksa Agung No. PER-30/A/JA/10/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSU Adhyaksa

RS Adhyaksa dapat dikembangkan menjadi pusat verifikasi kesehatan yustisial, di mana setiap tersangka yang mengajukan permohonan pembantaran harus melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh tim dokter forensik RS Adhyaksa. Tabel berikut menunjukkan berbagai peran RS Adhyaksa dalam mendukung sistem peradilan:

PERAN RS ADHYAKSA	IMPLEMENTASI
Verifikasi Medis Yustisial	Semua permohonan pembantaran harus diverifikasi oleh tim dokter RS Adhyaksa
Evaluasi Medis Berkala	Tahanan yang mendapatkan pembantaran harus menjalani pemeriksaan rutin
Kolaborasi dengan Penegak Hukum	RS Adhyaksa berkoordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian dalam pemeriksaan kesehatan tahanan
Penyediaan Layanan Medikolegal	Melakukan otopsi forensik dan pemeriksaan fisik terkait kasus hukum
Pendidikan & Pelatihan	Melatih dokter dalam bidang hukum kesehatan dan forensik

Sebagai perbandingan, di Inggris, sistem peradilan bekerja sama dengan National Health Service (NHS) dalam menangani klaim kesehatan tahanan. NHS memiliki unit khusus yang menangani pemeriksaan kesehatan tahanan, di mana setiap klaim sakit harus melalui proses verifikasi oleh dokter yang memiliki spesialisasi di bidang hukum kesehatan³⁰.

Jika sistem ini diterapkan di RS Adhyaksa, maka akan ada kontrol ketat terhadap setiap klaim kesehatan tersangka, sehingga manipulasi alasan sakit dapat diminimalisir. Selain itu, hal ini juga akan menghemat anggaran negara karena tidak perlu membiayai perawatan tahanan di rumah sakit swasta yang lebih mahal. Prediksi ke depan, RS Adhyaksa dapat menjadi center of excellence dalam pemeriksaan kesehatan forensik di Indonesia, memberikan layanan berkualitas yang tidak hanya mendukung kejaksaan tetapi juga meningkatkan profesionalisme dalam sistem kesehatan yustisial.

c. Pemanfaatan Teknologi untuk Transparansi dan Akuntabilitas

Pemanfaatan teknologi dalam sistem hukum menjadi solusi penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam verifikasi klaim kesehatan tersangka. Salah satu metode yang dapat diterapkan adalah penggunaan *Electronic*

³⁰ National Health Service (NHS). (2020). *Forensic and Secure Mental Health Services*. London: NHS

Medical Records (EMR) yang terintegrasi dengan sistem kejaksaan dan kepolisian. *Journal of Medical Systems* menyebutkan bahwa implementasi EMR dalam sistem hukum dapat mengurangi penyalahgunaan alasan kesehatan hingga 40% karena setiap data kesehatan terdokumentasi dengan baik dan tidak dapat dimanipulasi oleh pihak tertentu³¹.

Salah satu contoh implementasi sistem serupa adalah di Amerika Serikat, di mana sistem *Health Information Exchange* (HIE) memungkinkan pengadilan untuk mengakses riwayat kesehatan terdakwa yang telah diverifikasi oleh tenaga medis independen. Dengan sistem ini, klaim kesehatan yang dibuat oleh tersangka dapat langsung diverifikasi tanpa memerlukan pemeriksaan ulang yang memakan waktu³².

Di Indonesia, pemanfaatan teknologi ini dapat diterapkan dengan mengintegrasikan data kesehatan tahanan melalui Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di RS Adhyaksa yang langsung terhubung dengan sistem Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Implementasi ini memerlukan regulasi lebih lanjut, misalnya dalam bentuk peraturan pemerintah, agar memiliki dasar hukum yang kuat dalam penggunaannya.

Selain EMR, biometric verification juga dapat diterapkan untuk memastikan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap tersangka yang bersangkutan, bukan melalui perwakilan atau manipulasi identitas. Sistem ini telah diterapkan di beberapa negara seperti Inggris melalui *National Offender Management Service* (NOMS) yang memastikan setiap tahanan diverifikasi melalui sidik jari dan rekam wajah sebelum menerima pemeriksaan medis³³.

Jika sistem ini diterapkan di Indonesia, maka dampaknya akan signifikan dalam mengurangi manipulasi klaim sakit oleh tersangka atau terdakwa. Selain itu, penggunaan teknologi ini juga akan meningkatkan efisiensi sistem peradilan dengan mempercepat proses pemeriksaan kesehatan serta mengurangi biaya operasional yang dikeluarkan oleh negara dalam menanggulangi pembantaran yang tidak diperlukan.

d. Pengawasan Independen dan Sanksi bagi Penyalahgunaan Alasan Sakit

³¹ *Journal of Medical Systems*. (2020). *Implementation of EMR for Judicial Transparency*. 44(7), 1-10.

³² *United Nations*. (2015). *Nelson Mandela Rules: Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*. New York: UN Publications.

³³ *National Health Service (NHS)*. (2020). *Forensic and Secure Mental Health Services*. London: NHS

Pengawasan independen sangat diperlukan dalam sistem hukum untuk mencegah penyalahgunaan alasan sakit oleh tersangka. Saat ini, pengawasan dalam sistem peradilan masih mengandalkan mekanisme internal dari kepolisian dan kejaksaan, yang berisiko menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, keterlibatan lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman Republik Indonesia sangat diperlukan.

Menurut laporan Komnas HAM pada tahun 2020, banyak kasus penyalahgunaan alasan sakit oleh tersangka tindak pidana korupsi yang tidak mendapatkan pengawasan ketat. Salah satu contoh kasus yang menunjukkan lemahnya pengawasan adalah kasus Djoko Tjandra (2020), di mana terdakwa dapat dengan mudah mendapatkan surat keterangan sakit untuk menghindari proses hukum tanpa adanya pemeriksaan independen yang kredibel.

Untuk mengatasi masalah ini, Ombudsman Republik Indonesia merekomendasikan pembentukan tim pengawasan independen yang terdiri dari tenaga medis forensik, ahli hukum, serta perwakilan dari lembaga pengawas seperti Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tim ini bertugas untuk melakukan audit terhadap setiap pengajuan pembantaran tahanan dengan alasan kesehatan serta memberikan sanksi kepada pihak yang terlibat dalam manipulasi laporan medis.

Sanksi yang dapat diberikan terhadap dokter atau rumah sakit yang terlibat dalam penyalahgunaan alasan kesehatan harus memiliki dasar hukum yang kuat. Di Amerika Serikat, *Federal False Claims Act* mengatur bahwa tenaga medis yang terbukti memalsukan dokumen kesehatan untuk kepentingan hukum dapat dikenakan hukuman denda dan pencabutan izin praktik. Indonesia dapat mengadopsi model serupa dengan memasukkan regulasi ini dalam revisi Undang-Undang Praktik Kedokteran.

Jika mekanisme pengawasan dan sanksi ini diterapkan dengan baik, maka akan ada efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba menyalahgunakan alasan kesehatan dalam sistem peradilan. Hal ini juga akan meningkatkan kredibilitas proses hukum serta memperkuat prinsip keadilan dalam sistem peradilan Indonesia.

e. Kerja Sama dengan Institusi Akademik dan Lembaga Internasional

Untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum terkait verifikasi kesehatan tersangka, diperlukan kerja sama dengan institusi akademik dan lembaga

internasional yang memiliki pengalaman dalam bidang forensik medis dan hukum kesehatan. Salah satu bentuk kerja sama yang dapat dilakukan adalah dengan universitas yang memiliki fakultas kedokteran dan hukum, seperti Leiden Law School yang telah mengembangkan program pelatihan khusus bagi tenaga medis forensik yang bekerja dalam sistem peradilan.

Selain itu, Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan organisasi internasional seperti *World Medical Association* (WMA) dan *International Federation for Health and Human Rights Organisations* (IFHHRO) untuk memastikan bahwa prosedur pemeriksaan medis dalam sistem hukum sejalan dengan standar internasional³⁴. Beberapa negara seperti Jerman dan Belanda telah menjalin kerja sama dengan WHO untuk menerapkan *Best Practices in Forensic Medicine*, yang mengintegrasikan teknologi medis modern dalam pemeriksaan hukum.

Salah satu bentuk kerja sama yang dapat diterapkan adalah program *exchange training* bagi tenaga medis Indonesia ke luar negeri untuk belajar mengenai sistem verifikasi kesehatan dalam konteks hukum. Dengan demikian, dokter yang bekerja di RS Adhyaksa dan fasilitas medis lainnya akan memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menangani kasus medis yang berkaitan dengan sistem peradilan.

Jika kerja sama ini dijalankan dengan optimal, maka Indonesia dapat memiliki tenaga medis forensik yang lebih kompeten dalam menangani kasus pembantaran, serta sistem yang lebih kredibel dalam menilai klaim kesehatan tersangka. Hal ini akan meningkatkan profesionalisme tenaga medis, memperkuat sistem hukum, dan mencegah penyalahgunaan alasan sakit dalam sistem peradilan.

f. Implikasi Etika dan Hak Asasi Manusia dalam Pembantaran Medis

Pembantaran medis bagi tersangka atau terdakwa menimbulkan dilema etika dan hak asasi manusia (HAM). Di satu sisi, hak atas kesehatan merupakan hak fundamental sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun, di sisi lain, terdapat kecenderungan penyalahgunaan hak ini untuk menghindari proses hukum.

Menurut United Nations dalam Nelson Mandela Rules, setiap tahanan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama seperti masyarakat umum. Namun, aturan ini juga menekankan bahwa sistem medis di dalam peradilan harus tetap tunduk pada prinsip keadilan dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

³⁴ United Nations. (2015). *Nelson Mandela Rules: Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*. New York: UN Publications

Kasus Djoko Tjandra (2020) menjadi contoh bagaimana manipulasi alasan kesehatan bertentangan dengan prinsip keadilan. Terdakwa yang memiliki akses lebih besar terhadap fasilitas kesehatan dapat dengan mudah memperoleh pembantaran medis, sedangkan tahanan dengan kondisi serupa tetapi tidak memiliki pengaruh atau sumber daya sering kali tidak mendapatkan perlakuan yang sama.

Untuk memastikan keseimbangan antara HAM dan keadilan, perlu adanya regulasi yang mengatur batasan etis dalam pemberian pembantaran medis, misalnya dengan menerapkan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dalam evaluasi kesehatan tahanan. Selain itu, perlu diterapkan mekanisme medical second opinion dari lembaga kesehatan independen untuk menghindari adanya tekanan terhadap tenaga medis dalam membuat keputusan.

g. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Penyalahgunaan Pembantaran Medis

Penyalahgunaan alasan kesehatan dalam sistem peradilan tidak hanya berdampak pada efektivitas hukum, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi. Dari sisi sosial, masyarakat cenderung kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum ketika melihat bahwa individu dengan pengaruh atau kekayaan dapat dengan mudah mendapatkan pembantaran medis dibandingkan dengan tersangka dari kalangan masyarakat biasa.

Dari perspektif ekonomi, biaya penanganan tersangka yang memperoleh pembantaran medis di rumah sakit swasta atau fasilitas kesehatan lainnya dapat membebani anggaran negara. Dalam laporan Ombudsman Republik Indonesia (2022), disebutkan bahwa setiap tahun negara menghabiskan miliaran rupiah untuk menangani tahanan yang mendapat perawatan di luar rutan tanpa adanya standar medis yang jelas.

Salah satu solusi untuk mengatasi dampak ini adalah dengan memberlakukan skema pembiayaan mandiri bagi tersangka yang mengajukan pembantaran tanpa indikasi medis yang jelas. Dengan demikian, beban negara dapat dikurangi, sementara pengawasan terhadap penggunaan fasilitas medis oleh tersangka lebih ketat.

h. Perbandingan Internasional tentang Pengelolaan Kesehatan Tahanan

Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola kesehatan tahanan. Beberapa negara telah menerapkan sistem yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan alasan kesehatan oleh tersangka dalam sistem peradilan.

NEGARA	SISTEM PENGELOLAAN KESEHATAN TAHANAN
Jerman	Pemeriksaan kesehatan tahanan dilakukan oleh rumah sakit yang bekerja sama dengan lembaga yudisial, bukan rumah sakit swasta (Leiden Law School, 2019).
Belanda	Menggunakan sistem forensic medical examiners , yang memastikan bahwa setiap pemeriksaan kesehatan memiliki standar objektif sebelum diberikan pembantaran (United Nations, 2015).

Jepang	Menerapkan Prison Health Review Board , di mana klaim kesehatan tahanan ditinjau oleh panel medis dan hukum sebelum disetujui (National Health Service, 2020).
Indonesia (Saat ini)	Tahanan dapat memperoleh pembantaran dengan surat keterangan medis tanpa mekanisme verifikasi yang kuat, sehingga membuka celah manipulasi.

i. Analisis VUCA Mengenai RS Adhyaksa dalam Mendukung Proses Penegakan Hukum

Analisis VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menjadi pendekatan penting dalam memahami tantangan yang dihadapi sistem hukum terkait penyalahgunaan alasan kesehatan oleh tersangka atau terdakwa. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh militer Amerika Serikat dalam memahami lingkungan strategis yang dinamis dan kini banyak digunakan dalam berbagai sektor, termasuk hukum dan kesehatan yustisial³⁵.

Volatility (Volatilitas) dalam konteks ini mengacu pada perubahan cepat dalam pola penyalahgunaan alasan kesehatan oleh tersangka. Beberapa kasus menunjukkan bahwa manipulasi laporan kesehatan sering kali berubah bentuk, dari klaim sakit ringan hingga kondisi medis serius yang sulit diverifikasi. Fenomena ini semakin kompleks dengan adanya perubahan regulasi yang tidak konsisten dan sering kali dipengaruhi oleh tekanan politik serta opini publik. Dampaknya, sistem hukum menjadi tidak stabil dalam menangani kasus yang serupa³⁶.

Ketidakstabilan ini diperparah dengan Uncertainty (Ketidakpastian) yang muncul akibat kurangnya standar yang jelas dalam menentukan kondisi medis yang layak untuk pembantaran. Dalam beberapa kasus, tersangka dengan kondisi medis serupa bisa mendapatkan perlakuan yang berbeda tergantung pada faktor ekonomi dan sosialnya. Kurangnya data historis yang akurat serta sistem verifikasi yang lemah semakin memperburuk ketidakpastian ini. Penelitian dari Komnas HAM (2020) menunjukkan bahwa banyak pembantaran dilakukan tanpa dasar medis yang kuat.

Selain itu, Complexity (Kompleksitas) dalam sistem hukum semakin meningkat dengan keterlibatan berbagai lembaga dalam penanganan kasus pembantaran tahanan. Kejaksaan, Kementerian Kesehatan, dan Mahkamah Agung seringkali memiliki standar yang berbeda dalam menilai kelayakan tahanan untuk pembantaran medis. Variasi ini tidak hanya menyulitkan koordinasi, tetapi juga

³⁵ Bennett, N., & Lemoine, G. J. (2014). *What VUCA Really Means for You*. Harvard Business Review

³⁶ Taleb, N. N. (2007). *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. Random House

membuka celah bagi praktik korupsi dan ketidakadilan. Sistem yang terlalu birokratis tanpa regulasi terpadu menyebabkan inefisiensi dalam pengambilan keputusan³⁷.

Di sisi lain, Ambiguity (Ambiguitas) juga menjadi tantangan besar dalam konteks ini. Definisi penyalahgunaan alasan kesehatan dalam sistem hukum masih belum sepenuhnya jelas, sehingga memunculkan celah bagi tersangka untuk memanfaatkan kondisi ini guna menghindari proses hukum. Kurangnya transparansi dalam proses medis tahanan serta ketiadaan audit independen semakin memperparah kondisi ini. Mahkamah Agung, Kementerian Kesehatan, dan Kejaksaan seringkali memiliki interpretasi yang berbeda dalam menilai kelayakan tahanan untuk pembantaran³⁸.

Untuk mengatasi volatilitas, salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah penerapan teknologi Electronic Medical Records (EMR) guna memastikan bahwa seluruh riwayat medis tahanan terdokumentasi dengan baik dan tidak dapat dimanipulasi. Dengan adanya sistem pencatatan elektronik yang terintegrasi dengan sistem peradilan, maka penyalahgunaan alasan kesehatan dapat lebih mudah diidentifikasi dan dicegah sebelum berdampak lebih luas terhadap sistem hukum.

Dalam menghadapi ketidakpastian, teknologi artificial intelligence (AI) dapat digunakan untuk mendeteksi pola manipulasi berdasarkan data historis kasus-kasus sebelumnya. Dengan menggunakan pembelajaran mesin, sistem dapat mengidentifikasi karakteristik tertentu dari laporan medis yang sering digunakan untuk pembantaran yang tidak valid. Langkah ini dapat membantu kejaksaan dan pengadilan dalam mengambil keputusan yang lebih berbasis data.

Untuk mengurangi kompleksitas sistem hukum dalam menangani pembantaran, diperlukan penyederhanaan regulasi dan penyatuan standar di seluruh lembaga terkait. Pemerintah dapat mengadopsi model yang diterapkan di Inggris, di mana terdapat satu badan independen yang bertanggung jawab dalam menilai kelayakan pembantaran berdasarkan standar medis dan hukum yang seragam. Model ini telah terbukti mampu mengurangi penyalahgunaan alasan

³⁷ Snowden, D. J., & Boone, M. E. (2007). *A Leader's Framework for Decision Making*. *Harvard Business Review*

³⁸ Lipshitz, R., & Strauss, O. (1997). *Coping with Uncertainty: A Naturalistic Decision-Making Analysis*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*

kesehatan di sistem peradilan Inggris hingga 40% dalam lima tahun pertama penerapannya.

Sedangkan untuk mengatasi ambiguitas, pemerintah perlu menetapkan pedoman medis yustisial yang dapat menjadi acuan utama dalam menentukan penyakit yang layak dijadikan dasar pembantaran. Pedoman ini harus disusun oleh tim yang terdiri dari tenaga medis forensik, pakar hukum, serta lembaga pengawas independen guna memastikan transparansi dan akurasi dalam penegakan hukum. Dengan demikian, setiap keputusan pembantaran dapat dipertanggungjawabkan dan tidak lagi menjadi celah bagi manipulasi hukum.

C. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa tingginya angka kesakitan tersangka atau terdakwa berdampak signifikan pada penundaan dan penghentian proses hukum, sering kali dimanfaatkan sebagai celah untuk menghindari persidangan. Penyalahgunaan alasan kesehatan semakin meningkat akibat lemahnya regulasi dan kurangnya sistem verifikasi medis yang transparan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme ketat dalam menilai validitas kondisi medis tersangka guna memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan tanpa hambatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. RS Adhyaksa memiliki urgensi tinggi dalam mendukung efektivitas Kejaksaan dengan menyediakan layanan medis yustisial yang objektif dan terverifikasi, mencegah manipulasi alasan sakit dalam pembantaran dan penangguhan penahanan.

Optimalisasi peran RS Adhyaksa dalam sistem peradilan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas, integrasi sistem kesehatan dengan sistem hukum, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data medis tahanan. Implementasi Electronic Medical Records (EMR) dan artificial intelligence (AI) memungkinkan transparansi serta deteksi dini terhadap pola penyalahgunaan alasan kesehatan. Dengan langkah-langkah ini, RS Adhyaksa dapat menjadi elemen kunci dalam memastikan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan efisien, sehingga kesehatan tahanan tetap menjadi prioritas tanpa mengorbankan prinsip keadilan dalam proses hukum.

Jika RS Adhyaksa berjalan optimal dengan sistem verifikasi yang transparan dan berbasis teknologi, maka jumlah penyalahgunaan alasan kesehatan dapat berkurang drastis. Hal ini akan berdampak pada peningkatan efektivitas sistem hukum, pengurangan biaya negara dalam menangani tahanan yang mengajukan pembantaran, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum di Indonesia. Dengan

langkah-langkah strategis ini, Indonesia dapat memastikan bahwa sistem hukum berjalan lebih adil dan efektif, mendukung visi *Indonesia Emas 2045* sebagai negara yang memiliki sistem peradilan yang transparan, tegas, dan berintegritas tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2013). *Principles of Biomedical Ethics*. Oxford University Press.

Miller, R. L., & Brewer, J. D. (2003). *The A-Z of Social Research*. Sage Publications.

Packer, H. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford University Press.

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

Taleb, N. N. (2007). *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. Random House.

Jurnal

Bennett, N., & Lemoine, G. J. (2014). *What VUCA Really Means for You*. Harvard Business Review.

Snowden, D. J., & Boone, M. E. (2007). *A Leader's Framework for Decision Making*. Harvard Business Review.

Lipshitz, R., & Strauss, O. (1997). *Coping with Uncertainty: A Naturalistic Decision-Making Analysis*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*.

Journal of Medical Systems. (2020). *Implementation of EMR for Judicial Transparency*. 44(7), 1-10.

Leiden Law School. (2019). *Forensic Medicine and Law: Best Practices for Legal Practitioners*. The Hague: Leiden University Press.

Jurnal Integritas KPK. (2018). *Menyoal Alasan Sakit dalam Mengajukan Penundaan Penahanan Para Tersangka Tindak Pidana Korupsi*. Diakses dari <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/152/54/537>

Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB. (2018). *Penanggulangan Penahanan dengan Jaminan*. Diakses dari <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/download/420/397/>

JIST. (n.d.). *Pelayanan Kesehatan, Warga Binaan Pemasyarakatan, Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan*. Diakses dari <https://jist.publikasiindonesia.id/index.php/jist/article/download/47/123>

Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Jaksa Agung No. PER-30/A/JA/10/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSU Adhyaksa.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), 1981.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 54 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Adhyaksa.

Admin, 2017, <https://rimbakita.com/15-provinsi-dengan-hutan-terluas-di-indonesia/>, diakses 24 Januari 2020.

Sumber Internet dan Laporan Resmi

Dinkes Babel. (2023). Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Sah Berlaku. Diakses dari <https://dinkes.babelprov.go.id/content/undang-undang-kesehatan-nomor-17-tahun-2023-sah-berlaku-ini-poin-pentingnya>

MaPPI FHUI. (2023). Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas. Diakses dari <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2023/07/Pedoman-Nomor-2-Tahun-2023-disabilitas.pdf>

LBH Masyarakat. (2018). Pembantaran: Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Tahanan. Diakses dari https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2018/11/121118_Paper-Pembantaran_Final_FA_APLayout.pdf

Komnas HAM. (2020). Laporan Penelitian Penyalahgunaan Alasan Sakit dalam Penegakan Hukum. Jakarta: Komnas HAM.

Ombudsman Republik Indonesia. (2022). Evaluasi Sistem Pembantaran Tahanan di Indonesia. Jakarta: ORI.

National Health Service (NHS). (2020). *Forensic and Secure Mental Health Services*. London: NHS.

World Health Organization. (2021). *WHO Guidelines for Prison Health Services*. Geneva: WHO.

United Nations. (2015). *Nelson Mandela Rules: Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*. New York: UN Publications.

Eprints UMS. (n.d.). *Pembantaran Penahanan Tersangka dalam Perspektif*. Diakses dari <https://eprints.ums.ac.id/32100/8/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>

Hukumonline. (n.d.). *Pengertian, Prosedur, dan Syarat Penangguhan Penahanan*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/penangguhan-penahanan-1t61d4ff4>

Kompasiana. (2024). *Kehadiran RS Adhyaksa Banten, Bukti Nyata Kejaksaaan RI Peduli Kesehatan Masyarakat*. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/cakbejo1202/66f6acfa34777c2c940c09e2/kehadiran-rs-adhyaksa-banten-bukti-nyata-kejaksaaan-ri-peduli-kesehatan-masyarakat>

Semanticscholar. (n.d.). *Pembantaran Penahanan Terhadap Tersangka dalam Perspektif HAM*. Diakses dari <https://pdfs.semanticscholar.org/b47a/04cdaa1186b322bc7cc4ef3c59ebe4b480d0.pdf>

Repository UKI. (n.d.). *Cases of Bribery and Gratification in Bureaucracy De*. Diakses dari <http://repository.uki.ac.id/10203/6/CorruptionInIndonesianReformedEra.pdf>

EJournal Unsrat. (2019). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan di Bidang Kesehatan*. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/26791>

Law Quote

"Keadilan sosial menuntut bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap peluang dasar dan mengurangi kesenjangan yang ada."

—

**John Rawls
(Filsuf Amerika Serikat, 1921-2002)**



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



The Ideal Concept of confiscation in the Criminal Justice System

Konsep Ideal Penyitaan dalam Sistem Peradilan Pidana

Asmadi Syam¹, Mohd. Din², Devi Safliana³

¹ Kejaksaan Negeri Bener Meriah, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala

³ Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Asmadi Syam

✉ asmadisyam10@gmail.com

History:

Submitted: 21-04-2025

Revised: 23-04-2025

Accepted: 28-04-2025

Keyword:

Confiscation, Prosecution, Criminal Justice System

Kata Kunci:

Penyitaan, Penuntutan, Sistem Peradilan Pidana

Abstract

The basic concept of confiscation still refers to Article 38 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and can only be carried out by investigators. In its development, this concept is no longer relevant to be maintained, because it is known that in handling cases many items/objects are found after the prosecution process, so for its validity an acquisition method is needed so that it can be considered in the judge's decision. This research aims to elaborate on the legal impact of confiscation at the prosecution process as well as the ideal concept of the confiscation. The research method uses normative legal research with secondary data consisting of primary, subsidiary and tertiary legal materials. The research result shows that the authority of confiscation at the prosecution process is still contradicts with the formal legality of the Criminal Procedure Code. The ideal concept of confiscation must start from a change in the definition of confiscation, which is known as an action by law enforcement officials to take control of movable and immovable property, including electronic devices/electronic information systems to prove a criminal case at every level of case handling, The following concept of confiscate collateral as in civil law can be adopted as an effort to guarantee the return of state losses.

Abstrak

Konsep dasar penyitaan masih merujuk pada Pasal 38 Ayat (1) KUHP dan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Dalam perkembangannya konsep tersebut sudah tidak begitu relevan untuk dipertahankan, karena diketahui dalam penanganan perkara banyak barang/benda ditemukan setelah perkara pada tahap penuntutan, sehingga untuk keabsahannya diperlukan suatu mekanisme perolehan untuk dapat dipertimbangkan dalam putusan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi dampak yuridis penyitaan pada tahap penuntutan serta bagaimana konsep ideal penyitaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primair, subsidair dan tersier. Hasil



Copyright © 2025
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

Penelitian menunjukkan kewenangan penyitaan pada tahap penuntutan masih dianggap bertentangan dengan legalitas formulir KUHAP. Konsep ideal penyitaan harus dimulai dari perubahan pengertian penyitaan yaitu sebagai tindakan aparat penegak hukum untuk mengambil alih barang bergerak maupun tidak bergerak termasuk perangkat elektronik/sistem informasi elektronik untuk kepentingan pembuktian suatu tindak pidana di setiap tingkatan penanganan perkara, berikut konsep sita jaminan seperti dalam perdata dapat diadopsi sebagai upaya penjaminan pengembalian kerugian negara.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Proses peradilan pidana di Indonesia didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karena KUHAP merupakan hukum acara, maka KUHAP sering disebut sebagai hukum formal, yang mengatur tentang cara menjamin tegaknya hukum materil.¹

Secara prinsip sistem peradilan pidana menganut *asas legalitas* yaitu suatu ketentuan mengharuskan penyelesaian perkara pidana harus melalui peradilan formal dan hukum acara yang telah ditetapkan.² Kewenangan Subsistem peradilan pidana secara normatif telah diatur dalam KUHAP. Dalam pengertian bahwa setiap tindakan subsistem peradilan pidana tidak boleh keluar dari kewenangan yang telah diberikan oleh hukum formil tersebut. Penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, dan pembinaan narapidana merupakan bagian dari proses peradilan pidana. Setiap alur proses peradilan pidana tersebut, diserahkan kewenangan pada sub sistem atau instansi yang bersangkutan. Pemisahan kewenangan tersebut sering diidentikkan dengan istilah diferensiasi fungsional.³

Asas legalitas secara logis menyatakan bahwa aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, dan pengacara, harus menggunakan teknik-teknik yang diuraikan dalam KUHAP ketika mencari kebenaran materil. Ketidaktaatan terhadap hukum formal/acara, maka hal tersebut merupakan *exclusionary of rule*,

¹Djuniarti Djuniarti, "Berbagai Bentuk Pemeriksaan Tambahan Oleh Kejaksaan Dalam Proses Prapenuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Various Forms Of Additional Examination Attorney By The Pre Prosecution In The Case On Criminal Acts Of Corruption," *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.55606/jass.v3i2.17>.

²Asmadi Syam, "Measuring the Concept of Restoration in Criminal Justice System," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.363-376>.

³Eddy OS. Hiariej, *Hukum Acara Pidana* (Tangerang: Universitas Terbuka, 2017). Asas Diferensiasi Fungsional adalah asas yang menerangkan pemisahan secara tegas tugas dan kewenangan instansi penegak hukum atau tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lainnya

unlawful legal evidence, maupun *illegally acquired evidence*, yang berimplikasi pada dibebaskannya terdakwa.⁴

Sebagai sarana pengoperasian peradilan pidana, di dalam KUHAP terdapat ketentuan tahapan penyelesaian perkara pidana, mulai dari tahap penyidikan hingga dengan Inkrachtnya perkara tersebut. Tahap penyidikan merupakan tahapan awal yang dilakukan penyidik dalam rangka pengumpulan alat bukti yang dijadikan dasar menetapkan seorang pelaku tindak pidana menjadi tersangka. Pengumpulan alat bukti tersebut tentunya harus dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan berlaku, salah satunya dengan cara upaya paksa berupa penyitaan terhadap surat, barang, dan benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana atau sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk keperluan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan merupakan definisi penyitaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP. KUHAP seakan ingin menegaskan, bahwa penyidik lah yang berwenang melakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan pasal ini. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP, "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan persetujuan ketua pengadilan negeri setempat."

Mengingat perkembangan hukum acara pidana, pembatasan kewenangan penyitaan dalam KUHAP sudah tidak relevan lagi, karena dalam proses peradilan pidana banyak sekali barang bukti dan benda baru yang berkaitan dengan tindak pidana yang baru muncul atau diperoleh pada saat penuntutan atau setelah penuntut umum berkas lengkap dan memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan (P-21). Untuk mendukung pembuktian suatu tindak pidana, tentu saja barang bukti baru tersebut harus diperoleh secara sah, salah satunya dengan persetujuan atau pengesahan penyitaan oleh ketua pengadilan.

Praktik peradilan pidana menunjukkan, bahwa berbagai peraturan perundang-undangan lainnya turut mendukung berjalannya KUHAP dan menjadi acuan proses peradilan pidana." Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang" Kejaksaan, mengatur

⁴Eddy OS. Hiariej. *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012).

Kejaksaan sebagai salah satu subsistem peradilan pidana. “Kejaksaan berwenang melakukan pemeriksaan tambahan terhadap berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21)” sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e.

Temuan-temuan yang didapatkan pada tahap pemeriksaan tambahan, termasuk penemuan alat bukti atau barang bukti baru harus memiliki *legitimasi* sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian di persidangan, dan legitimasi tersebut salah satunya berupa penyitaan. Kondisi ini juga merupakan kesenjangan tersendiri karena secara prinsip penyitaan hanya dimiliki penyidik, sedangkan tahap pemeriksaan tambahan sudah pada tahap tugas dan kewenangan jaksa.

Kejaksaan berfungsi sebagai jembatan antara tahap penyidikan polisi dengan tahap pemeriksaan hakim dalam peradilan pidana. Sebab, yang berwenang melakukan penuntutan tersangka atau pelaku tindak pidana hanyalah jaksa penuntut umum, maka filsafat hukum beranggapan bahwa kejaksaan memiliki monopoli penuntutan. Kejaksaan diposisikan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan yang memiliki hak kendali terhadap setiap perkara pidana (*dominus litis*), atau jaksa adalah pemilik perkara.⁵ Oleh karenanya jaksa bertanggung jawab terhadap pembuktian perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan tersebut, juga mengupayakan menghadirkan berbagai alat bukti maupun barang bukti untuk menunjang pembuktian dan meyakinkan hakim. Termasuk juga harus diberikan kewenangan melakukan penyitaan terhadap temuan-temuan bukti baru di persidangan.

Argumentasi logis kewenangan jaksa untuk dapat melakukan penyitaan didukung oleh fenomena penegakan hukum dan keadilan, seperti dalam pembuktian tindak pidana korupsi beban jaksa dalam menyelesaikan suatu perkara bertambah dengan beban kewajiban jaksa untuk melacak harta benda milik terdakwa untuk menutupi kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan korup terdakwa sebagaimana amanat Pasal 17 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak menutup kemungkinan bagi jaksa selaku penuntut umum untuk segera melakukan penyitaan terhadap harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik terdakwa yang sebelumnya belum terungkap pada tahap penyidikan. Upaya paksa berupa penyitaan harus segera dilakukan mengantisipasi dipindah tangannya harta benda tersebut sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Adakala kalanya juga ketika perkara bergulir dipersidangan, terdakwa dengan sadar dan

⁵ Asmadi Syam, *Manifesto Keadilan Restoratif*, ed. Mohd. Din, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2023).

sukarela menitipkan sejumlah uang untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara, hal demikian juga penting untuk segera dilakukan upaya penyitaan agar uang yang telah dititipkan tersebut dapat dipertimbangkan baik dalam tuntutan maupun putusan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, dan/atau juga ditetapkan dirampas untuk negara.

Spekulasi lainpun berkembang dengan tujuan menghindari penerobosan terhadap KUHAP, apakah tidak sebaiknya diperkuat tahap prapenuntutan? sehingga norma yang telah dirumuskan tetap berjalan tanpa harus dipertentangkan. Kemungkinan untuk memperkuat prapenuntutan kiranya sulit untuk direalisasikan, karena prinsip peradilan pidana Indonesia menganut diferensiasi fungsional seperti diuraikan di atas, jaksa tidak dapat meninjau langsung penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Jaksa hanya menerima berkas dan alat bukti yang disajikan penyidik, tanpa mengetahui fakta penyidikan yang sesungguhnya.

Disatu sisi, konstruksi berpikir pragmatis mengenai kewenangan penyitaan pada tahap penuntutan oleh jaksa merupakan konsep baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dan pemikiran tersebut bisa diterima logis dalam rangka mewujudkan keadilan substantif, dengan mengungkap kebenaran materil yang sebenarnya dan merupakan tujuan hukum pidana formil. Disisi lain kewenangan penyitaan pada tahap penuntutan tidak diatur dalam ketentuan KUHAP. Problematika demikian, sampai saat ini belum menemukan titik penyelesaian secara ilmiah, terutama mengenai dampak yuridis pemberian kewenangan penyitaan kepada jaksa pada tahap penuntutan.

Sejauh penelusuran yang dilakukan baik melalui referensi tercetak maupun elektronik, topik penelitian tentang pengembangan konsep penyitaan dalam sistem peradilan pidana belum ada yang mengkaji secara mendalam. Penelitian yang telah ada terfokus pada kajian upaya paksa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik, dengan berbagai permasalahan yang diangkat. Seperti kajian tentang penyitaan yang merupakan kewenangan kejaksaan dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara dengan menyita harta benda milik pelaku⁶, dan kewenangan penyitaan komisi pemberantas korupsi dalam kapasitasnya sebagai penyidik dalam penanganan perkara *money laundering*. Berkaitan dengan penyitaan barang bukti perkara *money laundering* yang tindak pidana asal barang bukti tersebut bukan dari tindak pidana korupsi, hasil

⁶Andika Deavit Saputra, Faris Ali Sidqi, and Yusran bin Darham, "Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyitaan Terhadap Kekayaan Tersangka Tindak Pidana Korupsi," *Universitas Islam Kalimantan*, no. 30 (2022).

penelitian menunjukkan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan atas barang bukti kejahatan *money laundering* yang tindak pidana asal bukan tindak pidana korupsi.⁷

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut tidak menyebutkan sama sekali kewenangan jaksa untuk melakukan penyitaan pada tahap penuntutan. Muhammad Ibnu Fajar Rahim kemudian melakukan penelitian dengan judul “Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana pada Tingkat Pemeriksaan di Pengadilan” dengan tesisnya menyebutkan meskipun kewenangan untuk melakukan penyitaan hanya dimiliki oleh penyidik, namun tidak secara otomatis menafikan kewenangan penuntut umum untuk meminta persetujuan kepada hakim untuk menyita barang bukti pada saat pemeriksaan di pengadilan.⁸ Penelitian ini pun belum menemukan dan mengkaji secara mendalam tentang konsep ideal penyitaan dalam sistem peradilan pidana, sehingga dari beberapa penelitian tersebut di atas masih tersedia ruang kosong kesenjangan hukum untuk dipecahkan.

Bahwa oleh karena hal sebagaimana diuraikan diatas, menarik kajian ini dilakukan khususnya mengenai eksistensi penyitaan pada tahap penuntutan dan konsep ideal penyitaan dalam sistem peradilan pidana. Adanyanya kajian ini diharapkan dapat dijadikan landasan pijak perumusan kebijakan penegakan hukum dan keadilan yang responsif.

2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah dampak yuridis penyitaan pada tahap penuntutan dalam perspektif sistem peradilan pidana Indonesia?
- b. Bagaimana konsep ideal penyitaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

⁷ Nella Sumika Putri and I Tajudin, “Kewenangan KPK Untuk Melakukan Penyitaan Terhadap Barang Bukti Yang Diduga Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tindak Pidana Asalnya Bukan Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi,” *Padjadjaran Law Review* 2 (2014): 1–30.

⁸ Muhammad Ibnu Fajar Rahim et al., “Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan,” *Pleno Jure* 9, no. 1 (2020): 47–57, <https://doi.org/10.37541/plenajure.v9i1.389>.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.⁹ Sesuai dengan jenis penelitian, maka dapat digunakan beberapa pendekatan¹⁰, yaitu pendekatan perundang-undangan¹¹, kasus¹², dan konsep. Data yang digunakan merupakan data sekunder melalui studi kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹³

Data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) akan dianalisis secara kualitatif, dideskripsikan dan diinterpretasikan (penafsiran dalam ilmu hukum)¹⁴ untuk mengevaluasi, serta memberikan pandangan terhadap penyitaan pada tahap penuntutan, dan formulasi ideal konsep penyitaan dalam rangka pembaharuan sistem peradilan pidana. Penalaran hukum (*legal reasoning*), yang merupakan upaya untuk menawarkan pembenaran dan penjelasan berjalan seiring dengan penafsiran hukum, sehingga hasil penafsiran hukum mudah dipahami secara logis.¹⁵

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Permasalahan

Menegakkan keadilan, memberikan suatu kepastian hukum serta kemanfaatan, merupakan tujuan utama proses peradilan pidana yang dijalankan oleh masing-masing subsistem peradilan pidana. Proses peradilan pidana dianggap adil apabila kewenangan subsistem peradilan dijalankan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Namun dalam praktiknya, sejumlah standar KUHAP masih samar-samar sehingga sulit untuk segera dilaksanakan dalam proses persidangan. Akibatnya, hakim dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) sebagai peserta dalam proses persidangan.¹⁶

Kebutuhan subsistem peradilan pidana dalam rangka mengoperasionalkan KUHAP, dalam konteks sistem peradilan pidana secara teknis akan dijabarkan di

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2008).

¹² Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal YUSTITIA* 19, no. 2 (2018): 203–10, <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/477399>.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004).

¹⁴ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014), <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>.

¹⁵ Jimly Asshidiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Cetakan I (Jakarta: Ind. Hil, 1997).

¹⁶ Ratih Mannul Izzati, "Dampak Yuridis Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana," *Jurnal Law Reform*, 2012, <https://www.neliti.com/publications/107976/dampak-yuridis-pemeriksaan-setempat-gerechtelijke-plaatsopneming-dalam-hukum-aca> diakses pada 1 Desember 2021.

dalam berbagai bentuk peraturan atau regulasi instansi penegak hukum itu sendiri, seperti kewenangan melakukan penyitaan pada tahap penuntutan. Oleh karena KUHAP tidak mengatur secara detail mengenai kewenangan penyitaan pada tahap penuntutan tersebut, maka kejaksaan melalui Prosedur Operasional Standar Penanganan Perkara Pidana Umum, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER 036/A/JA/09/2011 (selanjutnya disebut PERJA 36/2011) menjabarkan kewenangan penyitaan pada tahap penuntutan tersebut dalam kapasitas selaku penuntut umum.

Perja"36/2011 merupakan pedoman teknis penanganan perkara oleh kejaksaan selaku penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan. Kebutuhan penegakan hukum dan keadilan pada tataran praktik, untuk mengisi kekosongan hukum, terutama yang berkaitan dengan penyitaan pada tahap penuntutan tersebut. Ketentuan Pasal 23 Perja 36/2011 menyebutkan:

(1) Dalam hal dilakukan pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan di persidangan untuk kepentingan penyelesaian perkara, Penuntut Umum dapat melakukan penyitaan;

(2) Penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Terhadap perkara yang belum dilimpahkan ke pengadilan, Kepala Kejaksaan Negeri setelah menerima laporan penyitaan melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri membuat surat permohonan ijin sita/persetujuan sita kepada Ketua Pengadilan Negeri; atau;
- b. Terhadap perkara yang sudah dilimpahkan dan di dalam persidangan ditemukan fakta adanya barang/benda yang semestinya disita, Kepala Kejaksaan Negeri setelah menerima laporan penyitaan melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri membuat surat permohonan ijin sita/persetujuan sita kepada Ketua Pengadilan Negeri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara."

Dibicarakan mengenai dampak dalam penegakan hukum dan keadilan adalah implikasi yuridis berkaitan dengan suatu akibat dari penerapan suatu ketentuan hukum, tentang bagaimanakah keberlakuan suatu ketentuan hukum, apakah harmonis dengan ketentuan-ketentuan di atasnya, dalam pengertian tidak terjadi pertentangan norma atau asas. Ketentuan norma yang terumus dalam KUHAP yang

bersifat legalistik, berkaitan dengan konsep penyitaan, prinsipnya hanya dapat dilakukan penyidik sebagai bagian dari kewenangannya.

Kewenangan ini sebagaimana pendapat H.D Stout¹⁷ merupakan suatu pengertian yang diambil dari hukum tata pemerintahan, yang dapat diartikan sebagai semua hukum yang mengatur perolehan dan penggunaan kewenangan pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik. Sebagai subjek hukum publik, penyidik berwenang melakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan penyitaan menurut Pasal 1 Angka 16 KUHAP "sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk keperluan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan.". kemudian, Pasal 38 ayat (1) KUHAP juga menjelaskan bahwa "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat". Ketentuan pasal ini seolah-olah membatasi kewenangan penyitaan tersebut, sehingga apabila menyimpang dari ketentuan pasal ini, maka dianggap sebagai pelaksanaan kewenangan yang tidak semestinya.

Dirujuk pada sistem peradilan pidana memiliki tujuan menciptakan ketertiban dan ketentraman perilaku masyarakat, sehingga dapat dikatakan sistem peradilan pidana merupakan salah satu sarana perwujudan tujuan hukum pada umumnya. Selanjutnya juga tujuan utama sistem peradilan pidana, adalah untuk mencari kebenaran materil. Kebenaran materil tersebut hanya bisa didapatkan dengan mengupayakan seluruh sarana, dan prasarana atau perangkat peraturan perundang-undangan dengan menghadirkan seluruh alat bukti sah, termasuk alat bukti atau barang bukti yang baru muncul pada saat tahap penuntutan. Merujuk pada argumentasi tersebut, maka penyitaan pada penyitaan pada tahap penuntutan dipraktek oleh jaksa dalam melaksanakan kewenangan penuntutannya.

Pada tataran praktik pelaksanaan kewenangan penyitaan pada tahap penuntutan masih terjadi diskursus, karena berdasarkan data yang ada majelis hakim yang sependapat dengan penyitaan pada tahap penuntutan, seperti pada Terdakwa Hendra Widjaja, S.E. Nomor Perkara 392/Pid.Sus/2017/PN Bks dan Terdakwa I Fenny Lusianti Alias Fenny Binti Tintin Sumarni Nomor Perkara

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

334/Pid.B/2019/PN.Ckr, serta Terdakwa II Fiorena Rosevelt Suryali Alias Fio Binti Rossy. Keduanya didakwa melakukan pencucian uang, termasuk Erna Widiawati. Selanjutnya ada juga yang penyitaan pada tahap penuntutan tersebut tidak ditanggapi oleh majelis hakim sebagaimana dalam perkara tindak pidana korupsi dengan nomor register perkara PDS-03/L.1.10/Ft.1/10/2023 yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

Kelompok yang menentang penyitaan pada tahap penuntutan, mengemukakan argumen yang mengacu pada model Due Process (dader strafrecht), yaitu asas sistem peradilan pidana Indonesia yang menekankan penentuan kesalahan seseorang di depan pengadilan yang tidak memihak, kemudian menempelkannya (tersangka atau terdakwa) berdasarkan persamaan kedudukannya di hadapan hukum dan mempertimbangkan pertimbangan formal sehingga hak asasi manusianya tidak terancam. Gagasan ini konsisten dengan tesis konsensus, yang menyatakan bahwa semua anggota masyarakat yang menerima standar-standar dasar yang menetapkan apa yang benar dan apa yang salah.¹⁸ Mengingat KUHAP merupakan standar-standar telah diterima dan didukung oleh semua aparat penegak hukum, dan dijadikan pedoman utama proses peradilan pidana. Menyimpang dari KUHAP sebagai due process of law, maka hal tersebut merupakan exclusionary of rule, unlawful legal evidence, maupun illegally acquired evidence, yang berujung pada dibebaskannya terdakwa.¹⁹

Menindaklanjuti problematika diskursus penyitaan pada tahap penuntutan tersebut, sebenarnya mahkamah agung telah terlebih dahulu memberikan petunjuk mengenai kekosongan hukum masalah penyitaan pada tahap penuntutan melalui Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, disebutkan "Apabila dalam persidangan hakim memandang perlu dilakukan penyitaan atas suatu barang, maka perintah hakim untuk melakukan penyitaan ditujukan kepada penyidik melalui penuntut umum". Tujuan dari diterbitkannya KMA tersebut, tidak lain untuk memberikan legitimasi kewenangan penyitaan pada tahap penuntutan, walaupun harus dilakukan melalui penyidik kembali.

¹⁸ Johnlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017).

¹⁹ Hiiriej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kejaksaan adalah pengendali penanganan perkara dalam sistem peradilan pidana, serta berwenang menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, kejaksaan telah mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait penyitaan pada tahap penuntutan. Diantaranya Perja 36/2011, Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Umum, kemudian yang terakhir adanya instruksi jaksa Agung Instruksi Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan republik Indonesia Tahun 2024 menginstruksikan bidang tindak pidana khusus untuk Menyusun petunjuk teknis penyitaan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2023 tentang optimalisasi penanganan perkara tindak pidana khusus yang menyebutkan “melaksanakan sita eksekusi sesuai dengan hukum acara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan, dengan memperhatikan kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik.” Dengan adanya petunjuk teknis tersebut dapat melengkapi kebutuhan regulasi teknis terkait penyitaan yang dapat dilakukan oleh jaksa selaku penuntut umum.

Dalam perspektif teori perundang-undangan sebagaimana yang dikemukakan Kelsen, “Sistem hukum ibarat tangga berjenjang, demikian pula norma hukum, Hubungan suatu norma mengatur perbuatan dengan norma lainnya merupakan hubungan super dan subordinasi dalam konteks spasial”.²⁰ Oleh karena itu, eksistensi kebijakan teknis subsistem peradilan pidana, termasuk KMA/032/SK/IV/2006 dan sejumlah peraturan internal kejaksaan tersebut belum memadai dan dapat memberikan legitimasi kuat akan keberadaan penyitaan pada tahap penuntutan, karena keberadaannya di bawah undang-undang yang memiliki status lebih tinggi.

Secara praktik produk regulasi seperti Perma lebih dijadikan rujukan baik oleh hakim maupun aparat penegak hukum lainnya. Jimly Asshiddiqie memasukkan Peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat legi generalis*.²¹ Begitu Jaksa dalam menjalankan

²⁰ Jimly Asshiddiqie and M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Mahkamah Konstitusi RI*, 2006, http://www.pusdikmin.com/perpus/file/TEORI_HANS_KELSEN_TENTANG_HUKUM.pdf.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

tugas dan kewenangannya akan lebih banyak merujuk kepada Perja, ketika peraturan perundang-undang di atasnya tidak mengatur secara spesifik, sedangkan praktik membutuh pedoman dalam pengoperasian sistem peradilan pidana Indonesia. Sehingga jika hal tersebut tetap dibiarkan akan memberikan dampak tidak baik bagi perkembangan sistem peradilan pidana, yang menimbulkan multitafsir serta ketidakpastian hukum, apalagi sering terjadi perbedaan pendapat atau diskursus antara hakim dan jaksa pada tataran praktik terhadap permohonan penyitaan pada tahap penuntutan yang diajukan oleh jaksa selaku penuntut umum.

Sebagai akibat ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan terkait penyitaan tersebut menyebabkan adanya disparitas dalam praktik, beberapa permohonan penyitaan pada penuntutan ada yang diterima sebagaimana diuraikan di atas, dan ada juga yang ditolak oleh majelis hakim dengan alasan jaksa tidak memiliki kewenangan melakukan penyitaan, seperti dalam perkara tindak pidana korupsi dengan nomor register perkara PDS-03/L.1.10/Ft.1/10/2023 yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Dampak dari penolakan penyitaan uang titipan untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti oleh keluarga terdakwa, menyebabkan luputnya majelis hakim mempertimbangkan uang titipan tersebut dalam amar putusannya sehingga uang titipan tersebut tidak memiliki status, sehingga jaksa melakukan banding atas putusan tersebut dan akhirnya dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat banding. Hal demikian tentu tidak baik bagi perwujudan asas peradilan cepat, bebas dan biaya ringan.

Sebagaimana prinsip sistem peradilan pidana yang merujuk pada KUHAP dan menganut prinsip legalitas formil ketat. Maka sebagai hukum formil KUHAP tidak boleh ditafsirkan secara bebas, walaupun ditafsirkan harus terbatas/ Interpretasi autentik²² Sebatas diatur oleh norma yang telah ada. Oleh karena demikian kewenangan penyitaan pada tahap penuntutan masih dianggap bertentangan dengan norma legalitas KUHAP, kendatipun telah ada beberapa petunjuk teknis dari instansi penegak hukum yang mengakomodir konsep tersebut.

Dilihat dari uraian diatas, maka berkaitan dengan kewenangan penyitaan sebagai salah satu upaya paksa dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan mewujudkan pencarian kebenaran materiil dan melindungi hak asasi manusia, maka kewenangan penyitaan harus diformulasikan dan dirumuskan dalam bentuk

²² Habibul Umam Taquiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343>.

peraturan setara undang-undang atau konsep penyitaan yang ditawarkan sebagaimana pembahasan dibawah ini dapat menjadi rujukan dalam perumusan RKUHAP ke depan.

2. Pembahasan Kasus Nyata dan Prediksi Kedepan

Pada hakikatnya, penyitaan merupakan kewenangan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pembuktian peristiwa kejahatan di setiap tingkatan penanganan perkara, baik penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Tindakan penyitaan bersinggungan dengan hak asasi manusia, khususnya hak milik pribadi yang disebutkan dalam Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Namun, karena dalam rangka penegakan hukum, sepanjang bisa dibuktikan adanya keterkaitan barang sitaan dengan peristiwa pidana, maka tindakan itu dapat dibenarkan. Sedangkan penyitaan dalam konteks hukum perdata diatur Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²³

Keterkaitan penyitaan dengan hak asasi manusia mengharuskan tindakan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana bertindak atas dasar ketentuan hukum tertulis, atau norma yang ditetapkan terlebih dahulu dalam hukum acara. Hal demikian demikian untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Sekalipun hak seorang dirampas dengan tujuan penegakan dilakukan atas dasar hukum. Tindakan aparat pemerintah berdasarkan hukum atau legalitas merupakan salah satu ciri negara hukum. 24

Konsep sistem peradilan pidana Indonesia yang norma termaktub dalam KUHP sebagai standar legalitas pengoperasian sistem peradilan pidana, dalam perkembangannya sudah tidak mampu membendung pergeseran model penegakan hukum dan keadilan. Ada permasalahan teknis penanganan perkara yang harus diambil alih kebijakannya oleh masing-masing sub sistem peradilan pidana, seperti

²³ Lalola Easter, Kurnia Ramadhana, and Diky Anandya, "Urgensi Pengaturan Sita Jaminan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi," in *Laporan Penelitian Indonesia Corruption Watch*, 2022.

²⁴ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Konstitusi Pres, 2005). "terdapat dua belas ciri negara hukum modern sebagai berikut; a. Supremasi hukum (Supremacy Of Law). b. Persamaan dimata hukum (Equality Before The Law). c. Asas Legalitas (Due Process Of Law). d. Pembatasan Kekuasaan. e. Organ-Organ eksekutif Independen. f. Peradilan bebas dan tidak ada di pihak manapun. g. Peradilan Tata Usaha Negara. h. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court). i. Perlindungan Hak Asasi Manusia. j. Bersifat Demokratis. k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan sebagai media mewujudkan tujuan negaraTransparansi dan control Sosial"

permasalahan penyitaan sebagai salah satu upaya paksa untuk membuat terang tindak pidana.

Kebijakan hukum pidana, adalah bagaimana produk hukum pidana berdaya guna untuk mencapai tujuan hukum. Apabila dilihat lagi lebih jauh, kebijakan hukum pidana sendiri merupakan bagian dari kebijakan kriminal dan merupakan bagian integral dari kebijakan sosial.²⁵ Kebijakan hukum pidana dalam ini dikaitkan dengan kebijakan teknis penanganan perkara dapat diterima apabila selaras dengan kewenangan yang diberikan kepada pembuat kebijakan tersebut. berdasarkan teori Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik". Pengertian tersebut menunjukkan wewenang sifatnya adalah hak. Secara yuridis wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁶

Dibawah kendali Jaksa Agung, Kejaksaan secara hukum diberi kewenangan untuk menyusun kebijakan di bidang peradilan dan penegakan hukum. Kebijakan teknis penanganan perkara yang diambil alih oleh subjek hukum publik secara teori perundang-undangan dapat diterima sepanjang tidak menyimpang dari norma dasar yang telah dirumuskan KUHAP, karena berdasarkan konsep, materi muatan peraturan perundang-undangan, tolak ukurnya hanya dapat dikonsepsikan secara umum. Semakin tinggi kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya. Begitu juga sebaliknya semakin rendah kedudukan suatu peraturan perundang-undangan semakin semakin rinci dan semakin konkrit juga materi muatannya. ²⁷

Fenomena yang sangat berkembang dalam kaitannya dengan wacana seputar konsep penyitaan. Termasuk di dalamnya adalah masalah penyitaan pada tahap penuntutan untuk tujuan pembuktian perkara atau jaminan pengembalian uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Selain itu, penyitaan barang bukti elektronik tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyitaan merupakan salah satu tujuan praperadilan²⁸, sehingga

²⁵ Mohd Din, *Negara Hukum Dan Kebijakan Kriminal Dalam Islam* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2018).

²⁶ Indoharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).

²⁷ Mahendra Kurniawan, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007).

²⁸ Asmadi Syam, "Pengegledahan Dan Penyitaan Sebelum Penetapan Tersangka," *Hukum Online*, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengegedahan-dan-penyitaan-sebelum-penetapan-tersangka-1t60862f5d1545f/>.

aparatus penegak hukum harus berhati-hati dan bijak mengelaborasi kewenangannya tersebut.

Kebijakan penegakan hukum dan peradilan yang efektif memerlukan langkah-langkah strategis dari Kejaksaan Agung yang memegang mandat dominus litis dalam sistem peradilan pidana. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia “Jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan, mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang”.

Kebijakan kejaksaan melalui PERJA dan INSJA berkaitan dengan kewenangan penyitaan, khususnya pada tahap penuntutan harus dianggap sebagai langkah positif, dan upaya pengefektifan penegakan hukum dan keadilan, walaupun praktik penerapan regulasi internal tersebut menimbulkan diskursus tersendiri yang diakibatkan oleh ketidakseragaman persepsi antara aparat penegak hukum.

Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Yoyok Ucu Suryono dan Dadang Firdiyanto menjelaskan : 29

“Sistem penegakan hukum pada hakikatnya identik dengan sistem peradilan, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses penegakan hukum. Sistem penegakan hukum atau sistem peradilan merupakan satu kesatuan berbagai subsistem atau komponen yang terdiri dari substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture).”

Penegakan hukum sebagai suatu sistem berkaitan erat dengan ketiga subsistem hukum, yaitu substansi hukum atau perundang-undangan, Struktur hukum atau instansi/aparatus penegak hukum berikut mekanisme prosedural atau administrasinya, dan budaya hukum atau nilai-nilai mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum, dan kesadaran atau sikap perilaku hukum. 30

Menghindari pertentangan prinsip legalitas KUHAP yang telah mengatur secara rigid masalah penyitaan, maka harus diberikan atau ditawarkan konsep penyitaan yang ideal dalam fungsionalisasi sistem peradilan pidana. Konsep tersebut akan memberikan solusi pemecahan perbedaan persepsi penegak hukum dalam sistem

²⁹ Yoyok Ucu Suyono and Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana* (Yogyakarta: Laksbang, 2020).

³⁰ Suyono and Firdiyanto.

peradilan pidana. Konsepsi tersebut dianggap salah satu strategi perumusan kebijakan pidana, karena pengoperasian sistem peradilan pidana termasuk bagian dari sistem peradilan pidana.

Tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk memberantas kejahatan dengan menggunakan baik melalui sarana penal maupun non penal. Penanggulangan melalui sarana penal biasa dilakukan dengan cara dirumuskan norma-norma hukum pidana yang didalamnya terkandung unsur-unsur dalam sistem hukum baik substantif, struktur maupun kultural masyarakat.

Begitu halnya dengan penyitaan sebagaimana uraian di atas, untuk mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri, maka kewenangan penyitaan memiliki dasar atau legitimasi kuat untuk dilaksanakan pada tahap pasca penyidikan. Tahap pasca penyidikan tersebut terdiri dari sejak perkara dilimpahkan kepada penuntut umum (Tahap II), bahkan sampai dengan pelaksanaan eksekusi oleh jaksa penuntut umum. Kewenangan penyitaan tersebut harus diberikan kepada penuntut umum selaku pemegang mandat dominus litis untuk menghindari abuse of power dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Konsep yang tepat tentang penyitaan dalam sistem peradilan pidana adalah dimulai dari pengertian penyitaan itu sendiri, yaitu serangkaian tindakan aparat penegak hukum untuk mengambil alih sebagai atau seluruhnya dalam kekuasaannya barang atau benda bergerak maupun tidak bergerak termasuk perangkat elektronik dan sistem informasi elektronik untuk kepentingan pembuktian suatu tindak pidana di setiap tingkatan penanganan perkara, baik penyidikan, penuntutan, maupun persidangan hingga pelaksanaan eksekusi. Adanya perluasan pengertian penyitaan tersebut telah memberikan kepastian hukum atas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum tersebut.

Indikator yang membuat idealnya pengertian penyitaan tersebut adalah memperluas ruang gerak aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dan keadilan atau dalam proses mengungkap dan mencari kebenaran materil, sebagaimana tujuan dari sistem peradilan pidana.

Penambahan konsep penyitaan terhadap barang bukti elektronik merupakan wujud responsif penegakan hukum, karena selama ini dalam konsep konvensional yang dapat dilakukan penyitaan adalah barang bergerak dan tidak bergerak yang ada hubungannya dengan tindak pidana, barang bukti elektronik tidak termasuk dalam kriteria, sehingga dalam pelaksanaannya telah terjadi ketidakpastian. Mekanisme

penyitaan digital evidence dapat dirumuskan dalam aturan teknis pelaksana yang menaungi sistem peradilan pidana. Indikator pengaturan penyitaan digital evidence adalah wujud hukum responsif dalam menghadapi perkembangan sistem teknologi informasi

Mekanisme penyitaan terhadap alat bukti elektronik atau digital evidence harus dilakukan dengan izin ketua pengadilan negeri setempat. Sedangkan mengenai cara memperolehnya dilakukan dengan cara khusus yaitu harus melalui Chain of custody³¹. Dokumentasi chain of custody selama ini tidak memiliki standar yang baku. Sehingga setiap penegak hukum dapat memiliki form dokumentasi chain of custody yang berbeda-beda.³² Namun untuk dapat diterima di persidangan, sebuah form *chain of custody* “setidaknya mencakup informasi “5W dan 1 H” untuk mencatat setiap proses investigasi diantaranya:³³

- a. Siapa” yang menangani barang bukti
- b. Kapan setiap prosedur penanganan barang bukti dilakukan
- c. Bagaimana prosedur penanganan barang bukti dilakukan
- d. Di mana alur proses penanganan barang bukti dicatat dan disimpan
- e. Mengapa barang bukti tersebut ditangani oleh pihak tersebut
- f. Barang bukti apa yang telah dikumpulkan”

Merujuk ketentuan Pasal 39 KUHAP yang belum mengatur mengenai penyitaan terhadap barang atau benda yang tidak hubungannya dengan tindak pidana yang harus dilakukan penyitaan untuk upaya pemulihan kerugian negara. Perlunya penambahan konsep penyitaan aset pelaku tindak pidana yang berhubungan dengan keuangan negara atau perekonomian negara harus diatur secara khusus tersendiri. Sebab, seiring dengan perkembangan zaman, pola dan modus korupsi terus bertransformasi yang kadang kala menyulitkan aparat penegak hukum untuk membongkarnya. Selain faktor perkembangan zaman, dalam lingkup ilmu kriminologi telah pula dijelaskan bahwa pelaku kejahatan secara harfiah akan selalu

³¹ Yudi Prayudi and Azhari SN, “Digital Chain of Custody: State of The Art,” *International Journal of Computer Applications* 114, no. 5 (2015), <https://doi.org/10.5120/19971-1856>. Chain of custody adalah prosedur pencatatan / dokumentasi kronologis barang bukti sejak barang bukti ditemukan, proses duplikasi, penyimpanan barang bukti baik itu secara fisik maupun digital hingga sampai pada presentasi dan keputusan akhir terhadap barang bukti. *Chain of custody* digunakan untuk memastikan *integritas dan orisinalitas* dari barang bukti

³² Moch Bagoes Pakarti, “Manajemen Pengelolaan Bukti Digital Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Laboratorium Forensika Digital” (Universitas Islam Indonesia, 2020), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/28258>.

³³ Jasmin Ćosić, Zoran Ćosić, and Miroslav Bača, “An Ontological Approach to Study and Manage Digital Chain of Custody of Digital Evidence,” *Journal of Information and Organizational Sciences* 35, no. 1 (2011).

berupaya menghindari dari jerat pidana dengan melakukan cara apapun, termasuk memindahkan harta kekayaannya.³⁴

Pengaturan terkait penyitaan aset pelaku tindak pidana yang berhubungan dengan keuangan negara atau perekonomian negara harus diatur secara khusus. Konsep sita jaminan seperti dalam perdata dapat diadopsi sebagai upaya penjaminan pengembalian kerugian negara. Yahya Harahap menerangkan tujuan sita jaminan semata-mata agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan kreditur selama proses persidangan berlangsung.³⁵

Ada perbedaan yang cukup signifikan antara penyitaan dalam hukum pidana dengan sita jaminan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP, penyitaan hanya dapat dikenakan terhadap barang yang memiliki keterkaitan langsung dengan peristiwa kejahatan. Sedangkan sita jaminan justru sebaliknya, aset milik kreditur dapat disita seluruhnya untuk menjamin hutang-hutangnya dapat dilunasi.³⁶

Penyitaan yang dilakukan pada tahap perkara setelah P-21 (tahap penuntutan) sebagaimana konsep dalam Pedoman 24 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana umum, sebagai berikut :

- a. Dalam hal dilakukan pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan di persidangan untuk kepentingan penyelesaian perkara, Penuntut umum dapat melakukan penyitaan.
- b. Penyitaan sebagaimana dimaksud angka 1), dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) terhadap perkara yang belum dilimpahkan ke pengadilan, penuntut umum membuat surat permohonan ijin sita/persetujuan sita kepada Ketua Pengadilan Negeri; atau
 - 2) terhadap perkara yang sudah dilimpahkan dan di dalam persidangan ditemukan fakta adanya barang/benda yang semestinya disita, penuntut umum membuat surat permohonan ijin sita/persetujuan sita kepada Ketua Pengadilan Negeri cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara.
- c. Dalam hal persidangan sudah dinyatakan ditutup, penuntut umum meminta ketua majelis hakim memeriksa perkara untuk membuka sidang kembali dengan

³⁴ “Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana,” 2015, <https://www.bphn.go.id/data/documents/PENYELARASAN-NASKAH-AKADEMIKPERAMPASAN-ASET.PDF>.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, n.d.

³⁶ Easter, Ramadhana, and Anandya, “Urgensi Pengaturan Sita Jaminan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.”

- alasan akan mengajukan surat ijin” penyitaan sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b).”
- d. Setelah menerima penetapan sita dari Ketua Pengadilan Negeri atau penetapan Ketua Majelis Hakim, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memerintahkan penuntut umum untuk melakukan penyitaan.
 - e. Penyitaan sebagaimana dimaksud pada angka 4) dilakukan dengan surat perintah penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang pelaksanaannya dibuatkan Berita Acara Penyitaan.
 - f. Penyitaan atas benda tidak bergerak harus disertai dengan dokumen kepemilikannya.
 - g. Benda yang sudah dilakukan penyitaan turut ditentukan status hukumnya sebagaimana barang bukti dalam amar surat tuntutan.
 - h. Benda yang tidak dapat dilakukan penyitaan karena tidak dikabulkannya ijin persetujuan penetapan penyitaan oleh pengadilan harus segera dikembalikan kepada orang dari mana benda tersebut disita.
 - i. Penuntut umum bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyitaan.”

Konsep penyitaan pada tahap penuntutan sebagaimana telah dirumuskan dalam peraturan kebijakan kejaksaan tersebut dapat diadopsi menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang menaungi sistem peradilan pidana, untuk menghindari ego sektoral penegakan hukum atau perbedaan persepsi dalam pelaksanaannya.

Konsep kebijakan pidana berkaitan dengan pengoperasian sistem peradilan pidana Indonesia sebagaimana uraian di atas khususnya berkaitan dengan penyitaan, dianggap mampu mengakomodir perkembangan penegakan hukum. Hal ini juga selaras dengan pendapat Mohd Din.³⁷ “Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (criminal law policy) adalah politik hukum dalam bidang hukum pidana, tentang bagaimana peraturan hukum yang baik dan sesuai dengan situasi di masa sekarang dan akan datang”. Konsep penyitaan tersebut menjangkau kebutuhan penegakan hukum dan keadilan, karena telah diuraikan tentang kekosongan hukum selama ini berkaitan dengan pembuktian perkara pidana dan terwujudnya prinsip sistem peradilan pidana.

³⁷ Din, *Negara Hukum Dan Kebijakan Kriminal Dalam Islam*.

C. KESIMPULAN

1. KUHAP yang berasaskan legalitas, adalah sebagai rujukan utama pengoperasian sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga membawa dampak bahwa penyitaan pada tahap penuntutan bertentangan dengan legalitas formil KUHAP, karena prinsip hukum acara itu harus tertulis dan tidak boleh ditafsirkan secara bebas.
2. Konsep ideal penyitaan sebagai salah satu upaya paksa dalam sistem peradilan pidana dimulai dari perubahan pengertian penyitaan itu sendiri, dengan ketentuan yaitu :
 - a. Penyitaan adalah “serangkaian tindakan aparat penegak hukum untuk mengambil alih sebagai atau seluruhnya dalam kekuasaannya barang atau benda bergerak maupun tidak bergerak termasuk perangkat elektronik dan sistem informasi elektronik untuk kepentingan pembuktian suatu tindak pidana di setiap tingkatan penanganan perkara, baik penyidikan, penuntutan, maupun persidangan hingga pelaksanaan eksekusi”.
 - b. Adanya penambahan konsep penyitaan terhadap barang bukti elektronik sebagai wujud responsif penegakan hukum, karena selama ini dalam konsep konvensional hal tersebut tidak ada.
 - c. Harus ada pengaturan terkait penyitaan aset pelaku tindak pidana yang berhubungan dengan keuangan negara atau perekonomian negara harus diatur secara khusus. Konsep sita jaminan seperti dalam perdata dapat diadopsi sebagai upaya penjaminan pengembalian kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
[http://www.pusdikmin.com/perpus/file/TEORI_HANS_KELSEN_TENTANG_HUKUM M.pdf](http://www.pusdikmin.com/perpus/file/TEORI_HANS_KELSEN_TENTANG_HUKUM_M.pdf).
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- . *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Pres, 2005.
- . *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Cetakan I. Jakarta: Ind. Hil, 1997.
- Ćosić, Jasmin, Zoran Ćosić, and Miroslav Bača. "An Ontological Approach to Study and Manage Digital Chain of Custody of Digital Evidence." *Journal of Information and Organizational Sciences* 35, no. 1 (2011).
- Din, Mohd. *Negara Hukum Dan Kebijakan Kriminal Dalam Islam*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2018.
- Djuniarti Djuniarti. "Berbagai Bentuk Pemeriksaan Tambahan Oleh Kejaksaan Dalam Proses Prapenuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Various Forms Of Additional Examination Attorney By The Pre Prosecution In The Case On Criminal Acts Of Corruption." *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.55606/jass.v3i2.17>.
- Easter, Lalola, Kurnia Ramadhana, and Diky Anandya. "Urgensi Pengaturan Sita Jaminan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi." In *Laporan Penelitian Indonesia Corruption Watch*, 2022.
- Hiariej, Eddy OS. *Hukum Acara Pidana*. Tangerang: Universitas Terbuka, 2017.
- . *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Indoharto. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Izzati, Ratih Mannul. "Dampak Yuridis Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana." *Jurnal Law Reform*, 2012. <https://www.neliti.com/publications/107976/dampak-yuridis-pemeriksaan-setempat-gerechtelijke-plaatsopneming-dalam-hukum-aca> diakses pada 1 Desember 2021.
- Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.

- Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>.
- Kurniawan, Mahendra. *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- "Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana," 2015. <https://www.bphn.go.id/data/documents/PENYELARASAN-NASKAH-AKADEMIKPERAMPASAN-ASET.PDF>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencaana Pranada Media, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, n.d.
- Pakarti, Moch Bagoes. "Manajemen Pengelolaan Bukti Digital Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Laboratorium Forensika Digital." Universitas Islam Indonesia, 2020. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/28258>.
- Prayudi, Yudi, and Azhari SN. "Digital Chain of Custody: State of The Art." *International Journal of Computer Applications* 114, no. 5 (2015). <https://doi.org/10.5120/19971-1856>.
- Purba, Johnlar. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.
- Putri, Nella Sumika, and I Tajudin. "Kewenangan KPK Untuk Melakukan Penyitaan Terhadap Barang Bukti Yang Diduga Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tindak Pidana Asalnya Bukan Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi." *Padjadjaran Law Review* 2 (2014): 1-30.
- Rahim, Muhammad Ibnu Fajar, Sitti Arkanul Pascahyati Rahim, Muhammad Aman Hijrah Akbar Rahim, Ahmad Ranuwirawan Rahim, and Abdul Rahim. "Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan." *Pleno Jure* 9, no. 1 (2020): 47-57. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.389>.
- Saputra, Andika Deavit, Faris Ali Sidqi, and Yusran bin Darham. "Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyitaan Terhadap Kekayaan Tersangka Tindak Pidana Korupsi." Universitas Islam Kalimantan, no. 30 (2022).

- Suhaimi. "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal YUSTITIA* 19, no. 2 (2018): 203-10.
<http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/477/399>.
- Suyono, Yoyok Ucu, and Dadang Firdiyanto. *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*. Yogyakarta: Laksbang, 2020.
- Syam, Asmadi. *Manifesto Keadilan Restoratif*. Edited by Mohd. Din. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- . "Measuring the Concept of Restoration in Criminal Justice System." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 2 (2022).
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.363-376>.
- . "Pengeledahan Dan Penyitaan Sebelum Penetapan Tersangka." *Hukum Online*, 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengeledahan-dan-penyitaan-sebelum-penetapan-tersangka-lt60862f5d1545f/>.
- Taqiuddin, Habibul Umam. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 1, no. 2 (2019).
<https://doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343>.

Law Quote

***"Kepastian hukum merupakan
perlindungan bagi pencari
keadilan terhadap tindakan
sewenang-wenang."***

**Alm. Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo,
SH.
(Pakar Hukum Perdata, 1924-2001)**



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Handling Of Crypto Assets As Evidence In Criminal Cases

Penanganan Aset Kripto Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana

Desty Puspita Sari¹, Muh. Ibnu Fajar Rahim²

¹ South Central Minzu University, China

² President University, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Muh. Ibnu Fajar Rahim

✉ ibnufajarrahim@gmail.com

History:

Submitted: 24-01-2024

Revised: 24-02-2024

Accepted: 24-03-2024

Keyword:

Handling, Crypto Assets, Evidence

Kata Kunci:

Penanganan, Aset Kripto, Barang Bukti

Abstract

The increasing number of users and transactions of crypto assets every year has the potential to increase the modus operandi of criminal acts that use crypto assets, either as a tool to commit a criminal act (instrumental offense) or as a result of a criminal act (corpus delicten). Crypto assets are evidence that are very vulnerable, fluctuating in value, and easily changed and transferred. Therefore, handling must be done quickly and precisely. Handling of crypto assets must comply with the exclusionary rule principle which requires obtaining evidence in ways that are based on law so that crypto assets become legal evidence (lawfully legal evidence) to be used in proving criminal cases. The prosecutor as case controller (dominus litis) has the responsibility to maintain the integrity of crypto assets as evidence and/or valid evidence, both at the stages of investigation, prosecution, examination at trial, and implementation of court decisions. In practice, there is no legal instrument that specifically regulates procedures for handling crypto assets in criminal cases, giving rise to different handling practices (disparities). Therefore, a common perception is needed regarding the handling of crypto assets as evidence in criminal cases.

Abstrak

Meningkatnya jumlah pengguna dan transaksi aset kripto setiap tahunnya berpotensi menambah modus operandi tindak pidana yang menggunakan aset kripto, baik sebagai alat untuk melakukan tindak pidana (instrumental delicten) atau sebagai hasil tindak pidana (corpus delicten). Aset kripto merupakan barang bukti yang memiliki sifat yang sangat rentan, nilainya fluktuatif, serta mudah berubah dan dipindahtangankan. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Penanganan aset kripto harus memenuhi exclusionary of rule principle yang mewajibkan perolehan bukti dengan cara-cara yang berdasarkan hukum sehingga aset kripto menjadi barang bukti yang sah (lawfully legal evidence) untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana. Jaksa selaku pengendali perkara (dominus litis) memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas aset kripto sebagai barang bukti



All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

dan/atau alat bukti yang sah, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, maupun pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam praktiknya, belum ada instrumen hukum yang khusus mengatur tata cara penanganan aset kripto dalam perkara pidana sehingga menimbulkan praktek penanganan yang berbeda-beda (disparitas). Oleh karena itu, dibutuhkan suatu persamaan persepsi terkait penanganan aset kripto sebagai barang bukti dalam perkara pidana.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penegakan hukum di era transformasi digital saat ini diperhadapkan dengan modus operandi kejahatan yang sangat canggih. Salah satu bentuknya adalah kejahatan menggunakan sarana mata uang *virtual* atau disebut *cryptocurrency* menggunakan aset kripto. *Cryptocurrency* merupakan sistem mata uang digital dimana pemakainya menggunakan pembayaran secara digital atas kegiatan bisnis yang dilakukan yang berfungsi sebagai mata uang standar, sedangkan aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Dari sisi ekonomi, *cryptocurrency* merupakan salah satu bentuk investasi yang menjanjikan di beberapa negara saat ini.¹

Di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), jumlah pengguna terdaftar aset kripto naik dari 11,2 juta pada 2021 menjadi 16,55 juta pada 2022, sedangkan nilai transaksi aset kripto mencapai 296,66 triliun pada November 2022.² Adapun demografi pengguna aset kripto di Indonesia berdasarkan wilayah, yaitu Jawa (63,6%), Sumatera (12,8%), Kalimantan (5,4%), Sulawesi (4,1%), Bali (2,6%), Nusa Tenggara Barat (1,6%), Papua (1,2%), Nusa Tenggara Timur (1,0%), Maluku (0,8%), dan lainnya (7,0%). Sulawesi sendiri tercatat berada pada peringkat 4 (empat) sebanyak 4,1%, sebagai wilayah dengan masyarakat pengguna aset kripto terbanyak.³ Berbagai data ini memberikan gambaran faktual bahwa

¹Az Zahra Zain Auralia dan Abraham Ferry Rosando, "Perlindungan Hukum Sebagai Upaya Pengembalian Hak Korban Penipuan Uang Kripto Melalui Restitusi", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Volume 3, No. 2, (Mei - Agustus 2023).

²Bappebti, "(Beritasatu.com) Hingga Agustus, Investor Aset Kripto Naik Jadi 16,1 Juta", dalam https://bappebti.go.id/pojok_media/detail/11410, diakses tanggal 24 Oktober 2023.

³Tirta Karma Senjaya, "Perdagangan, Pengawasan dan Penanganan Barang Bukti Fisik Aset Kripto Di Indonesia", Bahan Paparan FGD Penanganan Barang Bukti Berupa Aset Kripto Dalam Perkara Pidana yang diselenggarakan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Kejaksaan Agung pada tanggal 04 Oktober 2023.

potensi penggunaan aset kripto dalam tindak pidana di Indonesia dapat terjadi dalam skala besar. Data tersebut memberikan gambaran faktual bahwa potensi penggunaan aset kripto dalam tindak pidana di Indonesia dapat terjadi dalam skala besar.

Dalam tindak pidana, aset kripto sering digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana (*instrumental delicti*) atau sebagai hasil tindak pidana (*corpora delicti*), antara lain kejahatan melalui skema pembobolan email bisnis, skema *phishing*, pemerasan (*black mail*), *ransomware*, pembajakan kripto, skema ponzi, penipuan percintaan/pekerjaan, bisnis layanan keuangan tidak berlisensi, *dark web activity*, *child pornography*, *drug sales*, *weapon sales*, *terrorism sales*, dan *money laundering*.

Aset kripto merupakan barang bukti yang memiliki sifat yang sangat rentan, nilainya fluktuatif, serta mudah berubah dan dipindahtangankan. Oleh karena itu, penanganan harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Penanganan aset kripto harus memenuhi *exclusionary of rule principle* yang mewajibkan perolehan bukti dengan cara-cara yang berdasarkan hukum sehingga aset kripto menjadi barang bukti yang sah (*lawfully legal evidence*) untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana.⁴ Jaksa selaku pengendali perkara atau *dominus litis*⁵ memiliki tanggungjawab untuk menjaga integritas aset kripto sebagai barang bukti dan/atau alat bukti yang sah, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala dalam praktik penanganan aset kripto sebagai barang bukti dalam perkara pidana di Indonesia saat ini, antara lain ketidakpastian penggunaan metode konversi atau non-konversi, tahapan penanganan aset kripto, penentuan nilai aset kripto, pembebanan biaya pemindahan atau konversi terhadap aset kripto, penggunaan *wallet* atau dompet yang ideal, dan kendala lainnya yang tentunya bersifat fundamental dalam konteks hukum acara *in casu* hukum pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan suatu pemahaman yang sifatnya utuh dan komprehensif terhadap tata cara penanganan aset kripto sebagai barang bukti dalam perkara pidana sehingga pelaksanaan peradilan berjalan efektif dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pencari keadilan (*justice bellen*).

Berdasarkan pendahuluan tersebut maka artikel ini akan terfokus untuk menganalisis dan menemukan bagaimanakah penanganan aset kripto sebagai barang

⁴ Dewa Gede Giri Santosa dan Karell Mawla Ibnu Kamali, "Acquisition And Presentation Of Digital Evidence In Criminal Trial In Indonesia", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 11, No. 2, (2022): 195-218.

⁵ Muh. Ibnu Fajar Rahim, "Asas-Asas Hukum Penuntutan", The Prosecutor Law Review Volume 1, No. 1, (2023): 1-36.

bukti dalam perkara pidana. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode penafsiran gramatikal, perbandingan, otentik, sistematis, maupun doktriner.

B. PEMBAHASAN

1. Alur Transaksi Aset Kripto

Transaksi aset kripto dapat dilakukan pada *Centralized Exchange* (CEX) dan *Decentralized Exchange* (DEX). Pertama, *Centralized Exchange* (CEX). *Centralized Exchange* (CEX) merupakan platform yang tersentralisasi atau memiliki organisasi yang mengaturnya. Platform tersebut mengatur transaksi pertukaran *crypto-to-crypto*, *crypto-to-fiat*, menyimpan aset penggunaannya dan mengenakan biaya perdagangan aset kripto pada penggunaannya. Platform *Centralized Exchange* juga dapat memegang hak perwalian atas *private key* untuk bertransaksi. Transaksi yang terjadi di Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (*exchanger*), dapat berupa transaksi 1) jual beli (*trading*) aset kripto; 2) perpindahan (*transfer*) aset kripto *wallet to wallet*; atau 3) penyimpanan kripto yang memperoleh reward berupa penambahan aset kripto (*staking*). Untuk dapat melakukan transaksi tersebut:

- 1) Terlebih dahulu harus menjadi pelanggan pada Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang telah terdaftar di Bappebti dan melalui prosedur *Know Your Customer* (KYC).
- 2) Untuk dapat melakukan transaksi di Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (*exchanger*), pelanggan terlebih dahulu harus melakukan penyetoran dana (*deposit*) ke *Exchanger*. Dana yang telah disetorkan dapat terlihat pada *wallet IDR* di aplikasi *Exchanger*. Selanjutnya pelanggan dapat melakukan pembelian aset kripto menggunakan dana tersebut. Aset kripto yang telah dibeli dapat dilihat pada *wallet* kripto di aplikasi *Exchanger*. Pelanggan selanjutnya dapat melakukan penjualan aset kripto yang telah dimiliki dan dana hasil penjualannya akan tercatat kembali dalam *wallet IDR* pelanggan.
- 3) Pelanggan juga dapat melakukan pemindahan atau transfer aset kripto *wallet to wallet*. Dalam hal ini, pelanggan dapat melakukan deposit berupa aset kripto atau penarikan aset kripto ke *wallet* lain di luar *exchanger* tersebut. Untuk melakukan deposit berupa aset kripto, pelanggan dapat melakukan generate public address

wallet kriptonya, kemudian dilakukan pengiriman aset melalui public address tersebut.

- 4) Tahapan pertama dalam melakukan transaksi perpindahan Aset Kripto adalah menentukan wallet address tujuan, selanjutnya menginput jumlah aset kripto yang akan dikirimkan. Dalam proses pengiriman aset kripto dibutuhkan private key (pengirim) dan public key dari pemilik wallet untuk mengkonfirmasi identitas dari pemilik wallet.
- 5) Transaksi perpindahan aset kripto terjadi dalam jaringan blockchain dimana seluruh pengguna jaringan blockchain tersebut dapat melihat transaksi dan memverifikasi transaksi yang dilakukan. Jaringan atau koneksi pengguna ini sering disebut node.
- 6) Setelah pengirim mengirimkan transaksi, informasi transaksi akan di broadcast ke jaringan blockchain untuk kemudian dilakukan validasi oleh minners. Validasi dilakukan sebagai bentuk pencegahan fraud pada transaksi di blockchain. Transaksi yang sudah terverifikasi akan tersimpan pada Memory Pool (mempool) untuk dikonfirmasi. Konfirmasi transaksi adalah proses untuk memastikan validator/minners mendapatkan imbalan dari proses verifikasi. Semakin besar imbalan yang ditawarkan oleh pengirim maka semakin cepat transaksi tersebut akan dikonfirmasi pada mempool.
- 7) Setelah transaksi terverifikasi dan terkonfirmasi transaksi akan tercatat pada *blockchain*. Informasi transaksi yang tersimpan pada *blockchain* meliputi:
 - a) *Hash* Transaksi – merupakan kode unik yang sebagai identifier transaksi pada blockchain;
 - b) *Block Height* mengacu pada lokasi tertentu dalam blockchain, diukur dengan berapa banyak blok terkonfirmasi yang mendahuluinya;
 - c) Address Pengirim;
 - d) Address Penerima;
 - e) Jumlah yang ditransaksikan;
 - f) *Timestamps* menjelaskan waktu terjadinya transaksi yang di-*generate* secara sistem;
 - g) Imbalan (*fees*) merupakan imbalan yang ditawarkan kepada *minners* untuk memverifikasi transaksi.
- 8) Alur transaksi aset kripto yang telah diverifikasi dapat dilihat pada *blockchain* dari masing-masing koin. Penelusuran aliran dana juga dapat dilihat pada

blockchain tanpa menggunakan alat khusus karena seluruh transaksi yang telah terverifikasi dan terkonfirmasi akan tersimpan di *blockchain* dan kecil kemungkinan terjadi perubahan data. Karena apabila akan merubah data pada 50%+1 *node blockchain* yang menyimpan data transaksi.

Kedua, *Decentralized Exchange* (DEX). *Decentralized Exchange* adalah tempat pertukaran aset kripto yang mempertemukan pihak pembeli dan penjual aset kripto tanpa ada perantara, *sehingga* platform ini disebut juga sebagai *peer-to-peer exchange*. Platform *Decentralized Exchange* bersifat *non-custodial*, artinya pengguna tetap mengendalikan *private key* ketika bertransaksi. Beberapa contoh platform *Decentralized Exchange* diantaranya *Uniswap, Pancake Swap, Curve, Avalanche, Fantom, dan Polygon*.

Di Indonesia, saat ini terdapat 32 Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang menjalankan kegiatan perdagangan aset kripto (*exchanger*) dalam platform *Centralized Exchange* (CEX). Ruang lingkup kegiatan *exchanger* tersebut meliputi:

- 1) Jual dan/atau beli antara aset kripto dan mata uang rupiah;
- 2) Pertukaran antar satu atau lebih antar jenis aset kripto;
- 3) Penyimpanan aset kripto milik pelanggan aset kripto; dan
- 4) Transfer atau pemindahan aset kripto antar *wallet*.

Tahapan untuk dapat melakukan transaksi beli atau jual pada *exchanger* adalah sebagai berikut:

- 1) Mendaftar sebagai pelanggan *exchanger* melalui prosedur *Know Your Customer* (KYC).
- 2) Melakukan penyetoran dana (deposit) ke *exchanger*.
- 3) Pelanggan dapat melakukan pembelian aset kripto menggunakan dana yang telah disetorkan dengan cara:
 - a) Memilih jenis aset kripto yang akan dibeli;
 - b) Menginput jumlah aset kripto yang akan dibeli atau jumlah dana yang akan digunakan untuk membeli;
 - c) Nilai aset kripto yang telah dibeli akan tercatat pada *wallet* kripto pelanggan.
- 4) Pelanggan dapat melakukan penjualan aset kripto yang telah dimiliki dengan cara:
 - a) Memilih jenis aset kripto yang akan dijual;
 - b) Menginput jumlah aset kripto yang akan dijual.

5) Dana hasil penjualan aset kripto tersebut akan tercatat pada wallet fiat pelanggan.

Untuk dapat melakukan pemindahan/transfer aset kripto *wallet to wallet*, pelanggan harus mengetahui *wallet address* tujuan pengiriman aset kripto tersebut. Pelanggan *exchanger* dapat melakukan deposit (menerima) aset kripto melalui *wallet address* kripto pelanggan pada *exchanger* tersebut. Adapun untuk dapat melakukan penarikan aset kripto (*withdrawal*) dan memindahkan aset kripto ke platform lain di luar *exchanger*, pelanggan perlu mengetahui *wallet address* tujuannya.

Transaksi perpindahan aset kripto terjadi dalam jaringan *blockchain* dimana seluruh pengguna jaringan *blockchain* tersebut dapat melihat transaksi dan memverifikasi transaksi yang dilakukan. Setelah pengirim mengirimkan transaksi, informasi transaksi akan di *broadcast* ke jaringan *blockchain* untuk kemudian dilakukan validasi oleh *minners*. Validasi dilakukan sebagai bentuk pencegahan *fraud* pada transaksi di *blockchain*. Transaksi yang sudah terverifikasi akan tersimpan pada *memory pool (mempool)* untuk dikonfirmasi. Konfirmasi transaksi adalah proses untuk memastikan validator/*minners* mendapatkan imbalan dari proses verifikasi. Semakin besar imbalan yang ditawarkan oleh pengirim maka semakin cepat transaksi tersebut akan dikonfirmasi pada *mem-pool*.

Setelah transaksi terverifikasi dan terkonfirmasi, transaksi akan tercatat pada *blockchain*. Informasi transaksi yang tersimpan pada *blockchain* meliputi:

- 1) *Hash* transaksi – merupakan kode unik yang sebagai identifier transaksi pada *blockchain*;
- 2) Block height mengacu pada lokasi tertentu dalam *blockchain*, diukur dengan berapa banyak blok terkonfirmasi yang mendahuluinya;
- 3) Address pengirim;
- 4) Address penerima;
- 5) Jumlah yang ditransaksikan;
- 6) Time stamps menjelaskan waktu terjadinya transaksi yang di-*generate* secara sistem;
- 7) Imbalan (*fees*) merupakan imbalan yang ditawarkan kepada *minners* untuk memverifikasi transaksi.

Alur transaksi aset kripto yang telah diverifikasi dapat dilihat pada *blockchain* dari masing-masing koin. Penelusuran aliran dana juga dapat dilihat pada *blockchain* tanpa menggunakan alat khusus karena seluruh transaksi yang telah terverifikasi dan

terkonfirmasi akan tersimpan di *blockchain* dan kecil kemungkinan terjadi perubahan data. Karena apabila akan merubah data pada 50%+1 node *blockchain* yang menyimpan data transaksi.

2. Barang Bukti

Barang bukti dalam perkara pidana merupakan hak penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana bahkan determinan vital dalam pengambilan keputusan (*decision making*) atas suatu perkara yang sedang diproses baik penyidikan maupun di Pengadilan. Karena pentingnya barang bukti tersebut dapat mengatur proses penyelesaian suatu perkara, barang bukti menjadi faktor penentu dalam delik hukum atas suatu kasus atau perkara.

Pengertian barang bukti pun sangat beragam. Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk menyakinkan atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara.⁶ Barang bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan.⁷ Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁸ Barang bukti adalah benda-benda yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana.⁹ Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk menyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.¹⁰

Dalam 10 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-002 /A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi menyatakan bahwa barang bukti adalah benda sitaan dan/atau benda lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum ke

⁶ Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3 Cet 3, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 107.

⁷ Andi Hamzah, 2006, *KUHP dan KUHP*, Cet. 13, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 231.

⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, hlm. 99-100.

⁹ Djisman Samosir, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 142.

¹⁰ M. Karjadi dan R Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia, hlm. 46.

depan persidangan untuk pembuktian perkara atau terkait dengan perkara pidana yang disidangkan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang merupakan standar operasional pelaksanaan peradilan di Indonesia mengatur dalam Pasal 39 ayat (1) bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan”.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa barang bukti merupakan benda sitaan namun benda sitaan belum tentu menjadi barang bukti yang dipergunakan di persidangan.

Praktiknya, aset kripto sering digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana, antara lain melalui skema pembobolan email bisnis, skema *phishing*, pemerasan (*black mail*), *ransomware*, pembajakan kripto, skema *ponzi*, penipuan percintaan/pekerjaan, bisnis layanan keuangan tidak berlisensi, *dark web activity*, *child pornograph*, *drug sales*, *weapon sales*, *terrorism sales*, dan *money laundry*. Dengan demikian, aset kripto memenuhi syarat sebagai barang bukti yang dapat dipergunakan oleh penyidik/penuntut umum dalam proses peradilan.

Sebagai barang bukti, perolehan aset kripto harus melalui cara-cara yang sah atau dibenarkan oleh undang-undangan sebagaimana diatur dalam prinsip *exclusionary of rule* yang pada pokoknya menyatakan perolehan bukti harus melalui cara-cara yang tidak melawan hukum.

3. Prinsip-Prinsip Penanganan Aset Kripto

Aset kripto merupakan barang bukti yang harus ditangani dengan cepat dan tepat karena merupakan benda tidak berwujud, memiliki sifat yang sangat rentan, nilainya fluktuatif, serta mudah berubah dan dipindahtangankan. Penanganan

terhadap aset kripto harus memenuhi 3 (tiga) prinsip dasar. Pertama, relevansi, yakni adanya hubungan antara Aset Kripto yang disita dengan perkara yang sedang ditangani. Frasa "hubungan" bermakna bahwa aset kripto yang dipergunakan sebagai barang bukti memiliki hubungan langsung (*direct*) ataupun tidak langsung (*indirect*) dengan perkara yang sedang ditangani. Makna memiliki hubungan langsung bahwa aset kripto dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana (*instrumental delicten*) atau sebagai hasil kejahatan (*corpus delicten*). Sedangkan, aset kripto memiliki hubungan tidak langsung bermakna aset kripto yang tidak dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana (*instrumental delicten*) atau sebagai hasil kejahatan (*corpus delicten*) namun diperlukan dalam rangka mendukung pembuktian perkara. Prinsip ini bertujuan agar penyidik dan jaksa selaku penuntut umum atau eksekutor tidak melakukan penyitaan terhadap aset kripto yang berlebih-lebihan.

Kedua, keandalan, yakni aset kripto yang diperoleh memberikan hasil yang sama melalui pemeriksaan yang berulang dan/atau metode yang berbeda. Hal ini bermakna bahwa dengan metode apapun dan siapapun yang meneliti aset kripto yang disita, baik nilai hash, name address, dan hal lainnya, diperoleh kesimpulan yang sama dan tidak berbeda. Prinsip keandalan ini tidak ditujukan kepada nilai aset kripto yang fluktuatif melainkan kepada kode dan node yang ada pada aset kripto. Ketiga, kecukupan, yakni aset kripto yang dikumpulkan memenuhi kebutuhan dan tujuan penanganan perkara. Hal ini bermakna bahwa aset kripto yang disita cukup untuk dipergunakan dalam membuktikan suatu perkara.

Penanganan terhadap aset kripto dilakukan secara forensik digital yang hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara hasil pemeriksaan laboratorium forensik digital. Dalam berita acara hasil pemeriksaan laboratorium forensik digital nantinya terlihat mengenai identitas dan jumlah aset kripto yang disita.

4. Pihak-pihak yang Terlibat

Pemahaman terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam ekosistem transaksi aset kripto merupakan hal yang penting untuk mengetahui pertanggungjawaban masing-masing pihak ketika aset kripto dipergunakan dalam tindak pidana. Berikut penjelasannya:

- a. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka. Saat ini sedang

dilakukan proses peralihan regulator untuk penyelenggaraan perdagangan aset kripto di Indonesia, dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- b. Pedagang Fisik Aset Kripto (atau dikenal dengan istilah *exchanger*) adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan aset kripto baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi Pelanggan aset kripto. Sampai dengan saat ini belum terdapat perusahaan yang telah memperoleh persetujuan sebagai “Pedagang Fisik Aset Kripto”. Hal ini berkaitan dengan kondisi ekosistem aset kripto Indonesia yang masih dalam tahap integrasi. Pihak yang telah melakukan kegiatan penerimaan pelanggan dan memfasilitasi perdagangan aset kripto di Indonesia sampai dengan saat ini masih berstatus sebagai “Calon Pedagang Fisik Aset Kripto”.
- c. Penjual Aset Kripto adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan dan/atau pertukaran aset kripto.
- d. Pembeli Aset Kripto adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan aset kripto dan yang membayar atau seharusnya membayar harga aset kripto.
- e. Pemilik Aset Kripto adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak jual atau hak beli terhadap aset kripto.
- f. Digital Evidence First Responder yang selanjutnya disingkat DEFR adalah pegawai yang berkompeten atau ahli yang diberi tugas melakukan penanganan pertama terhadap aset kripto dengan tanggung jawab menangani aset kripto.

Pihak-pihak yang terlibat ini merupakan subjek hukum yang akan memainkan peran dalam penanganan aset kripto sebagai barang bukti pada perkara pidana.

5. Alat Yang Dibutuhkan/Terkait

Dalam penanganan terhadap aset kripto dibutuhkan alat-alat tertentu agar penanganan berjalan optimal. Berikut penjelasannya:

- a. *Wallet* adalah media berbentuk elektronik atau fisik yang dipergunakan untuk menyimpan aset kripto baik berupa koin atau token.
- b. *Akun* adalah identitas yang berisi nama pengguna (*username*), kata sandi (*keyword*) atau data numerik lainnya yang dimiliki oleh pemilik aset kripto yang digunakan untuk mengakses aset kripto.

- c. *Controlled Crypto Wallet* adalah *Wallet* yang berada di bawah pengendalian dan pengawasan aparat penegak hukum untuk menangani aset kripto yang disita.
- d. *Controlled Address* adalah alamat resmi yang berada di bawah pengendalian dan pengawasan aparat penegak hukum yang didapatkan dari *controlled crypto wallet* sebagai tempat penyimpanan *private key* secara *offline*.

Alat-alat tersebut merupakan alat-alat yang wajib diketahui oleh penegak hukum dalam menangani aset kripto sebagai barang bukti pada perkara pidana.

6. Penanganan

Penanganan Aset Kripto dilakukan melalui tindakan, antara lain a) pembuatan *controlled crypto wallet*; b) pemblokiran; c) pemindahan; dan c) konversi atau non konversi. Berbagai tindakan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penanganan perkara, sehingga apabila terdapat tindakan lainnya di luar tindakan-tindakan tersebut maka dapat dilakukan sepanjang memperhatikan pelaksanaan rantai pengawasan (*chain of custody*). Rantai pengawasan (*chain of custody*) adalah dokumen atau serangkaian dokumen terkait yang merincikan aktivitas yang dilakukan terhadap aset kripto.

a. Penentuan Nilai

Nilai aset kripto ditentukan oleh bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan aset kripto. Dalam hal bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan aset kripto belum dapat menentukan nilai aset kripto atau aset kripto tidak terdaftar maka nilai aset kripto ditentukan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto atau pejabat yang menyelenggarakan tata kelola barang bukti dan barang rampasan berdasarkan situs web pelacakan harga aset kripto. Situs web pelacakan harga aset kripto (*coin market cap*) merupakan situs yang menayangkan nilai aset kripto secara *real time*. Penentuan nilai aset kripto merupakan nilai *token* atau nilai *koin* yang dituangkan dalam berita acara. *Koin* adalah salah satu bentuk aset kripto yang memiliki konfigurasi *blockchain* tersendiri dan memiliki karakteristik seperti aset kripto yang muncul pertama kali, yaitu *bitcoin*. Sedangkan, *token* adalah salah satu bentuk aset kripto yang dibuat sebagai produk turunan dari *koin*.

Untuk mengetahui jumlah transaksi, nilai *hash*, waktu transaksi dilakukan, dan informasi lainnya dapat diketahui dengan melakukan penelusuran pada *Distributed Ledger Technology* (DLT). *Distributed Ledger Technology* (DLT)

merupakan tempat menyimpan transaksi seperti buku *ledger* atau buku besar akuntansi namun berbentuk digital dan dapat diakses oleh semua orang sehingga menjadi suatu *database* terdesentralisasi yang aksesnya dibagikan di seluruh jaringan di dunia antara lain *blockchain*.

b. Pembuatan *Controlled Crypto Wallet*

Jaksa/penyidik atau petugas barang bukti membuat *controlled crypto wallet* dan *controlled address* sebelum atau sesudah melakukan pemblokiran atau sebelum menerima penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti. *Controlled crypto wallet* dibuat dengan menggunakan *hardware wallet* karena sampai saat ini *hardware wallet* memberikan keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan *desktop, mobile, web* ataupun *paper wallet*, serta *hardware wallet* dilengkapi dengan sebuah aplikasi sehingga dapat membuat alamat dan memonitor jumlah saldo. *Controlled crypto wallet* sedapat mungkin yang sesuai dengan aset kripto yang akan disita dengan tujuan meminimalkan biaya pemindahan terhadap aset kripto. *Private key* terhadap *controlled crypto wallet* dan *controlled address* hanya diketahui oleh jaksa/penyidik atau petugas barang bukti.

c. Pemblokiran

Pemblokiran terhadap akun dan *wallet* pemilik aset kripto dilakukan pada saat jaksa/penyidik akan melakukan penyitaan terhadap aset kripto. Pemblokiran dilakukan oleh DEFR atas perintah jaksa/penyidik. Pemblokiran dinyatakan selesai apabila akses terhadap aset kripto hanya dapat dilakukan oleh DEFR. Pemblokiran dilakukan untuk aset kripto yang tersentralisasi (*centralized*) melalui Pedagang Fisik Aset Kripto. Terhadap aset kripto yang desentralisasi (*decentralized*) tidak dapat dilakukan pemblokiran. Aset kripto yang telah diblokir dilakukan pengamanan dengan cara memindahkan aset kripto dari *wallet* pemilik aset kripto ke *controlled crypto wallet*. Apabila diperlukan, pelaksanaan pemblokiran dapat dikoordinasikan dengan Bappebti atau lembaga terkait lainnya. Makna frasa "lembaga terkait lainnya" tersebut yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada saat peralihan tugas dan tanggungjawab dari Bappebti. Pelaksanaan pemblokiran dituangkan dalam bentuk berita acara yang disaksikan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto, Bappebti atau lembaga terkait lainnya, serta orang lain yang ada di lokasi.

d. Pemandahan

Pemindahan aset kripto bertujuan untuk melakukan kontrol dan pengamanan terhadap aset kripto. Pemindahan aset kripto dilakukan DEFR atas persetujuan jaksa/penyidik. Pemindahan aset kripto dilakukan apabila nilai aset kripto tergolong besar dan/atau pertimbangan pemanfaatan penanganan perkara. Sebelum melakukan pemindahan, dilakukan koordinasi dengan jaksa/penyidik atau petugas barang bukti untuk membuat *controlled crypto wallet* dan *controlled address*. Pemindahan aset kripto disaksikan oleh pemilik aset kripto dan/atau pihak lain yang ada di lokasi, serta didokumentasikan secara *audio visual*, yang dituangkan dalam berita acara. Aset kripto disimpan dalam bentuk aslinya pada saat dilakukan pemindahan untuk menjaga keutuhan aset kripto. Pemindahan aset kripto memperhatikan biaya transaksi yang paling cepat untuk meminimalkan potensi resiko yang dapat membahayakan penanganan terhadap aset kripto.

e. Konversi dan Non Konversi

Setelah aset kripto dipindahkan ke *controlled crypto wallet* maka aset kripto dilakukan penanganan melalui metode konversi atau metode nonkonversi. Metode konversi merupakan penanganan terhadap aset kripto yang telah dialihkan bentuk dan nilainya menjadi mata uang rupiah (tunai), sedangkan metode nonkonversi merupakan penanganan terhadap aset kripto tanpa mengubah bentuk aset kripto. Penanganan aset kripto harus mengutamakan penanganan melalui metode nonkonversi yang tidak mengubah bentuk aset kripto. Apabila terdapat kondisi aset kripto tidak terdaftar dan/atau biaya non-konversi terlalu besar (*software* dan/atau *hardware* yang dibutuhkan memiliki nilai ekonomis yang tinggi) maka dapat menggunakan metode konversi. Metode konversi dilakukan dengan cara aset kripto yang berada dalam *Controlled Crypto Wallet* dilakukan konversi dengan atau tanpa persetujuan pemilik aset kripto. Apabila pemilik aset kripto menolak untuk melakukan konversi dituangkan dalam berita acara konversi. Pelaksanaan konversi dilengkapi dengan bukti konversi (*time stamp*) dan berita acara keterangan pedagang fisik aset kripto tempat konversi dilakukan yang menerangkan tentang nilai aset kripto yang dilakukan konversi.

Apabila aset kripto telah dilakukan konversi oleh penyidik maka jaksa pada tahap prapenuntutan harus melakukan penelitian secara utuh terhadap nilai aset

kripto dengan meminta penyidik melampirkan dokumen, antara lain a) surat perintah pelaksanaan konversi; b) berita acara pelaksanaan konversi; c) berita acara persetujuan konversi dari pemilik aset kripto; dan/atau d) surat keterangan tentang nilai aset kripto yang dikonversi dari bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan aset kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto. Terhadap aset kripto yang tidak terdaftar maka surat keterangan tentang nilai aset kripto dibuat oleh pimpinan penyidik dengan menyertakan nilai aset kripto pada tanggal dan jam dilakukan konversi berdasarkan situs web pelacakan harga aset kripto.

Apabila aset kripto yang dilakukan pemblokiran merupakan aset kripto yang tidak terdaftar maka pelaksanaan konversi dapat melibatkan Bappebti atau instansi terkait lainnya. Berita acara konversi, bukti konversi (*time stamp*), surat keterangan pedagang fisik aset kripto dan/atau berita acara lainnya, dapat dijadikan sebagai alat bukti surat.

7. Permohonan Persetujuan dan Izin Penyitaan

Permohonan persetujuan atau izin penyitaan terhadap aset kripto hanya dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Permohonan persetujuan atau izin penyitaan terhadap aset kripto diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 KUHAP. Selain permohonan persetujuan penyitaan, permohonan persetujuan penyitaan terhadap aset kripto dilengkapi dengan:

- a. informasi terkait akun kripto yang menunjukkan posisi nilai/saldo, *email*, dan nomor telepon yang didaftarkan pada saat pembukaan akun kripto;
- b. bukti konversi;
- c. berita acara konversi (*time stamp*);
- d. berita acara keterangan Pedagang Fisik Aset Kripto; dan/atau
- e. berita acara pemindahan (*transfer*) aset kripto.

Permohonan persetujuan penyitaan terhadap aset kripto yang tidak dilakukan konversi berbunyi sebagai berikut: *menyatakan "telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa Aset Kripto jenis ... (jenis Aset Kripto) sejumlah ... (jumlah aset Kripto) yang berada pada akun dan Wallet ... (nama dan alamat)." Permohonan persetujuan penyitaan terhadap aset kripto yang telah dilakukan konversi berbunyi sebagai berikut: "menyatakan "telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti*

berupa Aset Kripto jenis ... (jenis Aset Kripto) sejumlah ... (jumlah Aset Kripto) yang berada pada akun dan Wallet ... (nama dan alamat) dan telah dikonversi ke mata uang rupiah senilai ... (jumlah setelah dikonversi)."

Selain permohonan izin penyitaan, permohonan izin penyitaan terhadap aset kripto dilengkapi dengan:

- a. identitas pemilik akun dan *wallet* (termasuk *email* dan nomor telepon yang didaftarkan pada saat pembukaan akun aset kripto);
- b. jenis aset kripto; dan/atau
- c. jumlah aset kripto.

Apabila aset kripto berada di luar negeri maka pengajuan permohonan persetujuan atau izin penyitaan diajukan ke Ketua Pengadilan Jakarta Pusat.

8. Pengamanan dan Pengawasan

Pengamanan dan pengawasan secara yuridis atas aset kripto menjadi tanggung jawab jaksa/penyidik pada setiap tahapan, sedangkan tanggung jawab secara fisik dan administrasi berada pada petugas barang bukti. Aset kripto yang telah melalui tahapan konversi atau non konversi beserta *controlled crypto wallet* atau *controlled address* ditempatkan di ruangan khusus dalam ruang barang bukti dan dilakukan pengawasan secara berkala. Pengawasan yang dimaksud meliputi pemeriksaan keamanan *controlled crypto wallet* atau *controlled address* dan pemeriksaan nilai aset kripto.

Apabila terdapat kecurigaan terhadap *controlled crypto wallet* atau *controlled address* sudah terpapar, jaksa/penyidik atau petugas barang bukti harus segera melaporkannya kepada pimpinan satuan kerja. Selain melakukan pengamanan dan pengawasan, petugas barang bukti melakukan pengelolaan terhadap aset kripto. Dalam melakukan pengelolaan tersebut, petugas barang bukti menunjuk 3 (tiga) orang petugas sebagai pihak yang masing-masing bertanggungjawab untuk:

- a. menjaga kerahasiaan 4 angka pertama PIN* dan tulisan ke-12 sampai ke-24 *seed phrase*;
- b. menjaga kerahasiaan 4 angka kedua PIN* dan tulisan ke-1 sampai ke-12 *seed phrase*; dan
- c. menjaga kerahasiaan PIN dan *seed phrase controlled crypto wallet* dan *controlled address*.

Seed phrase merupakan satu set kata yang terdiri dari 12, 18, atau 24 kata yang digunakan untuk membuat ulang *private key* dan berfungsi sebagai cadangan *wallet* yang bisa memulihkan dan membuat ulang semua *private key* dalam aplikasi *wallet* yang kompatibel. Petugas barang bukti dan penjaga brankas barang bukti tidak boleh petugas yang sama.

9. Pengurangan Nilai Aset Kripto

Pengurangan nilai aset kripto dan/atau biaya yang ditimbulkan akibat pemindahan dan/atau konversi dibebankan kepada nilai aset kripto yang disita. Pembebanan yang demikian merupakan konsekuensi yang telah diketahui dan dimengerti oleh pemilik aset kripto ketika menggunakan aset kripto.

Pola pembebanan tersebut merupakan praktik yang dipraktikkan oleh jaksa di Amerika Serikat sehingga apabila terdapat keberatan ataupun bantahan terhadap pola pembebanan yang demikian maka penyidik/jaksa dapat menggunakan putusan-putusan pengadilan di Amerika Serikat yang telah menangani aset kripto dengan pola yang demikian sebagai dasar untuk membantah bantahan atau keterangan tersebut. Hal ini didasarkan pada *ubi eadem ratio ibi idem lex, et de similibus idem et iudicium* yang bermakna jika terdapat alasan hukum yang sama, maka berlaku hukum yang sama. *In casu*, putusan pengadilan di Amerika Serikat yang menangani aset kripto dengan pola pembebanan yang demikian dapat dipergunakan dalam produk penuntutan di Indonesia. Pengurangan nilai aset kripto dan/atau biaya yang ditimbulkan akibat pemindahan dan/atau konversi tersebut tentunya harus dinyatakan atau dijelaskan dalam surat tuntutan.

C. PENUTUP

Aset kripto merupakan barang bukti yang memiliki sifat yang sangat rentan, nilainya fluktuatif, serta mudah berubah dan dipindahtangankan. Oleh karena itu, penanganan harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Penanganan aset kripto dimulai dari penentuan nilai, pembuatan *controlled crypto wallet*, pemblokiran, pemindahan, konversi dan non konversi, permohonan persetujuan dan izin penyitaan, pengamanan dan pengawasan, serta pengurangan nilai aset kripto. Penanganan terhadap aset kripto tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penanganan perkara. Namun demikian, penanganan aset kripto harus memenuhi *exclusionary of rule principle* yang mewajibkan perolehan bukti dengan cara-cara yang berdasarkan

hukum sehingga aset kripto menjadi barang bukti yang sah (*lawfully legal evidence*) untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana. Jaksa selaku pengendali perkara atau *dominus litis* memiliki tanggungjawab untuk menjaga integritas aset kripto sebagai barang bukti dan/atau alat bukti yang sah, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan.

Untuk menyamakan persepsi dalam penanganan aset kripto sebagai barang bukti dalam perkara pidana, diperlukan upaya kolaboratif dan sosialisasi kepada aparat penegak hukum, baik itu penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat, sehingga terdapat kepastian hukum dalam penanganan aset kripto sebagai barang bukti dalam perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Az Zahra Zain Auralia dan Abraham Ferry Rosando, "*Perlindungan Hukum Sebagai Upaya Pengembalian Hak Korban Penipuan Uang Kripto Melalui Restitusi*", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Volume 3, No. 2, (Mei - Agustus 2023).
- Bappebti, "*(Beritasatu.com) Hingga Agustus, Investor Aset Kripto Naik Jadi 16,1 Juta*", dalam https://bappebti.go.id/pojok_media/detail/11410, diakses tanggal 24 Oktober 2023.
- Tirta Karma Senjaya, "*Perdagangan, Pengawasan dan Penanganan Barang Bukti Fisik Aset Kripto Di Indonesia*", Bahan Paparan FGD Penanganan Barang Bukti Berupa Aset Kripto Dalam Perkara Pidana yang diselenggarakan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Kejaksaan Agung pada tanggal 04 Oktober 2023.
- Dewa Gede Giri Santosa dan Karell Mawla Ibnu Kamali, "*Acquisition And Presentation Of Digital Evidence In Criminal Trial In Indonesia*", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 11, No. 2, (2022): 195-218.
- Muh. Ibnu Fajar Rahim, "*Asas-Asas Hukum Penuntutan*", *The Prosecutor Law Review* Volume 1, No. 1, (2023): 1-36.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3 Cet 3, Jakarta: Balai Pustaka.

Andi Hamzah, 2006, *KUHP dan KUHPA*, Cet. 13, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Djisman Samosir, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia.

M. Karjadi dan R Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia.

Law Quote

"Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang terabaikan."

**William Ewart Gladstone FRS FSS
(Anggota Parlemen Inggris, 1809-1898)**



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Employment Agreement as A Commitment to Safeguard and Uphold the Human Rights of Indonesian Migrant Workers

Perjanjian Kerja Sebagai Upaya Perlindungan serta Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia untuk Pekerja Migran Indonesia

Ludfie Jatmiko¹, Andi Fariana²

¹ Kejaksaan Agung, Indonesia

² Perbanas Institut, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Ludfie Jatmiko SP

✉ ludfiejatmiko@yahoo.co.id

History:

Submitted: 17-04-2025

Revised: 25-04-2025

Accepted: 28-04-2025

Keyword:

Employment Agreements, Human Rights.

Kata Kunci:

Perjanjian Kerja, Hak Asasi Manusia.

Abstract

Human rights are natural that have been attached to individuals since birth and given directly by God Almighty and as a gift, World Health Organization has the right to education, health rights, employment rights, and so on. As is known, the dense population of Indonesia, increasing competition, and narrow employment and income are not as expected in addition to the growing daily needs of living, encouraging people to prefer to work abroad commonly referred to as Indonesian Migrant Workers (PMI). This fact, in fact, is not balanced by the government's ability to provide jobs that are able to absorb them. The narrowness of employment in the country has caused the lower society to turn to wider and more economically promising job opportunities abroad. On the other hand, the state is the party that is obliged to guarantee economic rights. This right is a human right today. This article discusses the concept of Employment Agreements as an Effort to Protect and Fulfill Human Rights for Indonesian Migrant Workers.

Abstrak

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang secara alami dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai anugerah. Hak-hak ini mencakup antara lain hak untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan lainnya. Di tengah tingginya jumlah penduduk di Indonesia, meningkatnya persaingan, terbatasnya lapangan kerja, serta penghasilan yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat, banyak masyarakat akhirnya memilih mencari peluang kerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Fakta ini, nyatanya, tidak diimbangi oleh kemampuan pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap mereka. Sempitnya lapangan kerja di dalam negeri ini menyebabkan masyarakat bawah berpaling pada peluang kerja di luar negeri yang lebih luas dan menjanjikan secara ekonomi. Di sisi



Copyright © 2025
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

lain, negara merupakan pihak yang wajib menjamin hak-hak ekonomi. Hak ini termasuk hak asasi dewasa ini. Artikel ini membahas terkait konsep Perjanjian Kerja Sebagai Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Migran Indonesia.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam konsep negara hukum klasik, selain adanya perlindungan terhadap hak milik individu, juga dijamin kebebasan untuk bersaing dan membuat perjanjian atau kontrak (*freedom of contract*). Namun, kebebasan dalam persaingan yang berkaitan erat dengan hak untuk berserikat dan berkontrak ini justru melahirkan kelompok-kelompok usaha besar yang memonopoli pengelolaan sumber daya alam. Akibatnya, persaingan yang seharusnya bebas justru tertekan, bahkan hilang. Maka terjadilah ironi: kebebasan yang ada justru menjadi alat untuk mengekang kebebasan itu sendiri¹.

Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia berkaitan erat dengan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia. Laju pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja, ditambah lagi dengan krisis ekonomi yang melanda, menyebabkan angka pengangguran terus meningkat. Salah satu dampak positif dari pengiriman Pekerja Migran Indonesia adalah dapat membantu menekan angka pengangguran di dalam negeri. Selain itu, keberangkatan tenaga kerja ke luar negeri juga berkontribusi terhadap pemasukan devisa negara yang dapat digunakan untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperbaiki kualitas SDM. Bagi para pekerja migran sendiri, bekerja di luar negeri memberikan keuntungan langsung berupa penghasilan yang jauh lebih tinggi dibandingkan jika bekerja di dalam negeri².

Sepanjang tahun 2023, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat kemajuan yang berarti dalam hal penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Melalui skema kerja sama antar pemerintah (*Government to Government*), sebanyak 11.967 PMI berhasil diberangkatkan, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 11.811 PMI. Sebagian besar penempatan dilakukan ke Korea

¹Bayu Prawira Putra Haryawan, *Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Di Indonesia Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Volume 2, Issue 2, June 202, hal., 426

²Amanda Graysela Mawikere, Imelda A. Tangkere, Stevan O. Voges, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017*, Lex_Privatium Vol 14. No.1 Sept 2024, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, hal. 5

Selatan dengan jumlah 11.569 PMI, disusul oleh Jepang sebanyak 314 PMI, dan Jerman sebanyak 84 PMI³. Karena itu, pemerintah berusaha untuk memfasilitasi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Menurut *International Labour Organization* (ILO), salah satu alasan yang mendorong warga negara Indonesia mencari pekerjaan di luar negeri adalah karena sulitnya mendapatkan pekerjaan di dalam negeri. Banyak sektor kerja di Indonesia telah dipenuhi oleh banyak pencari kerja, sehingga kesempatan untuk generasi tenaga kerja berikutnya menjadi sangat terbatas. Ketika ada lowongan yang tersedia, persaingan menjadi sangat ketat, dengan ratusan hingga ribuan pelamar memperebutkan satu posisi. Informasi tentang peluang kerja di luar negeri yang menjanjikan pendapatan tinggi menjadi secercah harapan bagi mereka yang kesulitan bersaing di pasar kerja domestik, serta bagi pengangguran yang menghadapi tantangan besar dalam memperoleh pekerjaan di Indonesia⁴.

Dalam penjelasan yang tertuang pada UUD 1945 Pasal 28 I ayat (4) yang menyatakan "perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Ketentuan tersebut menjadi bentuk perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia dan berlaku secara universal. Setiap warga negara memiliki kebebasan dalam memilih jenis pekerjaan, termasuk menjadi pekerja migran. Jika dilihat dari kondisi saat ini, kebutuhan hidup masyarakat yang terus meningkat seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan modernitas, mendorong banyak orang untuk mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah dinamika kehidupan yang semakin tinggi.⁵ Bekerja merupakan hak individu sekaligus hak setiap warga negara yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupannya yang layak".

Penerimaan upah yang layak adalah hak mendasar bagi semua pekerja, karena upah menjadi sumber utama pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mencapai tingkat kesejahteraan yang layak⁶. Dalam hukum internasional

³Ibid.,

⁴*International Labour Organization* (ILO), 2014, hlm 24.

⁵Sulton Fikri, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri, Morality* : Jurnal Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Desember 2022, Volume 08 Nomor 02, h. 108

⁶Tri Wibowo, *Perlindungan Hak Atas Upah Pekerja Migran Indonesia Sebagai Upaya Implementasi Tanggungjawab Negara Guna Menjamin Kesejahteraan Pekerja*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, hal. 4

pun telah ditegaskan secara jelas bahwa setiap individu berhak memperoleh pekerjaan serta menerima upah yang setara untuk pekerjaan yang sama. Ketentuan ini tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada Pasal 23 ayat ke (2) dan (3) yang menyatakan bahwasannya “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama”. Serta pada ayat (3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya”.

Berdasarkan amanat yang tercantum dalam UDHR, dapat disimpulkan bahwa pernyataannya menegaskan bahwa pekerjaan merupakan wujud nyata dari eksistensi kemanusiaan. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih jenis pekerjaannya, yang berarti bahwa penghasilan dari pekerjaan tersebut (upah) harus diberikan secara layak serta mampu memberikan dampak positif terhadap kelangsungan hidup, tanpa adanya diskriminasi dalam meraih kesejahteraan. Sejak awal diberlakukannya, UDHR secara normatif menekankan pentingnya hak setiap orang untuk memperoleh upah yang pantas, tanpa memandang jenis maupun jenjang pekerjaannya⁷.

Salah satu jenis pekerjaan yang mendapat perhatian khusus adalah menjadi pekerja migran. Profesi ini memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi, dengan berbagai potensi bahaya yang bisa terjadi selama menjalankan tugasnya. Risiko-risiko tersebut berkaitan erat dengan regulasi hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk konvensi-konvensi yang telah diratifikasi. Contoh risiko yang dihadapi oleh pekerja migran antara lain adalah kekerasan fisik dan pelecehan seksual dari majikan. Jika ditelaah lebih dalam, pekerja migran—terutama perempuan—merupakan kelompok yang sangat rentan. Dalam kenyataannya, perempuan yang bekerja sebagai migran memiliki potensi besar menjadi korban kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan bentuk pelanggaran lainnya.

Pekerja, meskipun merupakan kelompok mayoritas, pada dasarnya termasuk dalam kategori kelompok rentan karena hubungan kerja yang dijalani umumnya bersifat subordinatif dalam kontrak kerja⁸. Dalam sistem kapitalisme, anggapan bahwa terdapat

⁷Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM (Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)*, PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hlm.183

⁸Secara normatif, hubungan buruh dan pemberi kerja itu bersifat subordinat. Memang, dalam UU No.13/2003 kita tidak menjumpai kedudukan “subordinat” buruh ini. Namun, hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja, salah satu prestasi berupa pekerjaan tertentu yang dipersyaratkan pihak lain (pemberi kerja atau pengusaha), itu dapat dimaknai perintah. Terlebih lagi, meski bukan kajian wilayah hukum, jika ditinjau dari sisi politis dan ekonomi, kejomplangan antara lapangan pekerjaan dan kuantitas pencari kerja dan/atau buruh akan

kesetaraan dalam kontrak antara pemberi kerja dan pekerja pada kenyataannya hanyalah ilusi⁹. Karena itu, peran negara dalam memenuhi hak-hak asasi di bidang ekonomi merupakan kewajiban positif (*positive duties*) dalam hukum hak asasi manusia. Ini berarti pemerintah memiliki tanggung jawab untuk turut serta secara aktif dalam mewujudkan keadilan, terutama dengan memastikan bahwa hak-hak kelompok rentan terlindungi dan terpenuhi¹⁰.

Secara umum, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia melalui upaya pengaturan, pembinaan, pengawasan, serta menjamin terpenuhinya hak-hak kesejahteraan mereka. Selanjutnya, merujuk pada Peraturan BP2MI Nomor 04 Tahun 2020, disebutkan bahwa Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berperan dalam menjalankan kebijakan terkait pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara menyeluruh dan terkoordinasi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia dari segala bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan ini diwujudkan melalui jaminan hukum yang kuat serta pengaturan menyeluruh terhadap seluruh tahapan proses migrasi, mulai dari tahap pra-keberangkatan, masa bekerja di luar negeri, hingga kepulangan ke Indonesia¹¹.

Secara normatif, dasar hukum utama dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini merupakan bentuk pelimpahan kewenangan dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena PMI bekerja di luar wilayah hukum Indonesia, maka Pasal 34 dalam UU No. 13 Tahun 2003 memberikan mandat untuk pengaturan lebih lanjut. Dengan demikian, UU No. 13 Tahun 2003 dapat diibaratkan sebagai "undang-undang induk" yang melahirkan undang-undang baru. Pasal 34 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b harus diatur melalui undang-undang

menciptakan surplus sumber daya yang bisa dipekerjakan. Hukum ekonomi yang menyerahkan mekanisme ke pasar (*liberation of market*) menyatakan bahwa permintaan (dalam hal ini tenaga kerja yang melimpah) tidak dimbangi ketersediaan (dalam hal ini penyerapan pasar lapangan kerja), akan menciptakan rendahnya harga komoditas (dalam hal ini upah sumber daya buruh)

⁹Ikhwan Farojih, 2016, *Hukum Perburuhan: Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional*, Setara Press, Malang, hal. 2

¹⁰Agung Hidayat, *Konsep Perjanjian Kerja Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Menurut UU No.18/2017*, hal. 2

¹¹Adnan Hamid, *Menuju Kebijakan yang Adil Bagi Pekerja Migran*, FHUP Press, Jakarta, 2018, h.4

tersendiri. Pelaksanaan dari ketentuan ini melahirkan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang kemudian disempurnakan melalui UU No. 18 Tahun 2017¹².

Pasal 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 menekankan bahwa tujuan utama dari pengesahan undang-undang ini adalah untuk memastikan terpenuhinya serta penegakan hak-hak asasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial bagi PMI beserta keluarganya. Dalam undang-undang yang sama, disebutkan pula bahwa kewajiban serta jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak PMI diberikan sejak awal proses migrasi sejak “sebelum¹³, selama¹⁴, dan setelah bekerja¹⁵. Meskipun demikian, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tidak memuat satu pun pasal yang menetapkan kewajiban bagi pengguna jasa PMI, yang pada umumnya merupakan pihak asing dan bukan subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini dapat dipahami mengingat hubungan hukum antara PMI dan pihak pengguna jasa terjadi di luar wilayah yurisdiksi hukum Indonesia. Lebih jauh, menurut prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Deklarasi Maastricht, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak terkait pekerjaan. Berdasarkan prinsip tersebut, sudah seharusnya Pemerintah Indonesia mampu memberikan perlindungan bagi tenaga kerjanya, tanpa memandang lokasi penempatan maupun jenis pekerjaan yang dijalani, demi tercapainya tujuan bersama berupa kesejahteraan masyarakat¹⁶.

Agar Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak semakin berada dalam kondisi yang rentan, diperlukan adanya perlindungan hukum yang memadai bagi mereka. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, perjanjian kerja tidak hanya berfungsi untuk

¹²Agung Hidayat, *Op. Cit.*, hal. 4

¹³Bentuk perlindungan hukum sebelum bekerja bagi PMI meliputi: (i) perlindungan administratif, dan (ii) teknis (Ps. 8 UU PMI). Hak PMI sebelum bekerja secara administratif berupa hak atas kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan kerja; dan penetapan kondisi kerja (Ps. 8 ayat (2) UU PMI). Adapun hak PMI yang bersifat teknis adalah: mendapatkan sosialisasi terkait dan diseminasi informasi, mendapatkan pelatihan kerja oleh pihak-pihak terkait, jaminan sosial, pembinaan dan pengawasan, dll (Periksa Ps. 8 ayat (3) UU PMI)

¹⁴Bentuk perlindungan hukum selama bekerja bagi PMI terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) UU No.18/2017, meliputi: pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk, pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja, mendapatkan hak fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan, mendapatkan layanan jasa kekonsuleran; pendampingan, mediasi, dan bantuan hukum oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum yang berlaku di negara penempatan kerja, pembinaan selama penempatan kerja, dan hak atas repatriasi

¹⁵Bentuk perlindungan hukum setelah bekerja bagi PMI terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) UU No.18/2017, meliputi: fasilitasi kepulangan sampai daerah asal; penyelesaian hak-hak PMI yang belum terpenuhi; dipenuhinya hak pengurusan PMI yang sakit dan/atau meninggal dunia; rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan pemberdayaan PMI dan keluarganya.

¹⁶Tri Wibowo, *Op. Cit.*, hal. 6

melindungi PMI saja, tetapi juga memberikan perlindungan bagi pihak pemberi kerja. Dalam perjanjian tersebut diatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian kerja ini dalam Bahasa Belanda disebut *Individuele Arbeids Overeenkomst* (IAO), dan dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai *Individual Labour Agreement* (ILA). Disebut "individu" karena perjanjian ini dibuat dan disepakati antara dua pihak secara pribadi. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, maka lahirlah konsekuensi hukum yang mengikat kedua belah pihak, baik PMI maupun pemberi kerja.

Perjanjian kerja berfungsi sebagai landasan hukum awal sekaligus acuan hukum terakhir bagi para pihak yang terlibat apabila muncul sengketa dalam pelaksanaan hubungan kerja. Dengan adanya kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, tercipta rasa aman dan perlindungan hukum yang mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih efisien dan produktif.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa Perjanjian kerja yang bagaimanakah yang memberikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Migran Indonesia menjadi fokus utama dari rumusan masalah ini, yang selanjutnya akan menjadi kerangka pemikiran dalam pembahasan pada bagian-bagian berikutnya.

3. Metode Penelitian

Penulisan ini memakai metode penelitian hukum normatif, yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menghimpun bahan-bahan hukum serta menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku, dan berbagai referensi lainnya. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, artikel, serta situs web. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis oleh penulis sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

B. PEMBAHASAN

1. Jenis Perlindungan Upah bagi Pekerja Migran Indonesia

Tak dapat disangkal bahwa pekerja migran, di mana pun mereka berada, berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap perlindungan hukum dari negara asal saat mereka ditempatkan di luar negeri. Status mereka sebagai tenaga kerja migran secara

inheren menempatkan mereka dalam situasi yang rawan, terlebih jika dikaitkan dengan sektor pekerjaan serta lokasi penempatannya, yang bisa menambah tingkat kerentanannya terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan. Sektor informal, misalnya, dinilai sebagai salah satu sektor dengan tingkat kerentanan tertinggi dalam hal perlindungan hak-hak pekerja.

Secara umum, terdapat empat permasalahan utama yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia, salah satunya adalah ketimpangan dalam penerapan standar minimum upah. Sebagian besar pekerja migran Indonesia belum menerima upah yang sesuai dengan standar di negara tujuan, dan juga belum memperoleh hak-hak yang setara dengan pekerja lokal. Hal ini bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menegaskan bahwa “pekerja migran Indonesia berhak memperoleh upah sesuai dengan standar yang berlaku di negara penempatan”¹⁷. Oleh karena itu, untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tenaga kerja migran, pemerintah pusat memegang peranan penting sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, yaitu dengan memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran secara maksimal di negara tujuan. Bentuk konkret dari jaminan ini dapat diwujudkan melalui upaya optimal dalam merumuskan kebijakan perlindungan pekerja migran, termasuk hak atas upah yang layak sesuai standar di negara penempatan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga, sesuai dengan amanat undang-undang, berkewajiban menjalin kerja sama internasional guna menjamin perlindungan hak atas upah tersebut. Hal ini dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan luar negeri, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia¹⁸.

2. Langkah-Langkah Negara dalam Menjamin Kesejahteraan Tenaga Kerja Migran

Pekerja migran seharusnya memperoleh jaminan dari negara atas kesejahteraan mereka, tanpa memandang lokasi maupun jenis pekerjaan yang mereka jalani. Kennet Thomson, *Secretary-General of International Social Security Association (ISSA)* pada tahun 1980, Jaminan sosial dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh masyarakat melalui negara kepada warganya

¹⁷Soerjono Soekanto, Penelitian *Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13

¹⁸Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2021 tentang *Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*

untuk menghadapi risiko-risiko tertentu, dengan tujuan mencegah terjadinya situasi yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya sebagian besar pendapatan. Yang paling penting, negara diharapkan mampu menyediakan layanan kesehatan dan/atau bantuan keuangan untuk mengatasi dampak ekonomi dari risiko tersebut, termasuk pemberian tunjangan bagi keluarga¹⁹.

Bentuk konkret dari upaya pemerintah dalam menjamin perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dapat dilihat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pemerintah, melalui perlindungan ketenagakerjaan, bertanggung jawab melindungi seluruh kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia beserta keluarganya, guna memastikan terpenuhinya hak-hak mereka dalam setiap tahap—sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja—meliputi aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk menerima upah yang layak sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga pekerja migran, berdasarkan prinsip keadilan dalam sistem pengupahan²⁰.

Landasan berikutnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam kedua undang-undang tersebut, pemerintah telah menetapkan pasal-pasal khusus yang mengatur tentang jaminan sosial, serta memuat tugas dan tanggung jawab negara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi para pekerja migran.

Sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah pusat dalam menjamin kesejahteraan para pekerja, pemerintah melalui program BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan perlindungan atas hak-hak pekerja migran, sehingga mereka tidak lagi diwajibkan menggunakan layanan asuransi swasta. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menyatakan bahwa “Dalam rangka memberikan perlindungan

¹⁹Sentanoe Kertonegoro, 2000, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara, Jakarta, hlm. 29.

²⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

kepada Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Pusat menyelenggarakan program Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia beserta keluarganya²¹.Selanjutnya, undang-undang ini menitikberatkan pada peningkatan peran pemerintah pusat dalam proses penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sekaligus membatasi keterlibatan pihak swasta dalam upaya tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih pasti bagi para pekerja yang akan bekerja di luar negeri.

Jaminan sosial yang dimaksud dalam konteks ini dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas, jaminan sosial yang wajib disediakan oleh pemerintah pusat untuk Pekerja Migran Indonesia mencakup hal-hal berikut:

- Pencegahan dan pengembangan, mencakup layanan di bidang kesehatan, keagamaan, pendidikan, keluarga berencana, bantuan hukum, dan aspek lainnya yang termasuk dalam kategori pelayanan sosial;
- Pemulihan dan penanganan, seperti bantuan bagi korban bencana alam, lansia, anak yatim piatu, penyandang disabilitas, serta individu dengan kebutuhan khusus, yang tergolong dalam bantuan sosial (*social assistance*);
- Pembinaan, yang meliputi upaya peningkatan gizi, pengembangan usaha, program transmigrasi, penguatan koperasi, dan inisiatif lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai infrastruktur sosial (*social infrastructure*).

Sementara itu, dalam arti yang lebih sempit, jaminan sosial yang dimaksud mengacu pada upaya-upaya perlindungan di bidang ketenagakerjaan, baik dalam bentuk bantuan sosial maupun asuransi sosial, yang diberikan ketika Pekerja Migran Indonesia tidak menerima upah yang layak, atau bahkan dalam kondisi yang lebih buruk, tidak memperoleh upah sama sekali²².

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, diharapkan pemerintah dapat secara maksimal memberikan perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia, yang sebelumnya menjadi tanggungan asuransi swasta. Program Jaminan Sosial ini kemudian tergabung dalam konsorsium asuransi yang mencakup perlindungan selama tiga tahap, yaitu sebelum keberangkatan (pra-penempatan), selama masa kerja (penempatan), dan setelah masa kerja selesai (purna penempatan) di negara tujuan. Penyelenggaraan jaminan ini dilakukan oleh

²¹Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

²²Zainal Asikin, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 101.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Untuk menangani risiko-risiko tertentu yang tidak dijamin oleh program Jaminan Sosial, BPJS juga dapat menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun swasta.

3. Konsep Hubungan Kontraktual antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja.

a. Definisi, Ketentuan, dan Prinsip-Prinsip Dasar dalam Perjanjian Secara Umum

Berdasarkan pandangan bahwa hukum merupakan suatu sistem, maka hubungan kerja dan perjanjian kerja antara Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan Pemberi Kerja termasuk dalam ranah hukum perjanjian atau kontrak secara umum²³.

Secara yuridis, pengertian perjanjian dapat ditemukan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Dalam kajian hukum (doktrin), terdapat perbedaan pandangan di kalangan ahli hukum Indonesia. Sebagian berpendapat bahwa istilah "perjanjian" berasal dari kata *verbintenis* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1233 BW, sementara lainnya menyatakan bahwa istilah tersebut merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* dalam Pasal 1313 BW. Wirjono Prodjodikoro, misalnya, mengartikan "perjanjian" sebagai padanan dari *verbintenis*, sedangkan *overeenkomst* ia terjemahkan sebagai "persetujuan"²⁴. R. Subekti Mengartikan *verbintenis* sebagai perikatan atau kewajiban utang, dan *overeenkomst* sebagai kesepakatan atau perjanjian²⁵. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, sebagaimana dikutip Endro Martono, mengistilahkannya 'verbintenis bersinonim dengan perutangan²⁶. Sedangkan R. Subekti Menafsirkannya sebagai suatu kejadian di mana seseorang memberikan janji kepada orang lain, atau di mana dua pihak saling berjanji untuk melakukan

²³Tri Wibowo, *Op. Cit.*, hal. 8

²⁴Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Tentang Perjanjian Tertentu*, Alumni, Bandung, hal. 11.

²⁵R. Subekti, 1994, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Citra Aditya, Bandung, hal. 12-13.

²⁶Endro Martono, 2017, *Hukum Kontrak dan Perkembangannya*, Pustaka Itizam, Solo, hal. 29

suatu tindakan²⁷. Secara epistemologis, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menimbulkan konsekuensi hukum²⁸. Kartodiningrat mengartikannya: Sebuah tindakan hukum yang didasarkan pada kesepakatan antara dua pihak atau lebih, dengan tujuan menimbulkan akibat hukum yang diakui oleh peraturan perundang-undangan²⁹.

Dalam suatu perjanjian, terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut dianggap sah menurut hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syarat tersebut meliputi: (i) adanya kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian, (ii) kemampuan hukum para pihak (sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata), (iii) objek atau hal tertentu yang menjadi pokok perjanjian (*cenbeepaald onderwerp*), dan (iv) adanya sebab yang sah. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif³⁰.

Dalam suatu perjanjian, terdapat sejumlah asas yang harus dipenuhi, salah satunya adalah: (i) asas kebebasan berkontrak. Pada dasarnya, sistem hukum perjanjian di Indonesia menganut prinsip bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk membuat dan menyusun isi perjanjian sesuai kehendak mereka (*beginsel der contract vrijheid*)³¹. Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya; (ii) asas konsensualisme, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yang menyebutkan adanya "kesepakatan mereka yang mengikatkan diri". Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian dapat dibuat baik secara tertulis maupun lisan; (iii) asas kepastian hukum³², dan (iv) asas itikad baik.

²⁷R. Subekti, *Loc. Cit*

²⁸Sudikno Mertokusumo (ii), 2011, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 83.

²⁹K.R.M.T Tirtodiningrat, 1966, *Iktisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, cet. Ke-9, Pembangunan, Jakarta, hal. 83

³⁰Tri Wibowo, *Op. Cit.*, hal. 9

³¹Mukhidin, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku", *Mimbar Hukum* Volume 21, Nomor 1, February 2009, <http://e-journal.upstegal.ac.id>> download, diakses pada 21 Mei 2018

³²Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Pacta Sun Servanda dalam Perjanjian Internasional*, <http://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16252/10798>, diakses pada 22 Mei 2018.

b. Esensi Hukum Ketenagakerjaan, Definisi serta Jenis Perjanjian Kerja antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja.

Pada hakikatnya, hubungan kerja merupakan ikatan antara pekerja dan pengusaha yang terbentuk setelah adanya kesepakatan antara keduanya. Dalam kesepakatan tersebut, pekerja menyatakan kesediaannya untuk bekerja dengan menerima upah, sementara pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja serta memberikan imbalan berupa gaji³³.

Hakikat hukum perburuhan, dengan menilik rumusan Pasal-Pasal dalam UU yang mengatur tentang perburuhan, dengan hadirnya peran negara, dengan demikian, bisa dipahami bahwa hukum perburuhan bukan hanya bersifat privat namun juga bersifat publik. Aspek hukum publik dalam perlindungan terhadap buruh mencakup beberapa elemen yang berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara atau Tata Usaha Negara, seperti proses perizinan, pengesahan peraturan perusahaan, penetapan upah minimum, pencatatan perjanjian kerja bersama, serta pendaftaran serikat pekerja dan hal-hal sejenis lainnya.³⁴

Ada pula Pasal-Pasal berkaitan pidana bagi pelanggarnya, dalam hal ini tentu tercakup juga hukum pidana. Dapat disimpulkan bahwa hukum ketenagakerjaan mencakup unsur-unsur dari hukum perdata dan hukum administrasi /hukum tata usaha negara dan hukum pidana³⁵. Hukum ketenagakerjaan merupakan cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri karena memadukan unsur hukum privat dan hukum publik secara bersamaan.

Perjanjian Kerja sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 adalah kesepakatan tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang mencakup ketentuan mengenai syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta jaminan atas keselamatan dan keamanan selama masa kerja, yang disusun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada UU No. 18/2017 belum menjelaskan secara eksplisit terkait model perjanjian antara PMI dengan Pemberi Kerja. Maka dari itu, kita harus menengok pada UU No.13/2003. Jenis Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, hubungan kerja dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu: (i) Perjanjian

³³Imam Soepomo, 1999, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, hal. 88.

³⁴Ikhwan Fahrojih, *Op.Cit*, hal. 4.

³⁵Ibid.

Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) dan (ii) Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 ayat (1). Dalam konteks pembahasan ini, yang menjadi fokus adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pemberi Kerja. Mengacu pada Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, jangka waktu perjanjian kerja dimaksud ditentukan melalui kesepakatan tertulis antara PMI dan Pemberi Kerja, dan dapat diperpanjang.

Pengaturan terkait PKWT diatur dalam Pasal 56 ayat (2) sampai dengan Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003. Pasal 56 ayat (2) menyatakan bahwa PKWT adalah perjanjian kerja yang didasarkan pada jangka waktu tertentu atau sampai selesainya suatu pekerjaan tertentu. Selanjutnya, Pasal 59 ayat (3) menyebutkan bahwa PKWT dapat diperpanjang atau diperbaharui. Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja antara PMI dan Pemberi Kerja termasuk dalam kategori PKWT.

Pasal 59 ayat (1) mengatur bahwa hanya jenis pekerjaan yang bersifat sementara atau diperkirakan selesai dalam waktu tertentu yang dapat dijadikan dasar untuk PKWT. Jenis pekerjaan ini meliputi pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu relatif singkat dan paling lama tiga tahun, pekerjaan musiman, serta pekerjaan terkait produk baru, aktivitas baru, atau produk tambahan yang masih dalam tahap uji coba atau penjajakan. Penjelasan resmi dari pasal ini juga mengatur bahwa PKWT wajib didaftarkan pada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Di samping itu, dalam bentuk PKWT tidak diperbolehkan masa percobaan. Adapun pengertian Pemberi Kerja sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 11 UU yang sama, yaitu: (i) instansi pemerintah, (ii) badan hukum pemerintah, (iii) badan hukum swasta, (iv) atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan PMI.

c. Asas Pacta Sunt Servanda (Perjanjian Mengikat Seperti Undang-Undang)

Dalam konteks penegakan hukum internasional, kewajiban yang dibebankan kepada subjek-subjek hukumnya, termasuk negara, juga berkaitan erat dengan kewajiban moral. Negara, dengan itikad baiknya, diharapkan melaksanakan seluruh ketentuan hukum internasional—baik yang bersumber dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum

umum, maupun norma-norma hukum internasional lainnya yang telah disepakati bersama masyarakat internasional³⁶.

Dalam konteks perjanjian internasional, negara-negara memiliki kewajiban untuk melaksanakannya berdasarkan prinsip fundamental yang dikenal sebagai *pacta sunt servanda*. Prinsip ini merupakan salah satu asas tertua dalam hukum internasional, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian tetap wajib dijalankan meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai sifat ketentuan yang bersifat mutlak maupun syarat-syarat yang secara hukum bisa diabaikan. Berdasarkan prinsip ini, negara berkewajiban memenuhi semua komitmennya sesuai isi perjanjian. *Pacta sunt servanda* juga menjadi prinsip utama dalam hukum internasional dan telah diakui dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, yang menyatakan bahwa "Setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik"

Dengan demikian, berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*, negara-negara yang menjadi pihak dalam konvensi-konvensi internasional tentang hak asasi manusia memiliki kewajiban, baik secara hukum maupun moral, untuk menjalankan setiap ketentuan yang tercantum dalam konvensi tersebut. Kewajiban tersebut mencakup tanggung jawab untuk menghormati (*duty to respect*), menjamin (*duty to ensure*), dan menegakkan atau melindungi (*duty to enforce/protect*) hak asasi manusia. Oleh karena itu, prinsip ini menjadi landasan bagi setiap negara untuk memberikan perlindungan HAM kepada seluruh warganya, meskipun mereka berada di luar wilayah negara tersebut. Sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, Indonesia juga terikat untuk memenuhi kewajiban melindungi hak asasi manusia warga negaranya sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*..

4. Sistem Perlindungan Hukum untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Upaya perlindungan bagi PMI pada hakikatnya Merupakan suatu sistem perlindungan yang melibatkan berbagai sektor. Pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme ini meliputi: (i) Pemerintah Pusat; (ii) Pemerintah Daerah; (iii) Atase

³⁶Soemaryo Suryokusumo. 2003. "Aspek Moral dan Etika dalam Penegakan Hukum Internasional". Makalah. Seminar tentang "Pembangunan Hukum Nasional VIII diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, Denpasar, 14-18 Juli 2003. Sudikno Mertokusumo. 2007. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty

Ketenagakerjaan atau pejabat luar negeri yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat; (iv) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI); (v) Mitra Kerja di negara tujuan; serta (vi) individu di negara tempat PMI bekerja. Perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas kesejahteraan melalui sistem Jaminan Sosial. Pemenuhan hak-hak tersebut dimulai sejak adanya Perjanjian Kerja antara PMI dan Pemberi Kerja.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia mencakup tiga tahap utama, yaitu sebelum keberangkatan, selama bekerja, dan setelah masa kerja berakhir. Secara umum, bentuk perlindungan ini terbagi menjadi dua jenis: administratif dan teknis. Perlindungan administratif mencakup: (i) jaminan atas kelengkapan dokumen, dan (ii) keabsahan dokumen serta penetapan syarat dan kondisi kerja. Sementara itu, perlindungan teknis meliputi: (i) hak atas sosialisasi dan penyebaran informasi, (ii) peningkatan kompetensi Calon PMI melalui pelatihan dan pendidikan kerja, (iii) jaminan sosial, (iv) fasilitasi keberangkatan ke negara tujuan, (v) penguatan peran petugas fungsional pengantar kerja, (vi) pelayanan penempatan melalui sistem layanan terpadu satu atap, dan (vii) kegiatan pembinaan serta pengawasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 18 Tahun 2017.

5. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

Hak dan kewajiban muncul sebagai konsekuensi dari hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan atau prestasi tertentu yang ingin dicapai bersama. Ketika satu pihak menjalankan kewajibannya, maka pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi hak pihak tersebut, dan sebaliknya. Dalam konteks hubungan kerja, prinsip ini berlaku sebagai hal yang tidak terhindarkan bagi para pihak yang terlibat dalam kesepakatan kerja. Pemberi kerja memiliki hak untuk memanfaatkan tenaga dan kemampuan yang dimiliki oleh pekerja, sementara di sisi lain, ia juga berkewajiban memberikan upah sebagai bentuk imbalan atas hak tersebut. Sebaliknya, pekerja wajib mengerahkan kemampuannya dan berhak atas kompensasi berupa upah.³⁷

³⁷Siti Maizul Habibah, *Jaminan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Rumah Tangga melalui Perjanjian Kerja di Surabaya* Article in *Jurnal HAM* · August 2021. Hal. 249

Pelaksanaan hak dan kewajiban tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala. Hambatan ini bisa muncul baik dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban itu sendiri, maupun dalam menjaga keseimbangan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk mencapai tujuan atau prestasi yang telah disepakati. Oleh karena itu, peran hukum menjadi penting dengan hadirnya berbagai instrumen yang mengatur tata cara pelaksanaan serta pemenuhan hak dan kewajiban tersebut. Instrumen hukum ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, memberikan manfaat bagi para pihak, mencegah terjadinya konflik, serta mewujudkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat³⁸.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari pihak Pemberi Kerja maupun Pekerja Migran Indonesia (PMI), perlu diterapkan dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM). Dari sudut pandang pekerja, hubungan kerja seharusnya dilihat melalui perspektif HAM, di mana pemenuhan hak-hak dasar harus diberikan kepada seluruh pekerja tanpa membedakan status mereka—apakah sebagai pekerja tetap maupun pekerja dengan sistem kerja yang fleksibel—berdasarkan asas non-diskriminasi. Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa HAM berperan sebagai dasar dalam pengaturan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja.

6. Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Kesepakatan Kerja.

Perjanjian memiliki peranan penting dalam menjamin terlaksananya keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan. Dalam Kamus Hukum, perjanjian diartikan sebagai kesepakatan atau persetujuan antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Jika perjanjian tersebut dituangkan secara tertulis, maka disebut sebagai kontrak. Sementara itu, menurut teori perjanjian yang dikemukakan oleh Van Dunne, perjanjian adalah sebuah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menimbulkan konsekuensi hukum.³⁹ Selain itu menurut Yahya Harahap, Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum dalam ranah hukum perdata yang berkaitan dengan kekayaan, yang melibatkan dua

³⁸Ibid

³⁹Rika Putri Subekti, “Urgensi Ratifikasi Konvensi International Labor Organization: Perspektif Perlindungan Pekerja Anak Pada Sektor Rumah Tangga,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 1 (2018): 24–36

pihak atau lebih, di mana satu pihak memperoleh hak dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi tertentu ⁴⁰ Dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, untuk melaksanakan suatu prestasi yang menimbulkan konsekuensi hukum. Demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat, akan lebih baik jika perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis atau kontrak. Berdasarkan sifatnya, perjanjian antara Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pemberi Kerja merupakan perjanjian timbal balik yang menciptakan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Perjanjian ini juga tergolong sebagai perjanjian dua pihak (bersegi dua) karena memiliki dampak hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, baik PMI maupun Pemberi Kerja.

Perjanjian yang memiliki kekuatan hukum mengikat adalah perjanjian yang sah, yaitu perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk dianggap sah, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus yang ditetapkan oleh hukum.. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Pasal 1320 KUHPerduta berbunyi:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta merupakan syarat umum, yaitu:

Pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan sepakat adalah kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seias-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu⁴¹. Apa yang diinginkan oleh satu pihak juga diinginkan oleh pihak lainnya, sehingga terdapat kesamaan kehendak secara timbal balik. Dalam konteks hubungan antara Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pemberi Kerja, kesepakatan tercapai ketika terjadi

⁴⁰Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2012)

⁴¹Ibid.,

pertemuan kehendak dari kedua belah pihak, yang secara bersama-sama menyetujui hal-hal pokok yang tercantum dalam perjanjian kerja.

Kedua, Mampu secara hukum untuk melakukan suatu perikatan, yang dimaksud dengan kecakapan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 1329 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: "Setiap orang dianggap cakap untuk membuat perikatan, kecuali jika undang-undang menyatakan sebaliknya." Menurut Abdul Kadir Muhammad, secara umum setiap individu yang telah dewasa dan memiliki akal sehat dianggap cakap menurut hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian merujuk pada Pasal 1330 KUHPerdata adalah: "Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- a. Individu yang belum mencapai usia dewasa; menurut Pasal 330 KUH Perdata, seseorang dianggap dewasa apabila telah berusia 21 tahun. Dengan demikian, siapa pun yang usianya masih di bawah 21 tahun dianggap belum dewasa. Dianggap tidak memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, batas usia dewasa diubah menjadi 18 tahun, khususnya bagi mereka yang telah menikah. Ketentuan ini berlaku secara menyeluruh bagi seluruh warga negara Indonesia. Penetapan usia dewasa 18 tahun juga telah diperkuat melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 477 K/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976. Oleh karena itu, selain individu yang telah berusia 21 tahun, mereka yang telah mencapai usia 18 tahun juga dianggap telah cakap secara hukum untuk membuat perjanjian.
- b. Salah satu syarat agar suatu perjanjian dianggap sah adalah adanya unsur mengenai hal tertentu. Yang dimaksud dengan hal tertentu di sini adalah objek dari perjanjian tersebut. Sebuah perjanjian harus memiliki objek yang jelas (*bepaald onderwerp*), atau setidaknya objek tersebut dapat ditentukan secara spesifik.
- c. Meskipun undang-undang tidak secara eksplisit mendefinisikan apa itu sebab (*causa*), namun dalam praktik yurisprudensi, *causa* diartikan sebagai tujuan atau isi dari suatu perjanjian. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa: "Perjanjian yang tidak memiliki sebab, atau dibuat dengan sebab yang palsu atau bertentangan dengan hukum, tidak memiliki kekuatan hukum." Sementara itu, menurut Pasal 1337 KUH Perdata, yang dimaksud dengan sebab yang terlarang adalah alasan yang dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan, atau menyalahi ketertiban umum. Jika suatu perjanjian dibuat

berdasarkan sebab yang demikian, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Dalam konteks ini, perjanjian kerja antara Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pemberi Kerja tidak termasuk dalam kategori terlarang, serta tidak bertentangan dengan norma kesusilaan maupun ketertiban umum.

Aspek penting lainnya terkait keabsahan suatu perjanjian adalah mengenai bagaimana dan kapan perjanjian tersebut dapat dinyatakan berakhir. Menurut Suharnoko⁴², Suatu perjanjian dianggap berakhir apabila seluruh hal yang tercantum dalam isi perjanjian telah dilaksanakan sepenuhnya. Dengan kata lain, kesepakatan antara para pihak dinyatakan selesai ketika tujuan utama dari dibuatnya perjanjian tersebut telah tercapai⁴³. Dalam konteks perjanjian antara Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pemberi kerja, perjanjian tersebut dianggap selesai apabila kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak telah terlaksana, atau kepentingan kedua belah pihak telah terpenuhi. Selain itu, berakhirnya masa berlaku perjanjian juga menjadi salah satu indikator berakhirnya perjanjian tersebut. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban antara PMI dan pemberi kerja dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan dengan baik, terutama untuk melindungi PMI yang kerap mengalami perlakuan yang tidak adil.

Lawrance Friedman dalam teorinya Ditegaskan bahwa dalam sistem hukum terdapat tiga subsistem yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum secara menyeluruh. Ketiga subsistem tersebut meliputi *legal substance* (substansi hukum), *legal structure* (struktur hukum, mencakup pembuat dan penegak hukum), serta *legal culture* (budaya hukum). Ketiganya harus berjalan secara selaras dan saling mendukung demi mewujudkan tujuan utama hukum, yaitu menjamin kepastian hukum (yakni kepastian akan hak dan kewajiban), memberikan manfaat bagi masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keteraturan, serta mewujudkan keadilan.⁴⁴.

C. PENUTUP

Kesimpulan Dari analisis terhadap objek kajian di atas, penulis di akhir tulisan ini menyimpulkan sebagai berikut:

⁴²Siti Maizul Habibah, *Op. Cit.* hal.255

⁴³Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

⁴⁴Lawrence M. Friedman and Grant M. Hayden, *American Law: An Introduction, American Law: An Introduction*, 2017

- 1) Dalam UU No. 18/2017 tidak menjelaskan secara eksplisit terkait model perjanjian antara PMI dengan Pemberi Kerja. Maka dari itu, kita harus menengok pada UU No.13/2003. Jenis Hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dapat dikelompokkan menjadi: (i) Perjanjian Kerja dengan Jangka Waktu Tertentu (PKWT) dan (ii) Perjanjian Kerja dengan Waktu Tidak Ditentukan (PKWTT), sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Berhubung apa yang dibahas di sini khusus Perjanjian Kerja PMI dengan Pemberi Kerja dan mengingat Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 menyebutkan bahwa durasi Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f disusun berdasarkan kesepakatan tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja, serta dimungkinkan untuk diperpanjang..
- 2) Konteks perjanjian antara PMI dengan pemberi kerja, Perjanjian tersebut dinyatakan selesai apabila hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah terpenuhi, atau jika kepentingan masing-masing pihak telah direalisasikan. Selain itu, berakhirnya masa berlaku perjanjian juga menjadi salah satu faktor yang menentukan berakhirnya hubungan hukum tersebut. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban antara PMI dan pemberi kerja bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan, khususnya guna melindungi PMI yang kerap mengalami perlakuan yang tidak adil.

DAFTAR PUSTAKA

Az Zahra Zain Auralia dan Abraham Ferry Rosando, "*Perlindungan Hukum Sebagai Upaya Pengembalian Hak Korban Penipuan Uang Kripto Melalui Restitusi*", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Volume 3, No. 2, (Mei - Agustus 2023).

Asikin, Zainal, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

El Muhta, Majda, *Dimensi-Dimensi HAM* (Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), PT. RajaGrafindo Persada, 2008

Farojih, Ikhwan, *Hukum Perburuhan: Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional*, Setara Press, Malang, 2016

Hamid, Adnan, *Menuju Kebijakan yang Adil Bagi Pekerja Migran*, FHUP Press, Jakarta, 2018

Hidayat, Agung, *Konsep Perjanjian Kerja Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Menurut UU No.18/2017*

Kertonegoro, Sentanoe, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara, Jakarta, 2000

Martono, Endro, *Hukum Kontrak dan Perkembangannya*, Pustaka Iltizam, Solo, 2017

Mertokusumo, Sudikno, (ii), 2011, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Tentang Perjanjian Tertentu*, Alumni, Bandung, 1981

Subekti, R, 1994, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Citra Aditya, Bandung,

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995,

Soepomo, Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1999

Tirtodiningrat, K.R.M.T, *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, cet. Ke-9, Pembangunan, Jakarta. 1966

Jurnal

Fikri, Sulton *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri, Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Volume 08 Nomor 02, Desember 2022

Graysela Mawikere, Amanda, Imelda A. Tangkere, Stevan O. Voges, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Lex_Privatium Vol 14. No.1, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Sept 2024*

Habibah, Siti Maizul, *Jaminan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Rumah Tangga melalui Perjanjian Kerja di Surabaya* Article in Jurnal HAM · August 2021

Haryawa, Bayu Prawira Putra, *Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Di Indonesia Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Volume 2, Issue 2, June 2022,

Mukhidin, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku", Mimbar Hukum Volume 21, Nomor 1, February 2009, <http://e-journal.upstegal.ac.id>>download, diakses pada 21 Mei 2018

Purwanto, Harry, *Keberadaan Asas Pacta Sun Servanda dalam Perjanjian Internasional*, <http://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16252/10798>, diakses pada 22 Mei 2018

Subekti, Rika Putri, "Urgensi Ratifikasi Konvensi International Labor Organization: Perspektif Perlindungan Pekerja Anak Pada Sektor Rumah Tangga," Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 7, no. 1 (2018).

Suryokusumo, Soemaryo. 2003. "Aspek Moral dan Etika dalam Penegakan Hukum Internasional". Makalah. Seminar tentang "Pembangunan Hukum Nasional VIII diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Wibowo, Tri, *Perlindungan Hak Atas Upah Pekerja Migran Indonesia Sebagai Upaya Implementasi Tanggungjawab Negara Guna Menjamin Kesejahteraan Pekerja*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Law Quote

***"Keadilan adalah kapasitas
untuk membedakan antara yang
benar dan yang salah."***

**Aristoteles
(Filsuf Yunani, 384-322 SM)**



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

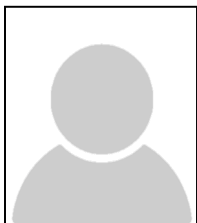
DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

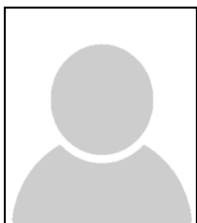
AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



BIODATA PENULIS



Dr. Rita Komalasari, telah menerbitkan jurnal ilmiah lainya dibidang penegakan hukum antara lain: *Strengthening asset recovery efforts: A path to mitigating corruption in the public sector*. Penulis: Rita Komalasari, Cecep Mustafa. Tulisan ini berupaya menganalisis secara komprehensif faktor yang menghambat upaya anti korupsi dan pemulihan aset di Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga menganjurkan pendekatan holistik, menekankan tindakan kolektif, kepercayaan pada jabatan publik, dan integrasi perampasan hak sebagai komponen penting dari strategi anti korupsi yang efektif. Jurnal ini memberikan panduan penting bagi para pembuat kebijakan dan praktisi yang berupaya menciptakan masa depan yang lebih transparan dan bebas korupsi di Indonesia, serta menawarkan perspektif baru dalam mengatasi korupsi dalam konteks pembangunan berkelanjutan pada perekonomian negara berkembang.



Dr. Cecep Mustafa, telah menerbitkan jurnal ilmiah lainya dibidang penegakan hukum antara lain: *Strengthening asset recovery efforts: A path to mitigating corruption in the public sector*. Penulis: Rita Komalasari, Cecep Mustafa. Tulisan ini berupaya menganalisis secara komprehensif faktor yang menghambat upaya anti korupsi dan pemulihan aset di Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga

menganjurkan pendekatan holistik, menekankan tindakan kolektif, kepercayaan pada jabatan publik, dan integrasi perampasan hak sipil sebagai komponen penting dari strategi anti korupsi yang efektif. Jurnal ini memberikan panduan penting bagi para pembuat kebijakan dan praktisi yang berupaya menciptakan masa depan yang lebih transparan dan bebas korupsi di Indonesia, serta menawarkan perspektif baru dalam mengatasi korupsi dalam konteks pembangunan berkelanjutan pada perekonomian negara berkembang.



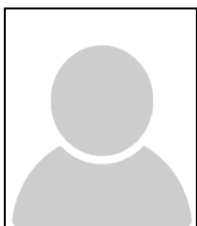
Apt. Adri Nurrakhmat S. bergabung dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tahun 2015. Karier profesionalnya dimulai sebagai Apoteker Pertama pada tahun 2019 dalam jabatan fungsional. Pada tahun 2021, penulis memperoleh promosi sebagai Apoteker Ahli Muda dan dipercaya untuk bertugas di Rumah

Sakit Umum Adhyaksa, Jakarta. Saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan Magister Intelijen Medik di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) melalui program beasiswa tugas belajar dari Kejaksaan Agung RI, dalam kerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN). Ketertarikannya pada bidang farmasi dan intelijen medik mencerminkan komitmennya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengembangkan kompetensi di bidang pelayanan kesehatan yang adaptif terhadap dinamika tugas dan tantangan strategis nasional.



Asmadi Syam, S.H., M.H. dilahirkan di Nagan Raya pada tanggal 10 Desember 1990. Yang bersangkutan mengawali karirnya sebagai calon jaksa pada Kejari Aceh Tengah, kemudian lulus PPPJ pada tanggal 13 Nopember 2017, ditempatkan di Cabjari Bakongan di Aceh Selatan, dan pada Januari 2018 dipromosikan

menjadi Kasubsi Pidum dan Pidsus, Kemudian pada oktober Tahun 2020 dimutasi menjadi Kasubsi Penyidikan pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Banda Aceh. Pada Juni 2024 yang bersangkutan kembali mendapatkan promosi menjadi Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah, sekaligus sejak September 2024 dipercayakan sebagai Plt. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Selain sebagai jaksa, yang bersangkutan juga merupakan dosen pada Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Sebagai penulis, beberapa karya yang telah dipublikasi adalah buku “*Manifesto Keadilan Restoratif*”, kemudian beberapa karya tulis ilmiah yang telah dimuat di Jurnal Internasional diantaranya; **Journal of Law Volume 8, Issue 1, 2022**, Pages 185-190 dengan judul “*Juridical Implication and Binding Authority of Dropping Charges Based on Restorative Justice*”, **Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Vol 10 No. 2 Februari 2023** dengan judul “*Termination Of Prosecution Based On Restorative Justice from The Perspective Of Dominus litis Principle*”, di **Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Balitbang Kemenkumham Vol 16, No 2 (2022)** dengan Judul “*Measuring The Concept Of Restoration in Criminal Justice System*”. Yang bersangkutan juga aktif menulis di beberapa media elektronik seperti **hukumonline.com, kliklegal.com, bahasan.id, dan kumparan.com.**



Prof. Mohd. Din S.H., M.H. merupakan guru besar hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.



Devi Safliana, S.H, M.H, jaksa fungsional pada Kejari Banda Aceh, masuk kejaksaan pada tahun 2005, memulai karir sebagai CPNS di Cabjari Sigli di Kotabakti, mengikuti PPPJ pada tahun 2004, setelah PPPJ ditugaskan sebagai Jaksa fungsional pada Kejari Aceh Selatan, kemudian mutasi sebagai Kasubsi Perdata dan TUN pada Kejari Banda Aceh, sehingga saat ini kembali menjadi jaksa fungsional pada Kejari Banda Aceh.



Desty Puspita Sari, SH., M.H., lahir di Palembang tanggal 05 Desember 1989. Menamatkan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (2011) dan Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya (2021). Sekarang ini, penulis bertugas sebagai Jaksa Fungsional pada Bagian Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri. Penulis merupakan penerima beasiswa Jurusan Bahasa dan Budaya China kelas Pegawai Pemerintahan dari Huaqiao University di Xiamen, China pada tahun 2019 dan 2022. Penulis juga menerima beasiswa Jurusan Bahasa China di South-Central Minzu University for Nationalities, di Wuhan, China dari *Confucius Institutes* pada tahun 2023.

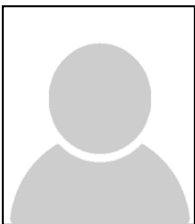


Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H., lahir di Ujung Pandang tanggal 30 Oktober 1991. Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2019 dan pada usia 27 (dua puluh tujuh) tahun. Bertugas sebagai Jaksa pada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Kejaksaan Agung. Meraih SIDHAKARYA (2015) dan 10 (sepuluh) besar peserta terbaik pada PPPJ (2017). Anggota Masyarakat Hukum Pidana Dan Krimologi (MAHUPIKI), Peneliti Senior Wakatobi Law Center, Tenaga Pengajar pada President University dan

Universitas Terbuka, serta Lulusan berprestasi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Tahun 2013. Aktif menulis buku ilmiah maupun artikel di berbagai media online (kumparan dan hukum online), jurnal nasional dan internasional yang dapat ditelusuri di *google scholar* atas nama penulis.



Dr. Ludfie Jatmiko S.P., S.H., M.H., Kasubbag Sunproglappada Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan. Masuk Kejaksaan tahun 2005, Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa tahun 2007. Memulai karir sebagai CPNS di Kejaksaan Negeri Mataram. Setelah PPPJ ditugaskan pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat (Waikabubak) sebagai Kepala Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Khusus, kemudian Jaksa Fungsional pada Biro Hukum, Kepala Seksi Perdata dan TUN pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal wilayah Kejaksaan Tinggi Jambi, mutasi sebagai Jaksa Fungsional (Satuan Tugas Laporan dan Pengaduan pada Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan), Pemeriksa Kepegawaian pada Irmud Pegasum Inspektur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan pada Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan.



Dr. Andi Fariana, S.H., M.H. dosen tetap Perbanas Institute Jakarta (dengan jenjang jabatan akademik Lektor Kepala 700) sejak Tahun 1988 dan memegang jabatan structural sebagai Kepala HRD/HCL dalam penggalan-penggalan waktu dan terakhir sebagai Kabiro HCL sejak tahun 2019. Selain di Perbanas, aktif dalam kegiatan sosial sebagai instruktur dan pemberi materi Hukum Keluarga dan Hukum Perjanjian Islam pada berbagai lembaga dan kelompok masyarakat serta mendirikan dan membina Yayasan Buchari Alfari yang bergerak dalam bidang Pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, juga sebagai Direktur

satu di Al Jihad Academy yang memberikan pelatihan dan Pendidikan bagi entrepreneur muda. Pendidikan yang pernah ditempuh, S1 Fakultas Hukum Univ Islam Indonesia Jogjakarta, S2 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta dan S3 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung serta beberapa Pendidikan lanjutan (khusus) dalam bidang hukum telematika, hukum ketenagakerjaan dan hukum bisnis.



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



PEDOMAN PENULISAN THE PROSECUTOR LAW REVIEW

1. The PROLEV menggunakan sistem seleksi *peer review double-blind*. Dewan Redaksi akan memeriksa naskah yang akan masuk dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan jurnal, baik *focus and scope*, *author guidelines*, serta *article template*. Naskah yang ditolak akan dikembalikan/diberitahukan kepada penulis, sedangkan naskah yang diterima akan diteruskan kepada *reviewer* untuk dilakukan *review*. Penulis melakukan submit naskah sesuai *author guidelines* dan *article template* melalui *Open Journal System (OJS)*. Naskah yang diserahkan merupakan karya ilmiah asli dan tidak mengandung unsur *plagiarism*. Naskah akan dilakukan *plagiarism verification* menggunakan *tools* turnitin. Apabila hasil *plagiarism* lebih dari 30% maka naskah akan ditolak dan dikembalikan/diberitahukan kepada penulis;
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan *Font Cambria*, ukuran *font 12*, ukuran kertas A4, dan spasi 1,5. Naskah terdiri ± 4.000-8.000 kata. Jumlah kata tersebut sudah termasuk *footnote* dan abstrak. Sedapat mungkin, gunakan artikel yang telah dipublikasikan oleh The PROLEV dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Hal tersebut merupakan penilaian khusus dari Redaksi. Dalam catatan kaki dan daftar pustaka, harus terdiri dari minimal 10 (sepuluh) jurnal, baik nasional dan/atau internasional yang dipublikasikan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, kecuali referensi unik yang belum pernah diterbitkan ulang.
3. Penulis yang bukan penutur asli bahasa Inggris perlu meminta bantuan penutur asli untuk mengoreksi naskah mereka sebelum mengirimkannya ke The PROLEV, jika menggunakan bahasa Inggris;
4. Sistematika naskah sebagai berikut:
 - ✓ **Judul.** Judul naskah harus singkat dan mencerminkan isi tulisan serta tidak memberikan peluang penafsiran yang beraneka ragam. Ditulis dengan huruf kapital, posisi tengah (*center*) dan huruf tebal (*bold*), ukuran huruf 14. Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia maka judul

dalam Bahasa Indonesia ditulis di atas Bahasa Inggris, begitu juga sebaliknya. Judul kedua ditulis miring (*italic*) dan di dalam kurung.

- ✓ **Nama penulis** (diketik di bawah judul, ditulis lengkap dan tanpa gelar. Jika penulis lebih dari 1 (satu) orang maka harus ditambahkan kata penghubung 'dan' (bukan simbol '&');
- ✓ **Penulis Korespondensi** (jika ada);
- ✓ **Nama dan Alamat Instansi penulis;**
- ✓ **Alamat e-mail penulis;**
- ✓ **Abstrak dan Kata Kunci (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris).** Ditulis dengan jelas dan lengkap menggambarkan isi artikel dalam Bahasa Indonesia (\pm 100-200 kata) dan Bahasa Inggris (\pm 100-150 kata), memuat latar belakang, permasalahan, maksud dan tujuan, metodologi dan kesimpulan. Abstrak ditulis dalam 1 (satu) alinea dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri / *justify*. *Abstract* dan *Keyword* dalam Bahasa Inggris ditulis dengan huruf cetak miring (*italic*). Di bawah abstrak dicantumkan minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) kata kunci yang dipisahkan dengan titik koma (;). Abstrak dalam Bahasa Inggris diikuti kata kunci (*Keywords*) dalam Bahasa Inggris. Abstrak dalam Bahasa Indonesia diikuti kata kunci dalam Bahasa Indonesia. Kata kunci disusun berdasarkan abjad. Hindari penggunaan singkatan dalam abstrak. Kata kunci dianggap mewakili dan/atau terkait dengan topik yang dibahas.
- ✓ **A. Pendahuluan.** Mengurai mengenai hal-hal yang menjadi alasan-alasan sehingga dipandang penting dilakukannya penelitian, analisis/tinjauan sumber-sumber hukum dan realitas di masyarakat, kajian teori, studi kepustakaan atau gagasan kritis konseptual yang akan disajikan di dalam jurnal, penelitian terdahulu, permasalahan dan *Gap Analysis*. Latar belakang mengandung konten pendahuluan berikut ini (dituangkan dalam paragraf mengalir, bukan menjadi sub-bab dari pendahuluan). Pada paragraf terakhir, tuliskan rumusan masalah yang disusun dalam bentuk pertanyaan yang kemudian menjadi alur pemikiran yang akan dibahas selanjutnya. Selain itu, pada paragraf terakhir tersebut, tuliskan metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian mencakup bentuk/jenis, pendekatan, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis, dan referensi yang digunakan, yang ditulis secara ringkas.
- ✓ **B. Pembahasan.** Menjabarkan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dan metode analisis yang digunakan. Uraian pembahasan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan hukum yang menjadi unsur utama dalam kajian. Teori-teori yang dimasukkan dalam kerangka teori harus dikutip dalam bab ini. Penulisan hasil dan pembahasan dapat ditambahkan dengan grafik, tabel, atau gambar yang mendukung. Gambar dan tabel harus dapat dibaca dan setidaknya memiliki resolusi 300 DPI (*Dots Per Inch*) untuk kualitas

pencetakan yang baik. Tabel dibuat dengan model terbuka (tanpa garis vertikal). Pembahasan dapat terdiri dari sub bab dengan penggunaan numbering yang berurutan, antara lain 1. Sub Bab; a. Sub-Sub Bab; 1) Sub-Sub-Sub Bab; a) Sub-Sub-Sub Bab; dst.

- ✓ **C. Penutup.** Bagian ini memuat kesimpulan yang diperoleh dalam bentuk uraian paragraf dengan mengacu pada rumusan masalah, beserta saran/rekomendasi. Apabila rumusan masalah ada 2 (dua) maka kesimpulan pun ada 2 (dua). Penulisan kesimpulan tidak menggunakan penomoran atau *bullet points*, tetapi berupa narasi dalam bentuk paragraf.
 - ✓ **Daftar Pustaka.** The PROLEV menggunakan *Chicago Manual of Style* ke-17 edisi (catatan lengkap) untuk Catatan Kaki (*Footnote*) dan Daftar Pustaka (*Reference*). Cantumkan bahan kepustakaan atau sumber tulisan yang anda baca dan tulis dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Catatan kaki dan daftar Pustaka harus seimbang/sama. Daftar pustaka disusun berdasarkan abjad. Silakan gunakan Aplikasi Pengelola Referensi, seperti EndNote, Mendeley, Zotero, dll. Panduan singkat tentang pengutipan dapat ditemukan di: [chicago manual of style](#).
 - ✓ **Biodata Penulis.** Memuat foto terbaru dengan latar kuning, serta data diri penulis yang ditulis secara ringkas ± 100-200 kata.
5. Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki *Chicago Manual of Style* Ke-17 edisi (catatan lengkap) dengan tata cara penulisan sebagai berikut:
- ✓ **Buku Satu Penulis:** Nama Depan Nama Belakang, *Judul Buku: Subtitle Buku, edisi, trans./ed., (ditulis miring)*, (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut: Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Asas-Asas Hukum Penuntutan, 1st ed*, (Jakarta: Guepedia, 2023), hlm. 12-15.
 - ✓ **Buku Dua sampai Tiga Pengarang:** Nama depan Nama belakang dan Nama depan Nama belakang, *Judul buku: Subjudul Buku edisi, trans./ed., (ditulis miring)*, (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut: Stanley J. Grenz and Roger E. Olson, *20th Century Theology: God and the World in a Transitional Age*, (Downers Grove: Intervarsity Press, 1992), pg. 191.
 - ✓ **eBuku:** Nama depan Nama belakang, Judul buku: Subjudul buku, (Kota penerbitan: Penerbit, Tahun), nomor halaman, format. Contohnya sebagai berikut: Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, (Makassar: Humanities Genius, 2022), 176, Google Playbook.

- ✓ **Jurnal:** Nama Depan Nama Belakang, “Judul Artikel,” Judul Jurnal volume#, no. Edisi# (Tanggal Publikasi): nomor halaman, URL jika ditemukan online. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim, “Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya,” *Pleno Jure* Vol 10, No. 2 (Oktober, 2021): 766, DOI: <https://doi.org/10.37541/plenjure.v10i2.575>.
- ✓ **Makalah Konferensi:** Nama depan Nama belakang, “Judul makalah konferensi,” (makalah dipresentasikan pada Nama Konferensi, Tempat Konferensi, Tahun Bulan), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:
Gary Templin, “Creation stories of the Middle East,” (paper presented at Northwestern Annual Conference, Evanston, IL, April 26, 2000), 17.
- ✓ **Internet:** Nama Depan Nama Belakang, “Judul Halaman Web” atau Deskripsi Halaman Web (situs web) , Judul atau Deskripsi Situs sebagai Keseluruhan, Pemilik atau Sponsor Situs, tanggal diperbarui/terakhir diubah/diakses, URL. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim, “Waktu Gugurnya Permohonan Pra Peradilan” diakses tanggal 31 Maret 2023, <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/waktu-gugurnya-permohonan-pra-peradilan-1zMEeNPekn3>
- ✓ **Koran/Majalah:** Nama depan Nama belakang, “Judul artikel surat kabar: Subjudul,” Judul surat kabar, Tanggal Bulan, Tahun, nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:
Jim Yardley and Simon Romero, “Liberation Theology gets Second Look in Pope Francis’ focus on Poor,” *Sydney Morning Herald*, May 30, 2015, 54.
- ✓ **Catatan Kuliah/ Materi Tutorial:** Nama Depan Nama Belakang, “Judul Kuliah,” (Jenis Pekerjaan, Lokasi Kuliah, Bulan Hari, Tahun). Contohnya sebagai berikut:
Timothy MacBride, “Jesus’ Ethical Teaching,” (Lecture Notes, Morling College, May 20, 2014).
- ✓ **Media Audio-Visual:** Judul sumber, disutradarai oleh Nama depan Nama belakang (Tempat publikasi: Studio, Tahun). Contohnya sebagai berikut:
The Passion of the Christ, directed by Mel Gibson (Pymont, NSW: Warner Home Video, 2004).
- ✓ **Kutipan singkat:** Ini adalah kutipan selanjutnya dari sumber yang sudah diberikan secara lengkap, terdiri dari nama belakang penulis dan judul utama karya, biasanya disingkat jika lebih dari empat kata, dan nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:
Asshidiqie, “Peradilan Etik,” 12-15 10.

6. Penulisan daftar Pustaka menggunakan model catatan kaki *Chicago Manual of Style* Ke-17 edisi (catatan lengkap) dengan tata cara penulisan sebagai berikut:

- ✓ **Buku Satu Penulis:** Nama Belakang, Nama Depan. Judul buku: Subjudul buku. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Rahim, Muh. Ibnu Fajar. *Asas-Asas Hukum Penuntutan*. edisi pertama. Jakarta: Guepedia, 2023.
- ✓ **Buku Dua-Tiga Penulis:** Nama Belakang, Nama Depan., dan Nama Depan Nama Belakang. Judul buku: Subjudul buku. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Grenz, Stanley J., and Roger E. Olson. *20th Century Theology: God and the World in a Transitional Age*. Downers Grove: Intervarsity Press, 1992.
- ✓ **eBook:** Nama keluarga, Nama depan. Judul buku: Subjudul buku. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Format. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu: *Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, (Makassar: Humanities Genius, 2022), 176, Google Playbook.*
- ✓ **Jurnal:** Nama keluarga, Nama depan. "Judul artikel jurnal: Subjudul." Judul jurnal Nomor volume, Nomor terbitan (Tahun): rentang halaman seluruh artikel. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim. "Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya." *Pleno Jure* Vol 10, No. 2 (Oktober, 2021): 766. DOI: <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i2.575>.
- ✓ **Makalah Konferensi:** Nama Keluarga, Nama Depan. "Judul makalah konferensi." Makalah dipresentasikan pada Nama Konferensi, Tempat Konferensi, Bulan Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Templin, Gary. "Creation stories of the Middle East." Paper presented at Northwestern Annual Conference, Evanston, IL, April 26 2000.
- ✓ **Essays in a Book of Composes:** Nama belakang penulis asli, Nama depan. "Judul Dokumen Utama, Tahun Terbit." Dalam Judul karya yang dikumpulkan: Subtitle, ed. Nama depan Nama belakang, nomor halaman seluruh dokumen. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Gould, Glen. "Streisand as Schwarzkopf." In *The Glenn Gould Reader*, edited by Tim Page, 308-11. New York: Vintage Books, 1984.
- ✓ **Internet:** Penulis konten atau pemilik/sponsor situs. "Judul halaman web." Publikasi/ Terakhir diubah/ Tanggal akses Bulan Tanggal, Tahun. URL. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim. "Waktu Gugurnya Permohonan Pra Peradilan." Diakses tanggal 31 Maret 2023. <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/waktu-gugurnya-permohonan-pra-peradilan-1zMEeNPekn3>

- ✓ **Newspaper/Magazines:** Nama belakang, Nama depan. “Judul artikel surat kabar: Subtitle.” Judul Koran, Tanggal Bulan, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Yardley Jim, and Simon Romero. “Liberation Theology gets Second Look in Pope Francis’ focus on Poor.” *Sydney Morning Herald*, May 30, 2015.
- ✓ **Catatan Kuliah/ Materi Tutorial:** Nama Keluarga, Nama Depan. “Judul Kuliah.” Jenis Pekerjaan, Lokasi Kuliah, Hari Bulan, Tahun Kuliah. Contohnya sebagai berikut:
MacBride, Timothy. “Jesus’ Ethical Teaching.” *Lecture Notes*, Morling College. May 20, 2014.
- ✓ **Media Audio-Visual:** Nama belakang, Nama depan, peran. Judul sumber daya. Tempat publikasi: Studio, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Gibson, Mel, dir. *The Passion of the Christ*. Pyrmont, NSW: Warner Home Video, 2004.

----- ***Terima Kasih*** -----



CALL FOR PAPER

THE PROSECUTOR LAW REVIEW

The Prosecutor Law Review (The PROLEV) adalah jurnal akses terbuka dan *peer-review* yang bertujuan untuk menyebarkan kajian konseptual tentang ilmu hukum, bidang lainnya sepanjang berkaitan dengan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan/Jaksa Agung/Jaksa/Penuntut Umum, baik di Indonesia maupun di beberapa negara.

The PROLEV diterbitkan oleh Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung dalam 3 (tiga) periode dalam setahun, yakni April, Agustus dan Desember dengan menggunakan *Open Journal System* (OJS). The PROLEV menerima artikel berbahasa Indonesia dan/atau Inggris.

The PROLEV memprioritaskan artikel yang mengandung unsur kebaruan, pemecahan masalah/solutif, dan studi perbandingan. Artikel wajib menyertakan referensi minimal 10 (sepuluh) jurnal internasional dan/atau nasional. Untuk informasi lebih lanjut terkait *Author Guidelines* dapat dilihat pada *website* The PROLEV.

PERIODE TERBIT

APRIL, AGUSTUS, DESEMBER.

KONTAK:

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG
GEDUNG PUSTRAJAGAKKUM LANTAI 4 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 1 KEBAYORAN
BARU, JAKARTA SELATAN, HP. +6281253048040 (WA ONLY),
e-mail: prolev@kejaksaan.go.id

 **Submission Link**
<https://prolev.kejaksaan.go.id>

VISI:

Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan

MISI:

1. Menghadirkan karya tulis ilmiah yang berkualitas dan mampu meningkatkan kualitas produk hukum bagi penegak hukum dan aparatur sipil negara.
2. Meningkatkan kesadaran hukum penegak hukum, aparatur sipil negara, dan masyarakat.
3. Menjaga kualitas dan konsistensi penegakan hukum.

The Prosecutor Law Review	Vol. 3	No. 1	Hal. iii - xxi	Jakarta April 2025	P - ISSN 2987 - 7342 E - ISSN 2987 - 8314
------------------------------	--------	-------	----------------	--------------------------	--

ISSN 2987-7342



ISSN 2987-8314

